



PEMERINTAH
KOTA SEMARANG



MEMBANGUN KOTA SEMARANG SEMAKIN HEBAT!



Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.

Lestari Agusalim, S.E., M.Si.

Zed Abdullah, S.E., M.Si.

MEMBANGUN KOTA SEMARANG SEMAKIN HEBAT!

**Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.
Lestari Agusalim, S.E., M.Si.
Zed Abdullah, S.E., M.Si.**

MEMBANGUN KOTA SEMARANG SEMAKIN HEBAT!

Oleh: Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.

Lestari Agusalim, S.E., M.Si.

Zed Abdullah, S.E., M.Si.

Hak Cipta ©2022 pada Penulis.

Editor : Vinsmoke

Desain Cover : Andang Suhana

Setter : Nier

Korektor : Kurapika

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Diterbitkan oleh Penerbit ANDI (Anggota IKAPI)

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282
Yogyakarta 55281

Percetakan: CV ANDI OFFSET

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282
Yogyakarta 55281

- Ed. I. - Cetakan 1;

hlm xxiv + 264; 16 x 23 cm.

ISBN : 978-623-01-3062-5

978-623-01-3063-2 (PDF)

DDC'23 : 771.4 City Planning

SAMBUTAN WALI KOTA SEMARANG



Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik hadirnya buku “MEMBANGUN KOTA SEMARANG SEMAKIN HEBAT!”. Buku yang ditulis oleh Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. (guru besar ilmu ekonomi di FEB UGM dan Rektor Universitas Trilogi), beserta para dosen Universitas Trilogi, mengkaji Kota Semarang secara sistematis dengan menggunakan perspektif ekonomi regional, geografi, strategi, dan perencanaan pembangunan daerah.

Kota Semarang adalah penyumbang terbesar perekonomian Provinsi Jawa Tengah (Jateng) hingga tahun 2021 sebesar 14,5%. Tidak berlebihan, Kota Semarang mempunyai potensi ekonomi besar menjadi *prime mover* pemulihan perekonomian Jateng dan nasional pascapandemi. Pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia sebelum terjadinya pandemi. Namun, terjadinya pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Jateng dan Kota Semarang terjerumus ke jurang resesi. Selain menyebabkan kematian dalam jumlah yang tidak sedikit, wabah Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup

parah, baik pada aspek sosial maupun ekonomi. Wabah Covid-19 telah menyebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi berhenti beroperasi atau setidaknya mengurangi kapasitas produksi. Akibatnya, banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan, berkurang jam kerjanya, dan berdampak kepada penurunan pendapatan.

Dalam konteks inilah, saya menyambut baik penerbitan buku berjudul *Membangun Kota Semarang Semakin Hebat!* Buku ini mampu “memotret” kondisi Kota Semarang sejak tahun 2010 hingga terkini, khususnya potensi ekonomi, struktur ekonomi, masalah mendasar, dan isu strategiknya. Buku ini tidak hanya mengupas perencanaan skenario (*scenario planning*) mau dibawa ke mana Kota Semarang 5-10 tahun ke depan, tetapi juga mengkaji perubahan visi, misi, dan strategi yang diperlukan untuk mewujudkan “Semarang Kota Perdagangan & Jasa yang Hebat dan Makin Hebat”. Keselarasan arah kebijakan, visi, prioritas antara Pemda Kota Semarang dengan Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah pusat perlu dirumuskan.

Buku ini juga membedah seberapa jauh capaian kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik Kota Semarang telah dicapai selama 11 tahun terakhir. Apa *grand strategy* pembangunan plus rencana aksi yang dilakukan oleh Kota Semarang menjadi fokus kajian buku ini.

Semoga penerbitan buku ini dapat menjadi salah satu inspirasi dan motivasi bagi rakyat, DPRD, dan Pemda Kota Semarang untuk bangkit dari pandemi dan resesi. Selain itu, berbagai capaian dan penghargaan bagi Kota Semarang sebagai Kota Cerdas, Kota Terbaik dalam Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan (Bappenas) selama 3 tahun berturut-turut, Kota Wisata Terbersih se-ASEAN (ASEAN



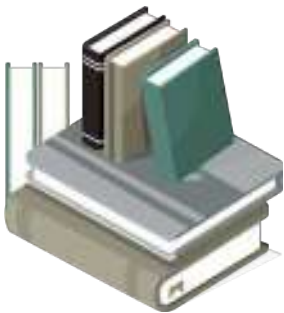
Tourism Forum), *Innovative Government Award* (Kemendagri), dapat menjadi referensi dan panduan *best practice* bagi pemda lain di Indonesia maupun mahasiswa, peneliti, dan dosen.

Semarang, 17 Oktober 2022

Wali Kota Semarang

Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

PRAKATA



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang atas berkah dan rahmat-Nya buku *MEMBANGUN KOTA SEMARANG SEMAKIN HEBAT!* dapat hadir di hadapan anda. Buku ini secara garis besar mencakup: (1) Pendahuluan; (2) Tinjauan Pustaka; (3) Metodologi; (4) Potensi Ekonomi; (5) Masalah Mendasar; (6) Isu Strategik; (7) *Change by Design*; (8) Perubahan Visi dan Misi; (9) Strategi Perubahan; (10) Program Inovasi Pembangunan Kota Semarang; (11) Capaian Pembangunan Kota Semarang; (12) Penutup.

Buku ini diharapkan juga menjadi media komunikasi yang interaktif antara Pemerintah Kota Semarang, dengan tim penyusun buku dan rakyat Semarang dalam menilai dan mengevaluasi kemajuan pembangunan Kota Semarang terutama sebelum dan setelah Dr. Hendrar Pribadi, S.E., M.M. mendapat amanah menjadi Wali Kota Semarang.

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang yang telah memercayai tim untuk mengumpulkan informasi, melakukan pengumpulan data, melakukan kajian, dan menulisnya menjadi buku ini. Secara khusus, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada: (1) Wali Kota Semarang, Dr. Hendrar Pribadi, S.E., M.M.; (2) Bapak Budi Prakosa, S.T., M.T. Kepala Bappeda Kota Semarang, beserta seluruh pejabat dan staf Bappeda Kota Semarang, khususnya Bapak Willar

Haruman, S.E., M.M. dan kawan-kawan yang telah membantu tim dari pengumpulan data, urusan administrasi, hingga analisis dan penulisan buku ini.

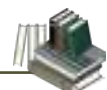
Tim penulis mengucapkan banyak terima kasih atas keterlibatan seluruh pejabat Kota Semarang dan semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini. Tentunya masukan, kritik, dan saran untuk menyempurnakan buku ini amat diharapkan.

Semarang, 17 Oktober 2022

Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.

Lestari Agusalm, S.E., M.Si.

Zed Abdullah, S.E., M.Si.



DAFTAR ISI



SAMBUTAN WALI KOTA SEMARANG.....	iii
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Perumusan Masalah	11
1.3 TUJUAN PENELITIAN	13
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN	13
1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ...	15
2.1 LANDASAN TEORI	15
2.1.1 Teori Aglomerasi Kota.....	15
2.1.2 <i>Smart City</i>	17
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN OUTLINE ISI BUKU	20
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 RANCANGAN PENELITIAN	25
3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	26
3.3 METODE ANALISIS	27

BAB 4 POTENSI EKONOMI KOTA SEMARANG.....	29
4.1 PDRB SEKTORAL	30
4.1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha	30
4.1.2 PDRB Menurut Pengeluaran	33
4.2 KONTRIBUSI SEKTORAL	34
4.2.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha	34
4.2.2 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran	37
4.3 PERTUMBUHAN SEKTORAL.....	38
4.3.1 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	38
4.3.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran	40
4.4 ANALISIS SEKTOR UNGGULAN	41
4.4.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	41
4.4.2 Analisis Tipologi Klassen (TK)	43
BAB 5 MASALAH MENDASAR KOTA SEMARANG	47
5.1 KEMISKINAN	47
5.2 PENGANGGURAN	51
5.3 KUALITAS SDM	53
5.4 KETIMPANGAN PENDAPATAN	54
5.5 INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG	55
5.6 KRIMINALITAS	60
5.7 KORUPSI	62
BAB 6 ISU-ISU STRATEJIK DI KOTA SEMARANG	65
6.1 KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.....	66
6.2 BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	67
6.3 PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR	74
6.4 INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH	76
6.5 KEMEROSOTAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP, BANJIR, DAN ROB	77
6.6 MASIH RENDAHNYA IKLIM INVESTASI.....	79



BAB 7 CHANGE BY DESIGN PEMBANGUNAN	
KOTA SEMARANG	81
7.1 MENGAPA PERLU MANAJEMEN PERUBAHAN?	82
7.2 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN.....	85
7.2.1 Pendekatan Teknokratik.....	86
7.2.2 Pendekatan dari Atas (<i>Top-Down</i>).....	90
7.2.3 Pendekatan dari Bawah (<i>Bottom-Up</i>)	93
7.2.4 Pendekatan Perencanaan Partisipatif.....	96
7.2.5 Pendekatan Politik.....	99
BAB 8 PERUBAHAN VISI DAN MISI KOTA SEMARANG	103
8.1 PERUBAHAN VISI	104
8.1.1 Keselarasan Visi Pemkot Semarang dengan Pemprov Jawa Tengah dan Pusat	104
8.1.2 Visi Kota Semarang	107
8.2 PERUBAHAN MISI.....	113
BAB 9 STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG	119
9.1 ARAH KEBIJAKAN	119
9.2 PERUBAHAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG	127
9.3 STRATEGI KOTA CERDAS DI SAAT PANDEMI.....	131
BAB 10 PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG	141
10.1 INOVASI PERENCANAAN	141
10.2 INOVASI PEMBANGUNAN.....	143
10.3 INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH.....	146
10.4 INOVASI UNGGULAN.....	151
10.4.1 San Piisan	152
10.4.2 Kampung Tematik.....	159
10.4.3 <i>Urban Farming</i>	174



BAB 11 CAPAIAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG.....	189
11.1 CAPAIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.....	189
11.1.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi.....	190
11.1.2 PDRB per Kapita.....	193
11.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	196
11.1.4 Kemiskinan	201
11.1.5 Ketimpangan Pendapatan	203
11.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	206
11.2 CAPAIAN PELAYANAN PUBLIK.....	211
11.2.1 Survei Kepuasan Masyarakat.....	212
11.2.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan	213
11.2.3 Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	216
11.3 PENGHARGAAN YANG DIRAIH KOTA SEMARANG.....	217
BAB 12 EPILOG	223
DAFTAR PUSTAKA.....	229
TENTANG PENULIS.....	243
INDEKS	249



DAFTAR TABEL

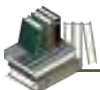


Tabel 1.1	Sumbangan Provinsi Menurut Pulau terhadap PDB Indonesia Tahun 2011-2020	2
Tabel 1.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Kota Semarang, Kota Semarang, Provinsi DKI, Kota Surabaya, Kota Medan, dan Kota Bandung Tahun 2021.....	6
Tabel 4.1	PDRB ADHK 2010 Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	32
Tabel 4.2	PDRB ADHK 2010 Kota Semarang Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)	34
Tabel 4.3	Distribusi PDRB ADHB Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha (Persen)	36
Tabel 4.4	Distribusi PDRB Kota Semarang Menurut Pengeluaran (Persen)	37
Tabel 4.5	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	39
Tabel 4.6	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)	41

Tabel 4.7	Hasil Estimasi <i>Location Quotient</i> (LQ) Menurut Sektor Ekonomi Kota Semarang.....	42
Tabel 4.8	Hasil Pemetaan Tipologi Klassen (TK) Menurut Sektor Ekonomi Kota Semarang.....	44
Tabel 5.1	Tingkat Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2005-2009 (%).....	48
Tabel 5.2	Tingkat Kemiskinan di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2016 (%).....	48
Tabel 5.3	Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2016	50
Tabel 5.4	TPT Kota Semarang dan Jateng Tahun 2010–2016 (%).....	51
Tabel 5.5	Perkembangan TPT Menurut Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 2012–2015 (%).....	52
Tabel 5.6	IPM Kota Semarang Tahun 2012–2016	53
Tabel 5.7	Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2014-2016	54
Tabel 5.8	Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	60
Tabel 5.9	Jumlah Tindak Pidana Menonjol (<i>Crime Index</i>) Menurut Jenis di Kota Semarang Tahun 2011–2016	61
Tabel 6.1	Perkembangan Angka Siswa Putus Sekolah Kota Semarang Tahun 2000-2005.....	67
Tabel 6.2	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	68
Tabel 6.3	Survei Persepsi Masyarakat terhadap Pemerintah yang Bersih dari KKN di Lima Kecamatan	69



Tabel 6.4	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat per Unsur	71
Tabel 6.5	Kondisi Jalan Kota di Kota Semarang Tahun 2016	75
Tabel 6.6	Kinerja Penataan Ruang Tahun 2005-2016	76
Tabel 6.7	Permasalahan dan Akar Masalah Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi pada Sektor Perekonomian	77
Tabel 6.8	Penanganan Banjir di Kota Semarang Tahun 2015-2016	78
Tabel 6.9	Tren Investasi Kota Semarang Tahun 2011-2016	79
Tabel 7.1	Perubahan Prioritas Pembangunan Kota Semarang	82
Tabel 7.2	Keselarasn Prioritas RKPD Kota Semarang dengan Prioritas RKP Pusat dan RKP Provinsi Jawa Tengah 2021	92
Tabel 8.1	Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jateng, dan Nasional	105
Tabel 8.2	Sinergi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Tengah, dan Kota Semarang	107
Tabel 8.3	Perubahan Visi Kota Semarang Sejak Tahun 2005	108
Tabel 8.4	Distribusi PDRB Kota Semarang Berdasarkan Lapangan Usaha (%)	112
Tabel 8.5	Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Agama dan Kecamatan Tahun 2020	113
Tabel 8.6	Perubahan Misi Kota Semarang	114
Tabel 8.7	Area Perubahan Reformasi Birokrasi	116

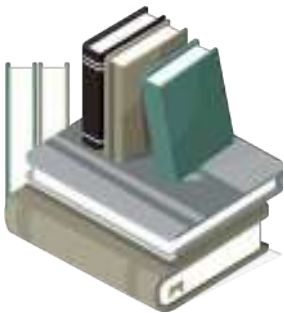


Tabel 8.8	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024	117
Tabel 9.1	Perubahan Strategi Pembangunan Kota Semarang Tahun 2010-2026	129
Tabel 10.1	Inovasi Perencanaan Daerah yang Telah Dilaksanakan	142
Tabel 10.2	Inovasi Pembangunan Daerah yang Telah Dilaksanakan	144
Tabel 10.3	Pengawasan dan Evaluasi Program Inovasi San Piisan	157
Tabel 10.4	Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL) Kampung Tematik	163
Tabel 10.5	Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL) Pengembangan <i>Urban Farming</i>	184
Tabel 11.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2021	192
Tabel 11.2	Perbandingan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021	193
Tabel 11.3	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2021 (%)	200
Tabel 11.4	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini	204
Tabel 11.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2021	209
Tabel 11.6	Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2010-2021	210



Tabel 11.7	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kota Semarang.....	212
Tabel 11.8	IKM Kota Semarang Tahun 2015-2019.....	213
Tabel 11.9	Opini BPK Atas LKPD Kota Semarang Tahun 2016-2020	215
Tabel 11.10	Nilai SAKIP Kota Semarang Tahun 2015-2021	216
Tabel 11.11	Penghargaan, Lembaga Pemberi, dan Tahun Diperoleh.....	219
Tabel 11.12	Hasil SKM per Unsur Pelayanan OPD Penyelenggara Pelayanan Publik Kota Semarang Tahun 2021.....	222





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Sumbangan Jateng dan Provinsi Lain terhadap PDB Indonesia Tahun 2010-2020 (%)3
Gambar 1.2	Sumbangan Kota Semarang Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 20214
Gambar 1.3	Sepuluh Kota di Indonesia dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Tahun 201712
Gambar 1.4	Peta Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan14
Gambar 2.1	Perkembangan Konsep dan Pemikiran Mengenai Aglomerasi Kota.....17
Gambar 2.2	Semarang Smart City.....20
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran dan Isi Buku21
Gambar 2.4	Ke Mana Arah Perencanaan Kota Semarang?22
Gambar 3.1	Rancangan Penelitian.....26
Gambar 3.2	Alur Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....27

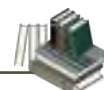
Gambar 5.1	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Semarang Dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016 (%).....	49
Gambar 5.2	Indeks Gini Kota Semarang Tahun 2011-2016	55
Gambar 5.3	Kondisi Jalan Rusak di Kota Semarang Tahun 2018-2020	57
Gambar 5.4	Pelaku Utama Korupsi di Indonesia	63
Gambar 6.1	Isu Stratejik Kota Semarang.....	65
Gambar 6.2	Indeks Persepsi Korupsi 11 Kota Tahun 2015.....	70
Gambar 6.3	Peta Rawan Kriminalitas Seluruh Kasus dengan Metode <i>Kernel Density</i>	72
Gambar 6.4	AKIP Kota Semarang Tahun 2016-2018.....	73
Gambar 6.5	Nilai SAKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019	74
Gambar 7.1	Visi, Misi, Strategi Kota Semarang	85
Gambar 7.2	Kerangka Teknokratik Kota Semarang Berdasarkan RPJMD 2016-2021	87
Gambar 7.3	Alur Kerangka Logis Pencapaian Visi	88
Gambar 7.4	Jumlah dan Persentase Usulan Hasil Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang.....	95
Gambar 7.5	Pendekatan Perencanaan <i>Bottom-Up</i> Melalui Musrenbang Tahun 2021	97
Gambar 7.6	Forum Konsultasi Publik.....	98
Gambar 7.7	Keterlibatan DP2K dalam Proses Perencanaan.....	99
Gambar 7.8	Pendekatan Politik dalam Penyusunan Dokumen RKPD Kota Semarang	100



Gambar 8.1	<i>Scenario Planning</i>	103
Gambar 9.1	<i>New Normal</i> dan Perlunya <i>Change Management</i> ...	122
Gambar 9.2	Tema Pembangunan Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021	123
Gambar 9.3	Respons Kebijakan Pemerintah, BI, dan OJK	124
Gambar 9.4	Keselarasn Prioritas Daerah dengan Isu Strategik Kota Semarang Tahun 2021	128
Gambar 9.5	Lima Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang	129
Gambar 9.6	Strategi Penanganan Covid-19	133
Gambar 9.7	Jumlah dan Tren Penduduk Kota Semarang yang Terkonfirmasi Terkena Covid-19 dan Korban Meninggal	134
Gambar 9.8	Strategi Penanganan Kemiskinan Dilakukan dengan Bantuan Sosial	135
Gambar 9.9	Data Penerima Bantuan Program Sembako per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2020	136
Gambar 9.10	Strategi Pemulihan UMKM Saat Pandemi	138
Gambar 9.11	Strategi Pemulihan Pariwisata Saat Pandemi	139
Gambar 9.12	Strategi Pemulihan Investasi Saat Pandemi	139
Gambar 9.13	Penguatan Ketahanan Pangan	140
Gambar 10.1	Pelaksanaan Verifikasi Proposal Kampung Tematik yang Diusulkan	168
Gambar 10.2	Pelaksanaan Supervisi/Kunjungan Lapangan ke Lokasi Kampung Tematik yang Diusulkan	169
Gambar 10.3	Contoh Kampung Tematik yang Berhasil Dikembangkan di Kota Semarang	172

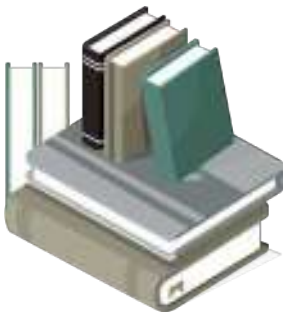


Gambar 10.4	Capaian Angka Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2015-2020	174
Gambar 10.5	Kerangka Pikir dan Tahapan Inovasi Pengembangan <i>Urban Farming</i> di Kota Semarang.....	177
Gambar 10.6	<i>Urban Farming Corner</i> (UFC)	180
Gambar 10.7	Kampung Tematik yang Bertema <i>Urban Farming</i>	181
Gambar 10.8	Penanaman Sukun oleh Wali Kota.....	181
Gambar 10.9	Panen Padi di Balai Kota Semarang	182
Gambar 11.1	Perlunya Indikator Capaian Pembangunan.....	190
Gambar 11.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2021	191
Gambar 11.3	Perbandingan PDRB per Kapita Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2021	195
Gambar 11.4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Semarang Tahun 2010–2021	197
Gambar 11.5	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan TPT Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2021	199
Gambar 11.6	Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010–2021 (%)	202
Gambar 11.7	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Semarang Dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 (%)	203



Gambar 11.8	Perbandingan Indeks Gini di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010–2022	205
Gambar 11.9	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010–2021	208
Gambar 11.10	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Semarang	213
Gambar 11.11	Kota Terbaik Pertama Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota Tahun 2019, 2020, 2021.....	218





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

BAB 1

PENDAHULUAN



Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan buku ini. Dilanjutkan dengan identifikasi dan perumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan ruang lingkup penelitian.

1.1 LATAR BELAKANG

Secara spasial, “di mana” aktivitas ekonomi Indonesia **bias ke Jawa dan Sumatra** sebesar sekitar 78-80% dari tahun 2011 hingga tahun 2020 (lihat Tabel 1.1). Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,8%, diikuti oleh Pulau Sumatra sekitar 21,4%, Pulau Kalimantan 7,9%, Pulau Sulawesi 6,6%, Bali dan Nusa Tenggara 2,9%, dan kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 2,4%. Provinsi-provinsi yang memberikan sumbangan terbesar di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta (18%), Jawa Timur (14,9%), Jawa Barat (13,5%), dan Jateng (8,7%). Di Pulau Sumatra, tiga provinsi penyumbang terbesar adalah Sumatra Utara (5,3%), Riau (4,7%), dan Sumatra Selatan (3%). Provinsi penyumbang terbesar di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Timur sebesar 3,9%, sedangkan provinsi penyumbang terbesar di Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Selatan sebesar 3,3%. Sumbangan aktivitas ekonomi di pulau Jawa dan Sumatra mencapai sekitar 80% terhadap PDB Indonesia. Artinya, Kawasan Timur Indonesia (Katimin) hanya menyumbang sekitar 20%

terhadap ekonomi Indonesia. Singkatnya, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Sumatra, atau bias ke Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan hanya menyisakan 20% untuk Katimin.

Tabel 1.1 Sumbangan Provinsi Menurut Pulau terhadap PDB Indonesia Tahun 2011-2020

Pulau	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sumatra	23,56	23,74	23,81	23,63	22,37	22,03	21,66	21,58	21,32	21,36
Jawa	57,59	57,65	57,99	58,51	58,27	58,49	58,49	58,48	59,00	58,75
Bali & Nusa Tenggara	2,56	2,51	2,53	2,50	3,10	3,13	3,11	3,05	3,06	2,94
Kalimantan	9,55	9,3	8,67	8,21	7,99	7,85	8,20	8,20	8,05	7,94
Sulawesi	4,61	4,74	4,82	4,97	6,08	6,04	6,11	6,22	6,33	6,60
Maluku dan Papua	2,13	2,06	2,18	2,18	2,19	2,46	2,43	2,47	2,24	2,35
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah dari BPS (2020)

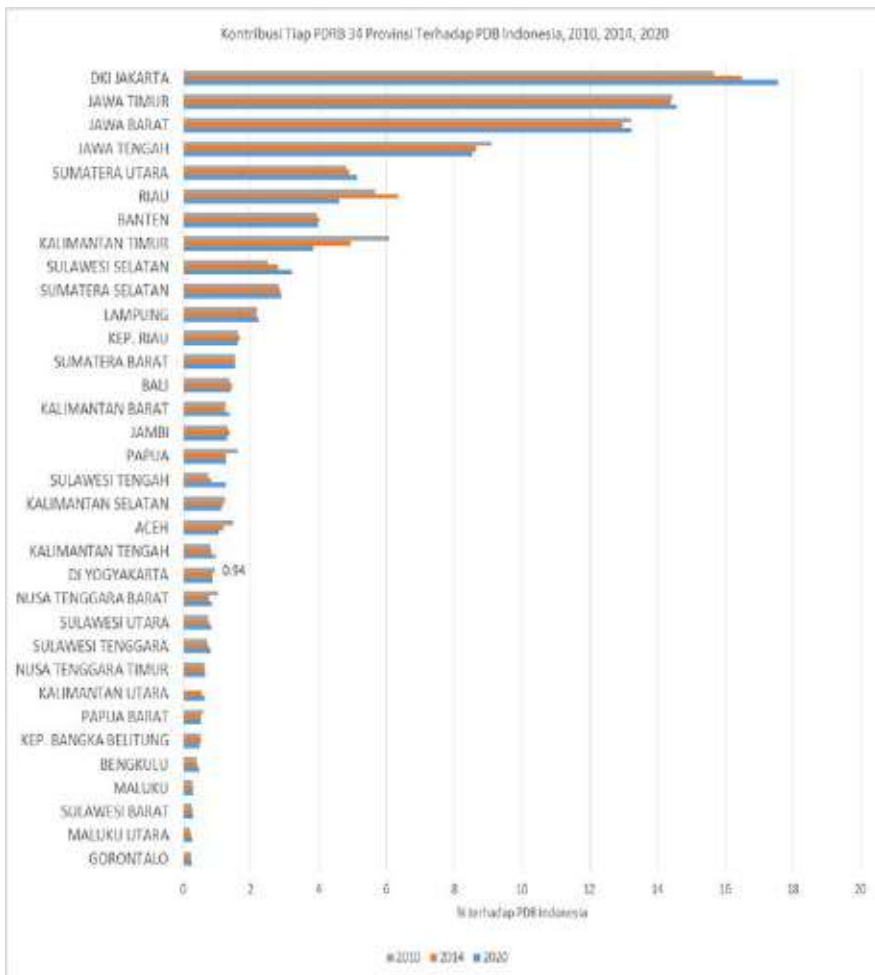
Berapa sumbangan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) terhadap perekonomian Indonesia? Gambar 1.1 menunjukkan Jateng memberikan kontribusi hanya sekitar 1,9% terhadap perekonomian Indonesia selama 2010-2016. Pasca Gubernur Jateng dipimpin oleh Ganjar Pranowo selama 2013-2018, kontribusi Jateng terhadap perekonomian Indonesia melonjak menjadi 8,9% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2019 dan 8,7% pada tahun 2020. Kinerja ini menunjukkan Jateng berada di peringkat ke-4 provinsi penyumbang ekonomi Indonesia di bawah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat hingga tahun 2020.

Memang provinsi di Pulau Jawa selalu mendominasi dalam menopang ekonomi Indonesia selama 2010-2019. Provinsi di Jawa yang padat penduduk, khususnya DKI Jakarta menyumbang 11-16,5%, Jawa Timur sekitar 2,6-14,9%, Jawa Barat 2,1-13,5%, Jateng sekitar 1,9-8,9%, Banten sekitar 2,4-4,1%, dan yang paling rendah DIY hanya sekitar 0,9-1,8%. Di luar Jawa, penyumbang PDB Indonesia yang utama adalah provinsi yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) melimpah,



khususnya tambang dan perkebunan. Ini terlihat dari sumbangan provinsi yang kaya dengan SDA khususnya Kalimantan Timur 4,4-11,5%, Riau sekitar 4,6-6,9%, Sumatra Utara sekitar 2,5-4,9%, Sumatra Selatan sekitar 2,1-2,9%, Lampung sekitar 1,9-2,2%, Kepri sekitar 1,7-6,5%, Aceh 1,2-2,2%, Papua 1,5-3,8%, dan Maluku Utara sekitar 0,2-1,4%.

Gambar 1.1 Sumbangan Jateng dan Provinsi Lain terhadap PDB Indonesia Tahun 2010-2020 (%)

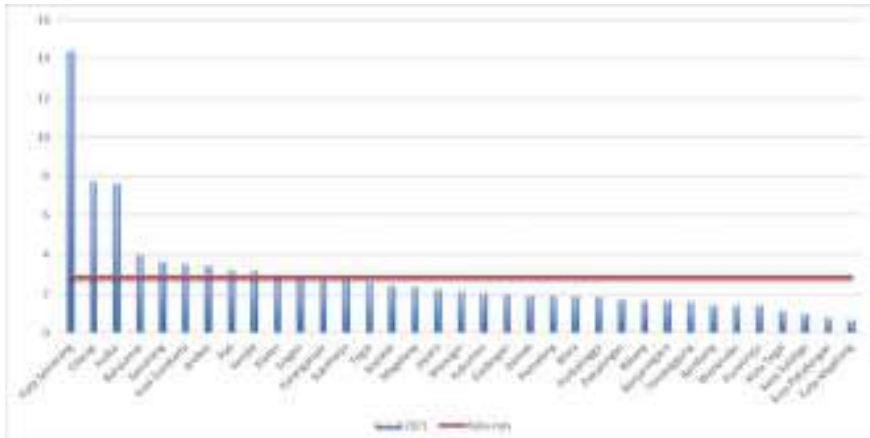


Sumber: Diolah dari BPS (2018; 2020)



Berapa sumbangan Kota Semarang terhadap perekonomian Provinsi Jateng? Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Kota Semarang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jateng sebesar 14,45% pada tahun 2021. Angka ini meningkat dibanding tahun 2019 (14,06%) dan 2020 (14,01%). Selain Kota Semarang, ada 9 daerah lain yang menyumbang di atas rata-rata PDRB Jateng, yaitu: Cilacap (7,8%), Kudus (7,6%), Banyumas (4%), Kabupaten Semarang (3,6%), Kota Surakarta (3,5%), Brebes (3,5%), Pati (3,2%), Kendal (3,2%), Klaten (3%).

Gambar 1.2 Sumbangan Kota Semarang Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber: Diolah dari BPS Jateng (2022)

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Nama Semarang berasal dari kata “sem” dan “arang”. Kata “sem” berarti asam/pohon asam dan kata “arang” berarti jarang. Arti dari kata Semarang adalah pohon asam yang jarang. Pada saat penjajahan Hindia Belanda, Kota Semarang ini sempat mengalami perubahan menjadi Samarang, tetapi kemudian berubah kembali menjadi Semarang (Adryamarthanino, 2021).



Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50' - 7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35' - 110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kota Semarang di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Kendal, di sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Demak, di sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Semarang, dan di sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai sebesar 13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai (BPS Kota Semarang, 2022).

Kota Semarang juga dikenal sebagai Kota Metropolitan. Kota Metropolitan umumnya memiliki jumlah penduduk 1-5 juta jiwa (Gischa, 2020). Jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2021 tercatat sebesar 1,66 juta jiwa. Kota ini menempati urutan kelima dilihat dari jumlah penduduknya setelah DKI Jakarta sebesar 10,61 juta jiwa, Surabaya sebesar 2,88 juta jiwa, Bandung sebesar 2,45 juta jiwa, dan Medan sebesar 2,46 juta jiwa (lihat Tabel 1.2).

Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat sebesar 12.146,92 penduduk per km^2 , sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatan penduduknya paling kecil sebesar 1.171,48 penduduk per km^2 . Dibandingkan keempat kota metropolitan lainnya, maka kepadatan penduduk Kota Semarang adalah terendah, yaitu 4.431,92 penduduk per km^2 , sedangkan DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni sebesar 15.978 penduduk per km^2 .



Tabel 1.2

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Kota Semarang, Kota Semarang, Provinsi DKI, Kota Surabaya, Kota Medan, dan Kota Bandung Tahun 2021

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Pertumbuhan Penduduk 2020-2021
Mijen	56,52	83.321	1.474,1	4,00
Gunungpati	58,27	98.343	1.687,66	0,44
Banyumanik	29,74	141.689	4.763,89	-0,36
Gajahmungkur	9,34	55.857	5.977,97	-0,89
Semarang Selatan	5,95	61.616	10.362,05	-0,89
Candisari	6,4	74.952	11.716,59	-0,89
Tembalang	39,47	191.560	4.853,37	1,32
Pedurungan	21,11	193.128	9.148,8	-0,02
Genuk	25,98	125.967	4.848,79	2,88
Gayamsari	6,22	69.792	1.1220,74	-0,89
Semarang Timur	5,42	65.859	12.146,92	-0,89
Semarang Utara	11,39	116.820	10.253,94	-0,89
Semarang Tengah	5,17	54.696	10.572,18	-0,89
Semarang Barat	21,68	147.885	6.822,33	-0,89
Tugu	28,13	32.948	1.171,48	0,51
Ngaliyan	42,99	142.131	3.306,32	0,38
Kota Semarang	373,78	1.656.564	4.431,92	0,25
DKI Jakarta	664,01	10.609.681	15.978	0,57
Kota Surabaya	334,45	2.880.284	8.612	0,28
Kota Medan	265,1	2.460.858	9.283	0,79
Kota Bandung	167,31	2.452.943	14.388	0,48

Sumber: Data diolah dari BPS Provinsi DKI (2022:76-77, 79); BPS Kota Surabaya (2022:7, 48-49); BPS Kota Bandung (2022:9, 51-52); BPS Kota Medan (2022:7, 63-64); BPS Kota Semarang (2022:9, 55-56)



Kota Semarang berhasil dinobatkan sebagai Kota Cerdas Indonesia pada penghargaan bertaraf nasional *Goesmart* 2019 yang digelar di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB) (Beritasatu, 18/11/2019).



Eddy Satriya, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Kemenko Bidang Perekonomian, menyerahkan Penghargaan Kota Cerdas kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dalam ajang *Goesmart* 2019 di ITB Bandung (BeritaSatu, 18/10/2019).

Total sembilan kategori Kota Menuju Cerdas berhasil diborong Kota Semarang, yaitu meliputi *rating* Ekonomi Cerdas, Sosial Cerdas, Lingkungan Cerdas, Kesehatan Cerdas, Keamanan dan Kebencanaan Cerdas, Pengembangan dan Pengelolaan Kota, Kesiapan Pemerintahan Digital, Kesiapan Integrasi, serta Rating Puncak Kota Menuju Cerdas. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Rektor ITB bidang riset, inovasi, dan kemitraan, Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono, serta Ir. Eddy Satriya selaku Asisten Deputi Telematika serta Utilitas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Penghargaan Kota Cerdas diberikan atas keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam berbagai sistem pembangunan, yang mampu mempermudah dan mempercepat alur kerja birokrasi pelayanan publik. Tak hanya itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Hendi, menegaskan pencapaian ini merupakan hasil dari kerja seluruh elemen masyarakat. Hendi pun menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang pelayanan dan pembangunan Kota Semarang. Untuk itu, pada periode kepemimpinannya, Hendi mengatakan bahwa salah satu fokus Pemerintah Kota Semarang adalah melakukan pemutakhiran sistem teknologi informasi dalam berbagai bidang. Di sisi lain, semangat perbaikan diri juga ia anggap terpenting dalam pembangunan Semarang *Smart City*. Tolok ukur pembangunan Kota Cerdas tidak



hanya pada seberapa mutakhir *tools* yang digunakan, tetapi seberapa maksimal SDM terkait berkomitmen untuk memanfaatkan *tools*-nya.

Selain penghargaan Kota Cerdas, Kota Semarang menjadi Kota Terbaik di Indonesia dalam hal Perencanaan dan Pencapaian Kota berturut-turut selama tiga tahun dari tahun 2019 hingga 2021. Penghargaan tersebut diberikan atas dasar hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Independen dan Tim Penilai Utama yang ditunjuk oleh Bappenas. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penilaian PPD 2021 terdapat beberapa peningkatan, di antaranya: Pertama, *digital evaluation system*, di mana sistem penilaian dokumen menggunakan aplikasi *web-based*. Kedua, *balanced-grouped-evaluator* dengan penambahan Tim Penilai Independen di bidang lingkungan, inovasi, dan perencanaan pembangunan. Ketiga, *environment friendly* dengan menambahkan indikator item penilaian lingkungan hidup terkait komitmen pemerintah daerah dalam aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Keempat, *COVID-19 Sensitive Response*, yaitu penambahan penilaian terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.

MUSRENBANGNAS 2021
"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

PERAIH DAERAH TERBAIK PPD 2021 DAN PENGHARGAAN KHUSUS

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi:

1. Sumatera Barat
2. Jawa Barat
3. Bengkulu

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kabupaten:

1. Bangka
2. Banggai
3. Hulu Sungai Selatan

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota:

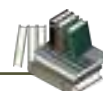
1. Semarang
2. Padang
3. Bandung

Dalam Musrenbangnas 2021, Kementerian PPN/Bappenas memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 bagi daerah yang berhasil menyiapkan perencanaan berkualitas dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang lebih baik. Selamat untuk daerah peraih PPD 2021 berikut ini!

Selain PPD 2021, Kementerian PPN/Bappenas turut mengagukasikan:

- Penghargaan Khusus Daerah di Bidang Inovasi Pembiayaan Alternatif. Juara KPBU untuk Kota Pekanbaru
- Penghargaan Khusus Daerah di Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon untuk Provinsi Bali

www.bappenas.go.id | Humas@bappenas.go.id | Kementerian PPN/Bappenas | @bappenasRI



ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, IPM, serta pelayanan publik. Dari sisi penyusunan perencanaan, Kota Semarang juga telah menggunakan pendekatan: (1) *bottom-up* yang dilakukan secara inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari dewan pertimbangan pembangunan Kota, LPMK, Komisi Lanjut Usia, Kelompok Kreatif dan Apindo; (2) *top-down*, yang selaras dengan tema dan prioritas nasional dan provinsi DIY; (3) *politis*, yang memasukkan usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD; (4) *teknokratik*, yang menggunakan metodologi perencanaan yang standar dan melibatkan akademisi.

Kedua penghargaan untuk Kota Semarang inilah yang menjadi dasar dan alasan utama penulisan buku ini. Di balik capaian ini, tentu menarik dikaji secara lebih mendalam potensi ekonomi, masalah, isu strategik, visi, strategi, program, dan *leadership* dari wali kota. Buku ini akan membuka “kotak hitam” atau “rahasia di balik” sukses Kota Semarang.

1.2 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang juga menghadapi persoalan urbanisasi. Secara umum, tantangan urbanisasi adalah pertumbuhan penduduk, ekspansi yang tidak terkendali dari wilayah-wilayah kota, kemiskinan, ketidaksetaraan, polusi, dan kemacetan (Salat *et al.*, 2017:17). Urbanisasi terjadi karena semakin banyaknya penduduk perkotaan, yang disebabkan pertumbuhan alami penduduk dan migrasi, yaitu perpindahan penduduk desa ke kota. Urbanisasi mendorong suatu kota mengalami perkembangan dan pertumbuhan karena harus memenuhi kebutuhan penduduknya yang semakin banyak. Dampak dari proses perkembangan adalah perubahan ekonomi dan sosial. Perubahan ekonomi di antaranya adalah pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, seperti perdagangan dan industri. Adanya pergeseran sektor lapangan pekerjaan tersebut menyebabkan peningkatan



produktivitas ekonomi suatu kota yang pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan dan aktivitas kota. Sementara itu, perubahan sosial yang terjadi dalam proses urbanisasi ini ditunjukkan oleh adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup penduduknya. Pertumbuhan penduduk Kota Semarang pada tahun 2020-2021 adalah 0,25%. Sumbangan pertumbuhan penduduk Kota Semarang terbesar adalah Kecamatan Mijen sebesar 4% dan terkecil adalah Kecamatan Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, dan Semarang Barat sebesar masing-masing -0,89%. Dibandingkan dengan keempat kota metropolitan lainnya, pertumbuhan penduduk Kota Semarang adalah terendah (0,25%), sedangkan Kota Medan memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi (0,79%).

Berdasarkan wawancara khusus dengan Wali Kota Semarang, Pak Hendi (24/3/2022), menuturkan masalah utama yang dihadapi sebelum beliau menjabat sebagai wali kota dan Plt wali kota adalah:



Peta Kapasitas Banjir Rob (Pratiwi, 2019).

1. Kota Semarang selalu terancam rob dan banjir. Ada 40% bagian Kota Semarang tergenang banjir saat hujan dan rob. Komponen kapasitas banjir rob mengacu pada PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012 sehingga parameter kapasitas banjir rob terdiri atas jumlah tenaga kesehatan, jumlah sarana kesehatan, sosialisasi banjir rob, perolehan bantuan, dan adanya posko darurat. Setidaknya ada tujuh kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan sedang yaitu Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Barat, dan Tugu. Satu kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan rendah, yaitu Kecamatan Semarang Tengah. Akibat seringnya banjir rob, 54% jalan rusak.



2. Rendahnya investasi. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Dalam Negeri (PMDN) tidak pernah lebih dari Rp1 triliun setahun.
3. Merebaknya pungli dan korupsi dalam pelayanan publik. Kondisi birokrasi terlalu banyak faksi dan tidak kompak, bahkan saling sikut.
4. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Semarang lebih rendah pada tahun 2010 dibanding Kota Surakarta, Salatiga dan kota besar lainnya.
5. Relatif tingginya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dibanding kota lainnya.
6. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Semarang. Bahkan tidak sedikit yang antipati atau “cuek” terhadap pemerintah kota. Kaum milenial tidak bangga dengan Kota Semarang karena Semarang relatif sepi, kurang banyak hiburan, café, dan resto.

1.2.2 Perumusan Masalah

Di Indonesia, Kota Semarang adalah kota dengan jumlah penduduk terbanyak ke-8, dengan jumlah penduduk 1,65 juta jiwa tahun 2017. Kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah Jakarta 10,3 juta jiwa, disusul Kota Surabaya 2,8 juta jiwa, Medan 2,5 juta jiwa, Bandung 2,4 juta jiwa, Depok 1,8 juta jiwa, Makassar 1,7 juta jiwa. Gambar 1.3 menunjukkan sepuluh kota metropolitan di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak.

Rumusan masalah penelitian yang akan dijawab tuntas dalam buku ini adalah:

1. Apa potensi ekonomi Kota Semarang berdasarkan lapangan usaha?
2. Apa masalah mendasar yang dihadapi Kota Semarang?
3. Apakah isu stratejik yang muncul di Kota Semarang?
4. Bagaimanakah pemda Kota Semarang melakukan perubahan dengan perencanaan (*change by design*)?
5. Mengapa visi dan misi Kota Semarang perlu diubah?



6. Bagaimana strategi kebijakan mewujudkan visi “Semarang Kota Perdagangan & Jasa Yang Hebat (Makin Hebat) Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”?
7. Apa program utama dan inovasi daerah yang diimplementasikan oleh Kota Semarang?
8. Mengapa Kota Semarang dapat meraih berbagai macam penghargaan nasional dan internasional?

Gambar 1.3

Sepuluh Kota di Indonesia dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Tahun 2017



Sumber: Kemendagri (2017)



1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah buku tentang “Membangun Kota Semarang Semakin Hebat!” Tujuan penulisan buku ini adalah:

1. Sebagai panduan informasi mengenai mengelola kota metropolitan dengan segala dinamika dan tantangannya.
2. Untuk menjadi buku referensi bagi para peneliti, pemerhati kota, para pembaca, mahasiswa, dan masyarakat umum mengenai pengembangan kota khususnya Semarang *Smart City*.
3. Bahan referensi untuk daerah-daerah lain yang ingin membentuk atau menerapkan sistem “smart city”.
4. Agar dapat meningkatkan rasa kebanggaan dalam diri warga Kota Semarang tentang Kota Semarang yang meraih banyak penghargaan nasional dan internasional.
5. Sebagai dokumen yang berisi informasi mengenai Kota Semarang sebagai *smart city* secara detail, menarik, dan mampu memberikan data serta fakta secara jelas dan sistematis.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat yang akan diperoleh dengan disusunnya buku *Membangun Kota Semarang Semakin Hebat!* ini adalah:

1. Bagi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah terkait, yaitu: (a) sebagai referensi dan evaluasi kinerja pengembangan kota dalam pengembangan program dan inovasi daerah; (b) sebagai pedoman dalam mengembangkan kota cerdas yang mampu menjawab masalah rakyatnya.
2. Bagi dunia usaha, wakil rakyat, dan masyarakat Kota Semarang, sebagai bahan informasi untuk mengkaji kinerja perekonomian Kota Semarang.
3. Mempromosikan dan menyebarkan visi, arah kebijakan, strategi, dan capaian Kota Semarang.
4. Sebagai alat evaluasi kinerja dan pemantauan hasil pembangunan Kota Semarang.



1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah Kota Semarang yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan (lihat Gambar 1.4). Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,78 km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Gunungpati sebesar 58,27 km², diikuti oleh Kecamatan Mijen dengan luas wilayahnya sebesar 56,52 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Tengah sebesar 5,17 km².

Gambar 1.4 Peta Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan



Sumber: BPS Kota Semarang (2022: vii)



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Bab ini akan menelusuri berbagai teori yang menjadi landasan analisis buku ini. Teori yang relevan bagi kajian pembangunan Kota Semarang adalah teori aglomerasi kota dan *smart city*. Dilanjutkan dengan uraian mengenai kerangka pemikiran dan *outline* isi buku ini.

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Aglomerasi Kota

Literatur tidak secara jelas membedakan antara *aglomerasi* dan *kluster*. Sebagai contoh, Montgomery mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena “penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*)... yang diasosiasikan dengan *kluster spasial* dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen” (Montgomery, 1988). Ini senada dengan Markusen (1996) yang menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa; dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. Ia menulis bahwa aglomerasi menunjukkan:

“the stickiness of a place resides not in the individual locational calculus of firms or workers, but in the external economies available to each firm from its spatial conjunction with other firms and suppliers of services” (Markusen, 1996).

Dari kutipan-kutipan definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa suatu aglomerasi tidak lebih dari sekumpulan kluster industri (Kuncoro, 2012). Namun, suatu kluster, atau superkluster di Brazil, atau bahkan kumpulan kluster tidak dapat diidentikkan dengan suatu kota. Nama-nama populer seperti Silicon Valley di AS atau Sinos Valley di Brazil menunjukkan bentuk-bentuk geografis yang berbeda, demikian juga literatur kluster industri seperti Emilia-Romagna di Italia.

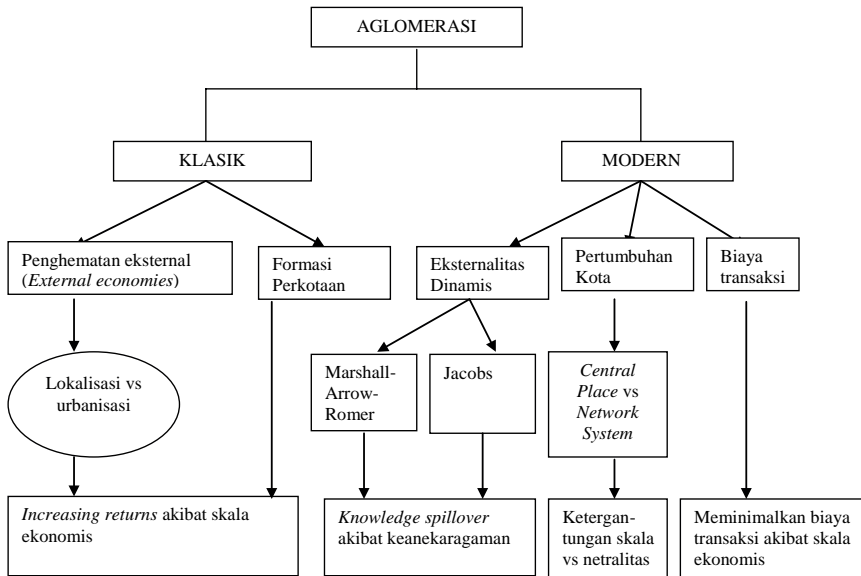
Perkembangan konsep dan pemikiran mengenai aglomerasi dapat dirangkum dalam Gambar 2.1. Gambar ini memperlihatkan bahwa setiap studi atau teori mengenai aglomerasi dapat digolongkan dalam perspektif klasik atau modern. Perspektif klasik percaya bahwa aglomerasi merupakan suatu bentuk spasial dan diasosiasikan dengan konsep “penghematan akibat aglomerasi” (*economies of agglomeration*) melalui konsep eksternalitas. Para pendukung perspektif ini telah meletakkan dasar-dasar model mikro mengenai eksternalitas akibat skala ekonomis (Fujita & Ogawa, 1982; Fujita & Thisse, 1996). Belakangan, jalur pemikiran ini ditindaklanjuti dengan berbagai studi empiris yang mencoba menganalisis dan mengestimasi besarnya skala ekonomis, sebagaimana terlihat dari karya Gelder (1994), Henderson (1988), dan Sveikauskas (1975). Sementara itu, para ahli ekonomi perkotaan mendefinisikan kota sebagai hasil dari produksi aglomerasi secara spasial. Ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya literatur mengenai formasi kota.

Perspektif modern menunjukkan beberapa kelemahan teori Klasik mengenai aglomerasi. Pada konteks ini, tiga jalur pemikiran dapat diidentifikasi (Kuncoro, 2012). Pertama, teori-teori baru mengenai eksternalitas dinamis (*dynamic externalities*). Kedua, mazhab pertumbuhan perkotaan. Ketiga, paradigma berbasis biaya transaksi.



Gambar 2.1

Perkembangan Konsep dan Pemikiran Mengenai Aglomerasi Kota



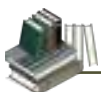
Sumber: Kuncoro (2012)

2.1.2 Smart City

Ada banyak teori tentang kota cerdas (*smart city*). Cohen (2010), misalnya, mendefinisikan kota cerdas sebagai berikut:

“Smart cities use information and communication technologies (ICT) to be more intelligent and efficient in the use of resources, resulting in cost and energy savings, improved service delivery and quality of life, and reduced environmental footprint—all supporting innovation and the low-carbon economy.”

Nijkamp *et al.* (2009) mendefinisikan kota cerdas sebagai **kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia (SDM), modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern** untuk mewujudkan **pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kualitas kehidupan** yang tinggi.



Giffinger *et al.* (2007) fokus pada enam ciri kota cerdas, yaitu *smart economy*, *smart mobility* (*smart lighting*, *smart infrastructure*), *smart environment*, *smart people*, *smart living*, *smart governance* (*smart license*). Kota cerdas umumnya diidentifikasi pada enam dimensi utama, yaitu *smart government* (pemerintahan cerdas), *smart economy* (ekonomi cerdas), *smart society* (kehidupan sosial cerdas), *smart mobility* (mobilitas cerdas), *smart environment* (lingkungan cerdas), dan *quality of life* (hidup berkualitas).

Kendati definisi tentang *smart city* beragam, tetapi menunjukkan beberapa kesamaan bahwa **penerapan konsep *smart city* dalam perencanaan kota adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat** dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan, seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi (Fridiyanti & Pawestri, 2019). Pada dasarnya prinsip utama *smart city* adalah menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down* dengan partisipasi masyarakat yang bersifat *bottom-up*.

Seberapa jauh Semarang menerapkan *smart city*? Semarang sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan konsep *Smart City* sebagai salah satu sarana pendukung pemerintahan. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mendeklarasikan Semarang Smart City (SMC) tahun 2013, yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama PT Telkom. MoU dengan PT Telkom mencakup pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mewujudkan Program *Digital Government Service* melalui *Smart City* di wilayah Kota Semarang. Tindak lanjutnya Telkom memasang Free Wi-Fi Ide (2.300 titik) di sejumlah tempat, seperti sekolah, perkantoran, area publik, dan lain-lain. Desain SMC dirangkum dalam Gambar 2.2, yang intinya pemda ingin mewujudkan Kota



Semarang yang lebih baik dan hebat dengan 6S (Smart), 4K (Konsep), 10i (indikator), dan 10P (Program Prioritas) (Bunyamin, 2018). Dengan menerapkan *smart city*, Kota Semarang menyediakan berbagai fasilitas yang dinamakan 6S, yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Kita dapat mendapatkan berbagai macam informasi di 6S di *website* <http://smartcity.semarangkota.go.id/>, yang merupakan salah satu pemanfaatan dari konsep *smart city*. Kita juga dapat melayangkan aduan kepada pemerintah daerah. 4K adalah konsep dasar yang meliputi Keberlanjutan, Konektivitas, Kreativitas, dan Keterpaduan Sosial.

Penerapan *smart city* ini sangat membantu masyarakat dan juga pemerintah daerah. Dengan SMC, Kota Semarang mulai mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung pemerintahan ataupun masyarakat yang mampu memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan. “Inti pembangunan kota cerdas tidak melulu berorientasi pada pemutakhiran teknologi. Fokusnya pada apa yang dibutuhkan masyarakat, dengan tujuan memberikan solusi dan kemudahan,” ujar Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu, (Awal.id, 15/10/2021). Pemanfaatan digitalisasi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah hanya bersifat sebagai pendukung. Dengan digitalisasi diharapkan dapat mempercepat langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Contohnya, seperti berbagai layanan daring pada portal Semarangkota.go.id, yang di dalamnya masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelayanan publik, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, layanan pembayaran pajak, serta informasi terkini mengenai Covid-19.



Gambar 2.2 Semarang Smart City



Sumber: Bunyamin (2018)

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN OUTLINE ISI BUKU

Berdasarkan survei literatur yang sudah dijabarkan dalam Subbab 2.1, disusunlah kerangka pemikiran dan rencana isi buku, sebagaimana dirangkum dalam Gambar 2.3 berikut. Buku ini terdiri dari setidaknya 12 Bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang penulisan buku ini, perumusan masalah, tujuan penulisan



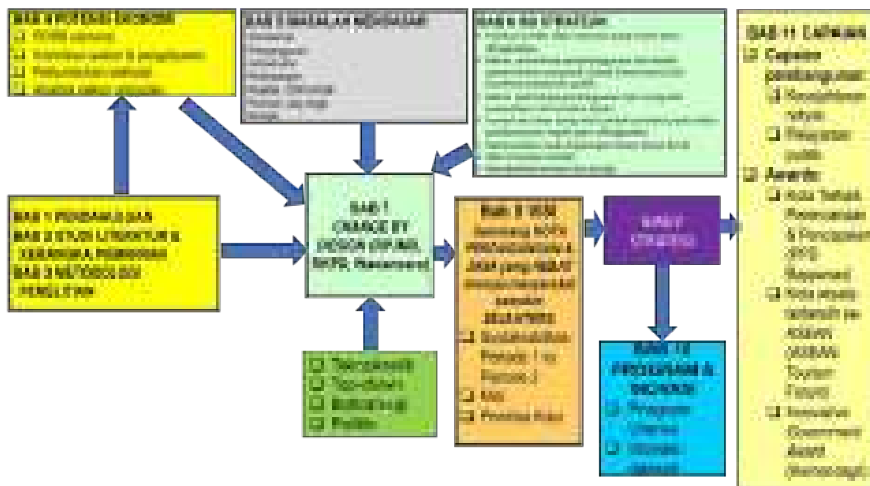
buku, kegunaan penelitian, *outline* buku. Bab 2 akan menelusuri tinjauan pustaka yang relevan bagi penelitian ini. Setidaknya teori aglomerasi kota dan teori *smart city* akan dielaborasi.

Bab 3 akan menjabarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan buku ini. Rancangan penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu ilmu ekonomika regional, geografi, dan strategi. Teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan juga akan dijabarkan.

Bab 4 akan mendeskripsikan bagaimana potensi ekonomi Kota Semarang. Struktur ekonomi Kota Semarang berdasarkan lapangan usaha (sektor) akan dianalisis.

Bab 5 akan mengidentifikasi berbagai masalah mendasar yang dihadapi Kota Semarang sebelum Hendrar Prihadi dipilih rakyat sebagai Wali Kota Semarang. Masalah mendasar tersebut setidaknya adalah tingginya kemiskinan, tingginya pengangguran, buruknya infrastruktur, tingginya ketimpangan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tingginya angka kriminalitas, dan merebaknya korupsi.

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran dan Isi Buku



Bab 6 akan menganalisis berbagai isu strategik sebelum Bapak Hendrar Prihadi mendapat mandat rakyat sebagai Wali Kota Semarang. Isu strategik yang dimaksud setidaknya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar, inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan, kemerosotan mutu lingkungan hidup, banjir dan rob, masih rendahnya iklim investasi.

Bab 7 akan menguraikan penyebab utama perlunya “change by design” dirancang agar berbagai masalah dan isu strategik yang muncul dapat dieliminasi. Perubahan yang direncanakan menggunakan pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, dan politik.

Bab 8 akan menjelaskan visi dan misi Kota Semarang. Perencanaan skenario dibutuhkan (lihat Gambar 2.4). Perubahan visi, misi, dan strategi diperlukan untuk mewujudkan “Semarang Kota Perdagangan & Jasa yang Hebat dan Makin Hebat”.

Gambar 2.4 Ke Mana Arah Perencanaan Kota Semarang?

... PERENCANAAN SKENARIO (Apa yang Kita Inginkan?)



Bab 9 akan menguraikan bagaimana strategi perubahan yang dibutuhkan Kota Semarang agar tetap bertahan dalam menghadapi konsep *new normal* di tengah pandemi virus Covid-19? Pandemi ini membuat segala aktivitas menjadi terbatas sehingga Kota Semarang mau tidak mau harus menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat dan provinsi.

Bab 10 akan menjabarkan program utama dan inovasi pembangunan yang dilakukan oleh Kota Semarang. Apa saja program unggulan yang diterapkan? Mengapa diperlukan inovasi? Inovasi adalah pembaharuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang merupakan gagasan kreatif, orisinal, dan atau adaptasi/modifikasi. Pertama akan dijelaskan latar belakang inovasi dan masalah yang akan dipecahkan melalui pelaksanaan inovasi, keterkaitan inovasi yang dikembangkan dengan tema RKPD, ruang lingkup inovasi, tujuan dan sasaran inovasi, dan kebaruan inovasi yang dikembangkan. Kedua, rencana inovasi akan dipaparkan dengan menjelaskan kerangka kerja dari inovasi dari tahap input, proses, hasil (*output*), dan dampak (*outcome*) inovasi. Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan ringkasan kegiatan yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja. Ketiga, hasil dan dampak inovasi pembangunan Kota Semarang akan dianalisis.

Bab 11 akan menganalisis berbagai capaian pembangunan Kota Semarang. Sejumlah penghargaan yang diperoleh atas hasil pembangunan Kota Semarang juga akan diidentifikasi. Bab ini akan menganalisis berbagai indikator capaian pembangunan yang meliputi:

1. Capaian kesejahteraan rakyat yang mencakup indikator: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan (indeks gini), Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Capaian pelayanan publik yang mencakup indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Keuangan berdasarkan hasil audit BPK, dan Transparansi serta Akuntabilitas berdasarkan evaluasi SAKIP.



Bab 12 adalah bab penutup yang merangkum seluruh gagasan inti, temuan, uraian yang sudah dianalisis dalam bab-bab sebelumnya. Rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan juga akan disajikan.



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN



Bab ini akan menjabarkan rancangan penelitian yang menjadi dasar pijakan untuk menganalisis dan mengkaji pembangunan Kota Semarang. Teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan juga akan diuraikan.

3.1 RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu ilmu ekonomika regional, geografi, dan strategi (lihat Gambar 3.1). “Ekonomika regional” atau sering disebut dengan ilmu ekonomi wilayah, membahas mengenai suatu pelaksanaan kegiatan ekonomi dengan menitikberatkan pada dimensi tata ruang atau spasial (Kuncoro, 2019). Dalam penelitian ini, pendekatan ekonomika regional akan digunakan untuk menganalisis struktur ekonomi, potensi ekonomi, masalah mendasar, serta isu stratejik Kota Semarang.

“Geografi” merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tetapi juga sifat fisik permukaan bumi sekaligus dimensi ruang/wilayah. Geografi juga mempelajari keterkaitan kausal gejala yang ada di permukaan bumi, baik yang tampak secara fisik maupun nonfisik. Dalam penelitian ini, pendekatan geografi diterapkan untuk menganalisis “di mana” (*where*) lokasi penganggur, penduduk miskin, dan kluster Covid-19.

“Strategi” pada intinya merupakan pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan (Andrews, 1971; Kuncoro, 2020). Dalam penelitian ini, pendekatan “strategi” diterapkan untuk menganalisis sektor unggulan, pengembangan wilayah (spasial), dan pembangunan berbasis manusia (*people centered development*).

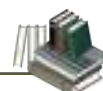
Gambar 3.1 Rancangan Penelitian



3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

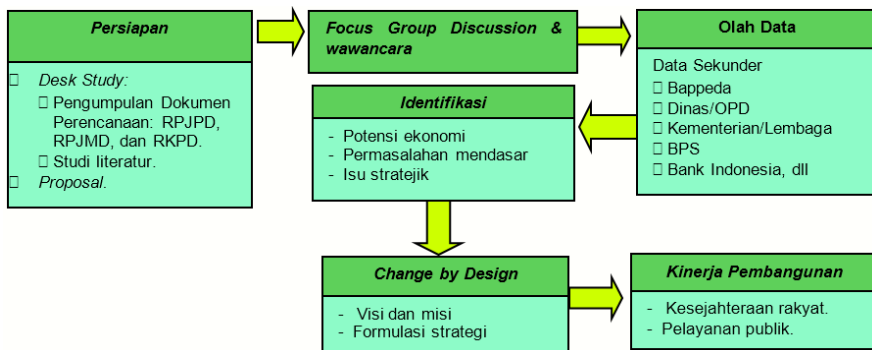
Studi ini menitikberatkan unit analisisnya pada seluruh kecamatan di Kota Semarang. Jenis data yang akan dianalisis adalah data sekunder. Adapun untuk pendekatan penelitiannya, kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis data panel, yang terdiri dari data *cross section* dan *time series* selama sebelas tahun terakhir.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam kajian dan penulisan buku ini dirangkum dalam Gambar 3.2. Alur metode pengumpulan dan analisis data dimulai dari persiapan penyusunan



proposal dan *desk study*, dengan mengumpulkan dokumen perencanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Tahapan analisis selanjutnya adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara khusus dengan wali kota serta penentu kebijakan lainnya. Selanjutnya yang dilakukan adalah tahapan olah data sekunder, menggunakan berbagai data yang didapat dari Bappeda, Dinas/OPD, Kementerian/lembaga, BPS, Bank Indonesia, dll. Selanjutnya adalah tahap identifikasi potensi ekonomi, permasalahan mendasar yang dihadapi, dan isu strategik. Tahap selanjutnya adalah pentingnya “change by design” dengan formulasi visi, misi, dan strategi. Tahapan yang terakhir adalah analisis kinerja pembangunan Kota Semarang dengan berbagai macam indikator capaian pembangunan, pelayanan publik, dan kota cerdas.

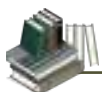
Gambar 3.2 Alur Metode Pengumpulan dan Analisis Data



3.3 METODE ANALISIS

Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode yang lazim digunakan untuk suatu kajian ilmiah, yaitu:

1. *Desk Study* khususnya studi literatur tentang pengembangan kota, aglomerasi, dan *Smart City*.
2. Wawancara dengan tokoh khususnya Wali Kota Semarang dan Kepala Bappeda Kota Semarang.



3. Analisis data makro regional Kota Semarang berdasarkan data sekunder dari BPS, Bank Indonesia, Portal Semarang Satu data, dan Pemda Kota Semarang.
4. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para penyusun perencanaan *Semarang Smart City*.



BAB 4

POTENSI EKONOMI KOTA SEMARANG



Pada bagian ini akan membahas mengenai: (1) PDRB sektoral, (2) kontribusi sektoral, (3) pertumbuhan sektoral, dan (4) analisis sektor unggulan di Kota Semarang yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan revisi dari KBLI Tahun 2005. Dengan demikian, KBLI yang digunakan dalam penyusunan PDRB Kota Semarang tahun dasar 2010 mengacu pada Perka BPS tersebut. Jumlah sektor ekonomi yang disajikan sebanyak 21, tetapi dalam publikasi BPS dijadikan 17 sektor, artinya ada sektor yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kategori.

Periode analisis akan dibagi menjadi empat bagian, yaitu: (1) Periode 2010-2012 adalah periode sebelum Bapak Hendrar Prihadi, atau biasa disapa Pak Hendi, menjadi Wakil Wali Kota Semarang, (2) Periode 2013-2015 adalah periode Pak Hendi menjadi Wali Kota Semarang menggantikan wali kota sebelumnya karena tersandung masalah korupsi, (3) Periode 2016-2019 adalah periode Pak Hendi terpilih melalui PILKADA sebagai Wali Kota Semarang sebelum pandemi Covid-19, dan (4) Periode 2020-2021 adalah periode pascapandemi Covid-19, di mana Pak Hendi sebagai Wali Kota Semarang.

4.1 PDRB SEKTORAL

4.1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB adalah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu (biasanya dalam tahun tertentu), tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya. PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja makro perekonomian daerah yang mampu menggambarkan pendapatan per kapita, struktur ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Meskipun bukan merupakan pengukuran yang sempurna, PDRB merupakan suatu pendekatan yang baik untuk pengukuran kinerja ekonomi suatu daerah.

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi, merupakan penghitungan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai unit produksi dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi yang digunakan secara umum dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) Pengadaan listrik dan gas, (5) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, (8) Transportasi dan pengangkutan, (9) Penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) Informasi dan komunikasi, (11) Jasa keuangan, (12) *Real estate*, (13) Jasa perusahaan, (14) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, (15) Jasa pendidikan, (16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan (17) Jasa lainnya.

Penghitungan PDRB didasarkan pada dua harga, yaitu harga berlaku (*current price*) dan harga dasar/konstan (*constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) adalah jumlah dari barang dan jasa, pendapatan



atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun dasar). Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang dimiliki daerah tersebut.

Nilai PDRB ADHK selama empat periode waktu cenderung meningkat setiap periodenya (lihat Tabel 4.1). Pada periode 2010-2012, nilai PDRB ADHK Kota Semarang rata-rata sebesar Rp86 triliun, naik menjadi Rp103,07 triliun (2013-2015), kemudian menjadi Rp127,57 triliun (2016-2019). Pada masa pandemi Covid-19, PDRB tetap meningkat menjadi Rp141,16 triliun (2020-2021). Hampir seluruh sektor mengalami peningkatan PDRB ADHK, kecuali sektor transportasi-pergudangan dan sektor penyediaan akomodasi-makan minum. Sebelum masa kepemimpinan Pak Hendi sebagai Wali Kota, sektor yang memberikan kontribusi PDRB tertinggi adalah sektor konstruksi, disusul oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar-eceran-reparasi mobil-sepeda motor. Pada saat periode kepemimpinan Bapak Hendrar Prihadi, terjadi pergeseran sektoral, di mana sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan penyumbang PDRB ADHK tertinggi, yang disusul oleh sektor konstruksi, perdagangan besar-eceran-reparasi mobil-sepeda motor, dan informasi-komunikasi. Pada keseluruhan periode, sektor pengadaan air-pengelolaan sampah-limbah-daur ulang menjadi sektor dengan nilai PDRB ADHK terkecil. Sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor yang meningkat lebih dari dua kali lipat sejak periode 2010-2012 sampai dengan periode 2020-2021.



Tabel 4.1

PDRB ADHK 2010 Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2010-2012	2013-2015	2016-2019	2020-2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	890,76	989,64	1.059,59	1.123,86
Pertambangan dan Penggalian	166,56	181,57	161,96	176,64
Industri Pengolahan	21.896,54	27.272,46	32.719,83	36.993,23
Pengadaan Listrik dan Gas	105,24	129,95	157,56	175,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	100,00	102,07	113,17	127,46
Konstruksi	23.316,40	27.001,38	33.083,00	35.256,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.929,63	15.674,26	18.867,50	20.398,17
Transportasi dan Pergudangan	2.905,35	3.705,27	4.716,85	3.304,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.662,80	3.271,66	4.159,82	3.910,08
Informasi dan Komunikasi	7.175,00	9.392,47	13.264,17	18.954,22
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.705,42	4.191,38	5.084,95	5.509,18
<i>Real Estate</i>	2.501,33	3.064,65	3.967,09	4.416,20
Jasa Perusahaan	463,00	600,21	820,48	886,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.072,40	3.290,28	3.853,17	3.966,71
Jasa Pendidikan	1.662,23	2.325,43	3.067,79	3.285,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	541,51	704,24	965,44	1.205,43
Jasa Lainnya	988,88	1.171,73	1.512,20	1.470,06
PDRB	86.083,03	103.068,66	127.572,08	141.160,19

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2021)



4.1.2 PDRB Menurut Pengeluaran

Ukuran kinerja pembangunan ekonomi Kota Semarang salah satunya dapat menggunakan data perangkat ekonomi, seperti PDRB menurut pengeluaran. PDRB dapat juga digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor serta impor, dan sebagainya.

Secara umum, komponen dalam penghitungan PDRB berdasarkan pengeluaran adalah sebagai berikut: (1) Konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (C); (2) Investasi, yakni Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori (I); (3) Konsumsi pemerintah (G); dan (4) Ekspor neto, yakni ekspor dikurangi impor (X-M).

Berdasarkan PDRB ADHK tahun 2010, pada Tabel 4.2, terlihat bahwa pengeluaran terbesar di Kota Semarang adalah PMTB yang meningkat sejak periode 2010-2012 hingga 2020-2021. Selanjutnya, pengeluaran terbesar kedua adalah konsumsi rumah tangga yang juga meningkat secara konsisten sejak periode 2010-2012 hingga 2020-2021. Net ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan terutama pascapandemi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh penurunan impor barang dan jasa yang disebabkan oleh adanya pembatasan perdagangan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.



Tabel 4.2

PDRB ADHK 2010 Kota Semarang Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

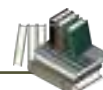
Jenis Pengeluaran	2010-2012	2013-2015	2016-2019	2020-2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	37.992,80	44.224,69	52.705,64	54.992,20
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	539,30	640,45	781,28	893,07
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11.652,38	12.762,32	13.416,72	13.746,83
Pembentukan Modal Tetap Bruto	59.138,83	69.468,57	84.216,57	85.018,12
Perubahan Inventori	2.246,97	1.095,94	352,86	956,93
Net Ekspor Barang dan Jasa	-25.487,20	-25.123,31	-23.901,00	-14.446,95
PDRB	86.083,03	103.068,66	127.572,08	141.160,19

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2021)

4.2 KONTRIBUSI SEKTORAL

4.2.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Tabel 4.3 memperlihatkan gambaran tentang besaran kontribusi lapangan usaha dalam kaitannya dengan PDRB ADHB selama tahun 2010-2021. Sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan besar-eceran-reparasi mobil-sepeda motor merupakan tiga penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Semarang, khususnya pada periode 2020-2021 masing-masing sebesar 28,6%, 26,6%, dan 13,5%. Pada awalnya, sektor konstruksi merupakan sektor dengan penyumbang terbesar dalam PDRB, tetapi pada awal kepemimpinan Pak Hendi sektor industri menjadi sektor dengan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Semarang.



Visi pembangunan Kota Semarang yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 adalah “Menjadikan Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera”. Di dalam RPJMD tersebut, kontribusi sektor perdagangan dan jasa ditargetkan rata-rata sebesar 31,1% pada periode 2016-2019, dan naik menjadi rata-rata sebesar 31,4% pada periode 2020-2021. Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa target tersebut tercapai. Namun demikian, terlihat bahwa sebelum RPJMD 2016-2021 dibuat, kontribusi sektor perdagangan dan jasa sudah melebihi 40%. Ini menandakan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 berada di bawah angka realisasi pada tahun sebelumnya. Selain itu, kontribusi sektor perdagangan dan jasa mengalami penurunan selama periode 2010-2021. Sementara itu, sektor industri pengolahan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dan terus meningkat sepanjang periode tahun 2010-2021.

Rendahnya target kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam RPJMD 2016-2021 Kota Semarang diduga karena adanya perbedaan dalam menentukan sektor apa saja dalam KBLI 2009 yang merupakan sektor jasa. Di dalam RPJMD tidak disebutkan apa saja sektor ekonomi yang masuk ke dalam sektor jasa. Menurut BPS, **sektor perdagangan dan jasa** meliputi sektor perdagangan, angkutan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan sektor jasa lainnya (Muktiali & Sukmawati, 2016).



Tabel 4.3

Distribusi PDRB ADHB Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	2010-2012	2013-2015	2016-2019	2020-2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,03	1,01	0,87	0,85
Pertambangan dan Penggalian	0,19	0,19	0,18	0,19
Industri Pengolahan	26,21	27,37	27,53	28,64
Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,10	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,11	0,09	0,08	0,08
Konstruksi	26,99	26,85	26,75	26,58
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,85	14,48	13,77	13,49
Transportasi dan Pergudangan	3,31	3,67	3,86	2,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,12	3,38	3,41	2,78
Informasi dan Komunikasi	7,91	7,21	7,46	9,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	4,39	4,38	4,28
<i>Real Estate</i>	2,80	2,73	2,84	2,82
Jasa Perusahaan	0,54	0,60	0,69	0,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,57	3,37	3,19	2,95
Jasa Pendidikan	2,09	2,72	2,88	2,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	0,74	0,83	0,94
Jasa Lainnya	1,13	1,10	1,18	1,03
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri Pengolahan (RPJMD 2016-2021)	-	-	27,02	27,52
Perdagangan dan Jasa	45,35	44,39	44,49	43,61
Perdagangan & Jasa (RPJMD 2016-2021)	-	-	31,12	31,38

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2021) dan RPJMD Kota Semarang 2016-2021



4.2.2 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Berdasarkan pangasanya, PMTB memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB ADHB Kota Semarang dan memiliki kecenderungan yang meningkat sebelum pandemi Covid-19. Namun, pascapandemi Covid-19, kontribusinya menurun menjadi 65,7%. Pengeluaran terbesar kedua adalah konsumsi rumah tangga, tetapi kontribusinya memiliki kecenderungan yang menurun hingga menjadi 41,52% pascapandemi Covid-19. Neraca perdagangan menunjukkan perbaikan selama periode 2010-2021. Pengeluaran konsumsi pemerintah menunjukkan kecenderungan yang menurun terutama pascapandemi Covid-19 (lihat Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Distribusi PDRB Kota Semarang Menurut Pengeluaran (Persen)

Jenis Pengeluaran	2010-2012	2013-2015	2016-2019	2020-2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	44,30	44,68	43,52	41,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,62	0,68	0,72	0,76
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,91	14,00	13,26	12,09
Pembentukan Modal Tetap Bruto	69,65	70,91	71,27	65,70
Perubahan Inventori	2,82	2,00	0,58	0,47
Net Ekspor Barang dan Jasa	(31,30)	(32,27)	(29,34)	(20,52)
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2021)



4.3 PERTUMBUHAN SEKTORAL

4.3.1 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan (Kuncoro, 2019). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mengalami peningkatan khususnya sebelum pandemi Covid-19. Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa sebelum pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Semarang rata-rata mencapai 6,47% untuk periode 2016-2019. Capaian ini merupakan suatu prestasi karena telah mampu melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 Kota Semarang, yaitu rata-rata sebesar 5,91%. Pada saat terjadi pandemi Covid-19 terjadi resesi ekonomi dunia menyebabkan target yang ditetapkan pada periode tahun 2020-2021 tidak tercapai. Namun, dalam periode tahun 2020-2021, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang bernilai positif. Ini menandakan terjadi percepatan pemulihan ekonomi dalam rentang waktu tersebut.



Tabel 4.5

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	2010-2012	2013-2015	2016-2019	2020-2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,70	1,54	2,37
Pertambangan dan Penggalian	3,76	2,05	-1,54	2,96
Industri Pengolahan	8,78	6,65	5,77	2,79
Pengadaan Listrik dan Gas	8,35	5,68	6,19	1,49
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-0,23	1,66	3,76	4,30
Konstruksi	4,39	5,17	5,98	0,99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,02	4,36	5,81	1,39
Transportasi dan Pergudangan	6,37	8,42	7,86	-16,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,74	6,74	6,88	-4,84
Informasi dan Komunikasi	9,05	9,75	10,67	11,76
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	5,31	4,81	1,82
<i>Real Estate</i>	5,81	7,72	7,09	1,84
Jasa Perusahaan	8,16	9,28	9,73	-2,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,79	3,18	4,55	-1,86
Jasa Pendidikan	18,06	8,87	7,66	-1,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,57	8,28	9,06	6,68
Jasa Lainnya	1,87	7,04	8,76	-7,05
PDRB	6,28	6,13	6,47	1,66
LPE (RPJMD 2016-2021)	-	-	5,91	6,42

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2021) dan RPJMD Kota Semarang 2016-2021



Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan tertinggi dan terus meningkat setiap tahunnya adalah sektor informasi dan komunikasi, baik sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Sektor ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 6,68%. Sektor jasa pendidikan merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada periode 2010-2012, tetapi pertumbuhannya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020-2021, sektor pendidikan mengalami pertumbuhan negatif. Sektor ekonomi yang paling terkena dampak negatif pandemi Covid-19 adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan negatif sebesar 16,32%, disusul oleh sektor jasa lainnya (7,05%) serta sektor penyedia akomodasi dan makan minum (4,84%). Sektor industri dan sektor perdagangan tetap mengalami pertumbuhan positif pada periode tahun 2020-2021.

4.3.2 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Berdasarkan PDRB AHDK pengeluaran, sebelum pandemi Covid-19 (2016-2019), pertumbuhan ekonomi Kota Semarang lebih didorong oleh pengeluaran konsumsi Lembaga *Non-Profit* Melayani Rumah Tangga (LNPRM) (8,53%), yang diikuti oleh pertumbuhan komponen PMTB sebesar 5,61%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menempati urutan ketiga dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36%. Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan terlambat, yaitu sebesar 2,29%. Pascapandemi Covid-19, seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan negatif kecuali pengeluaran konsumsi LNPRM yang tetap tumbuh positif sebesar 1,05% (lihat Tabel 4.6).



Tabel 4.6

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Jenis Pengeluaran	2011-2012	2013-2015	2016-2019	2020-2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,63	4,87	5,36	-1,05
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,23	4,62	8,53	1,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,51	3,09	2,29	-1,36
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,32	4,91	5,61	-1,30
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
PDRB	6,28	6,13	6,47	1,66

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2021)

4.4 ANALISIS SEKTOR UNGGULAN

4.4.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Sektor unggulan di Kota Semarang dapat diketahui menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ). LQ merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor tertentu. Teknik LQ ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang dikaji dengan kemampuan yang sama pada daerah yang lebih luas. Analisis LQ dimaksudkan untuk melihat sektor yang menjadi sektor basis dan sektor bukan basis sehingga daerah dapat melihat keunggulan sektor yang dapat dikembangkan untuk mendorong perekonomian di daerah tersebut (Kuncoro *et al.*, 2021). Dari penghitungan LQ periode 2010-2021 untuk masing-masing sektor ekonomi di Kota Semarang diperoleh sektor unggulan yang ditunjukkan dengan nilai lebih dari satu (lihat Tabel 4.7).



Tabel 4.7Hasil Estimasi *Location Quotient* (LQ) Menurut Sektor Ekonomi Kota Semarang

Lapangan Usaha	2010-2012	2013-2015	2016-2019	2020-2021
Konstruksi	2,665	2,602	2,502	2,379
Informasi dan Komunikasi	2,415	2,333	2,215	2,177
Jasa Perusahaan	1,822	1,759	1,697	1,640
<i>Real Estate</i>	1,688	1,649	1,650	1,622
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,578	1,531	1,458	1,401
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,390	1,343	1,271	1,224
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,164	1,143	1,166	1,121
Pengadaan Listrik dan Gas	1,164	1,129	1,130	1,072
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,092	1,052	1,021	0,990
Transportasi dan Pergudangan	1,128	1,110	1,088	0,959
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,915	0,895	0,886	0,885
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,025	1,037	1,006	0,858
Industri Pengolahan	0,734	0,750	0,745	0,781
Jasa Lainnya	0,761	0,742	0,711	0,638
Jasa Pendidikan	0,651	0,636	0,629	0,586
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,066	0,067	0,064	0,062
Pertambangan dan Pengalihan	0,095	0,087	0,057	0,056

Keterangan: Kotak yang diberi warna kuning adalah sektor basis ($LQ \geq 1$).

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang dan BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)



Dari hasil estimasi terlihat bahwa sebelum pandemi Covid-19 Kota Semarang memiliki sebelas sektor basis dengan nilai di atas 1, yaitu sektor konstruksi; informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; *real estate*; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan air; pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; pengadaan listrik-gas; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Hasil ini tidak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muktiali & Sukmawati (2016). Setelah terjadi pandemi Covid-19, tiga sektor yang tadinya sektor basis menjadi sektor nonbasis, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Hasil analisis mengindikasikan bahwa ketiga sektor tersebut sensitif terhadap pandemi Covid-19, yang mengakibatkan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih unggul dibandingkan Kota Semarang.

4.4.2 Analisis Tipologi Klassen (TK)

Perhitungan tipologi Klassen didasarkan pada dua hal, yaitu distribusi *output* sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan total produk domestik bruto dan pertumbuhan dari masing-masing sektor. Dari perhitungan distribusi dan pertumbuhan tersebut sektor dapat diklasifikasikan menjadi (1) Prima (P); (2) Berkembang (B); (3) Potensial (PO); dan (4) Relatif Terbelakang (RT) (Agusalim, 2022).

Sektor yang masuk dalam kategori prima perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Artinya, Kota Semarang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan sektor tersebut, tetapi jika suatu sektor masuk dalam kelompok relatif terbelakang tentu pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sektor tersebut dengan menganalisis berbagai faktor yang tersedia. Dari hasil perhitungan nilai TK untuk tiap-tiap sektor ekonomi di Kota Semarang, diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8.



Tabel 4.8

Hasil Pemetaan Tipologi Klassen (TK) Menurut Sektor Ekonomi Kota Semarang

Lapangan Usaha	2010-2012	2013-2015	2016-2019	2020-2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	RT	RT	RT	B
Pertambangan dan Penggalian	RT	RT	RT	B
Industri Pengolahan	P	P	PO	P
Pengadaan Listrik dan Gas	B	RT	RT	B
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	RT	RT	RT	B
Konstruksi	PO	PO	PO	P
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	PO	PO	PO	P
Transportasi dan Pergudangan	B	B	B	RT
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	B	B	B	RT
Informasi dan Komunikasi	P	P	P	P
Jasa Keuangan dan Asuransi	RT	RT	RT	B
<i>Real Estate</i>	RT	B	B	B
Jasa Perusahaan	B	B	B	RT
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	RT	RT	RT	RT
Jasa Pendidikan	B	B	B	RT
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	B	B	B	B
Jasa Lainnya	RT	B	B	RT

Keterangan: P=Prima/Unggulan, B=Berkembang, PO=Potensial, dan RT=Relatif Tertinggal

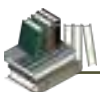
Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2021)

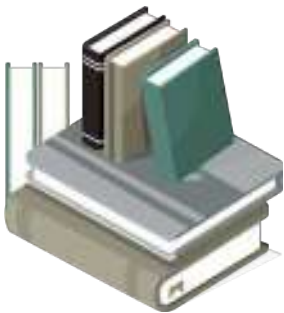


Hasil estimasi menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori prima, yaitu sektor informasi dan komunikasi untuk periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Sektor ini memiliki kontribusi dan laju pertumbuhan melebihi rata-rata kontribusi serta pertumbuhan sektoral di Kota Semarang. Sektor industri pengolahan juga masuk sebagai sektor ekonomi kategori prima, kecuali pada periode tahun 2016-2019 masuk dalam kategori sektor potensial, yaitu sektor yang memiliki kontribusi tinggi, tetapi pertumbuhan sektoralnya di bawah rata-rata. Sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar serta eceran menunjukkan kemajuan yang luar biasa karena yang semulanya merupakan sektor ekonomi kategori potensial berubah menjadi kategori prima pascapandemi Covid-19.

Sebagai kota yang memiliki visi sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Semarang masih perlu membenahi serta mengembangkan sektor jasa karena beberapa sektor jasa masuk dalam kategori relatif tertinggal, seperti sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta sektor jasa lainnya. Sektor jasa yang mulai berkembang adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan hasil analisis LQ dan TK, dapat disimpulkan bahwa Visi RPJMD Kota Semarang 2016-2021 sebagai kota perdagangan serta jasa masih cukup relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang merupakan sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian Kota Semarang. Namun demikian, sektor industri dan konstruksi tampaknya memainkan peranan yang cukup besar dalam pembangunan Kota Semarang.





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

BAB 5

MASALAH MENDASAR KOTA SEMARANG



Bab ini akan membahas masalah mendasar yang dihadapi oleh Kota Semarang khususnya sebelum Bapak Hendrar Prihadi dipilih rakyat sebagai Wali Kota Semarang. Masalah mendasar tersebut terdiri atas kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kualitas sumber daya manusia (SDM), ketimpangan pendapatan, kualitas infrastruktur, kriminalitas, dan korupsi.

5.1 KEMISKINAN

Dalam menentukan penduduk kategori miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan nonmakanan berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. **Tingkat kemiskinan** dihitung dari berdasarkan *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) (BPS, 2022; Kuncoro, 2013).

Masalah mendasar yang dihadapi sebagai Wakil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama Wali Kota Soemarmo H.S. tahun 2010 adalah tingginya tingkat kemiskinan Kota Semarang. Tabel 5.1 menunjukkan tingkat kemiskinan Kota Semarang berkisar antara 6,64% hingga 33,19% selama tahun 2005-2009. Tingkat kemiskinan dihitung dari rasio antara penduduk miskin dengan jumlah penduduk. Rasio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk kota Semarang semakin meningkat selama empat tahun terakhir (2005-2008): tahun 2005 sebesar 6,64%, tahun 2006 sebesar 17,19%, tahun 2007 sebesar 21,08%, tahun 2008 sebanyak 33,19%, tetapi tahun 2009 menurun menjadi sebesar 26,41%.

Tabel 5.1 Tingkat Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2005-2009 (%)

Uraian	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Penduduk Miskin	94.246	246.448	306.700	491.747	3 98.009
Jumlah Penduduk	1.419.478	1.434.025	1.454.594	1.481.640	1.506.924
Rasio	6,64%	17,19%	21,08%	33,19%	26,41%

Sumber: Diolah dari Bappeda Kota Semarang (2010)

Pasca dipimpin Pak Hendi (panggilan akrab Hendrar Prihadi) dan Soemarmo, tingkat kemiskinan di Kota Semarang berangsur menurun dari 5,68% tahun 2011 menjadi 5,25% tahun 2013. Pak Hendi dilantik menjadi Wali Kota Semarang pada 21 Oktober 2013 menggantikan Wali Kota Soemarmo yang tersandung masalah korupsi. Dari tahun 2013 hingga 2015, tingkat kemiskinan secara berangsur mampu diturunkan hingga 4,97% tahun 2015 (lihat Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Tingkat Kemiskinan di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2016 (%)

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Semarang	5,68	5,13	5,25	5,04	4,97	4,85
Provinsi Jateng	28,57	14,98	14,44	13,58	13,32	13,19

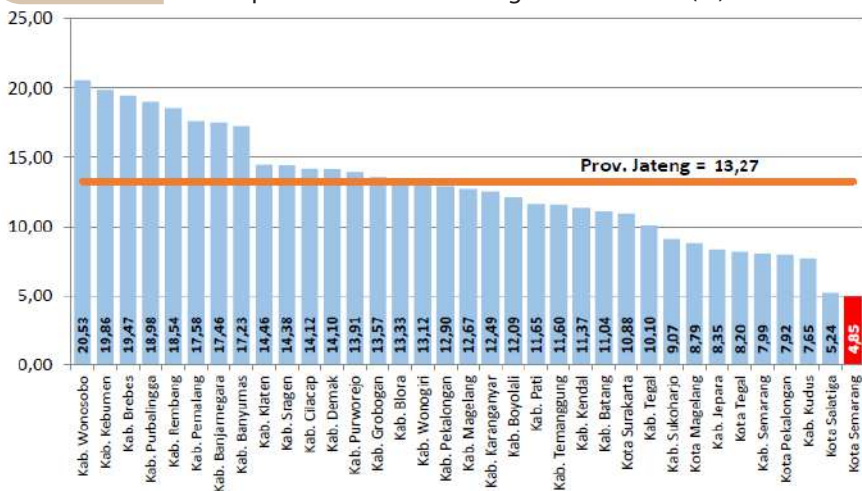
Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang dan BPS Provinsi Jawa Tengah (2022)



Tingkat kemiskinan Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 4,85% lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan seluruh kabupaten dan kota Jawa Tengah yang sebesar 13,27% (lihat Gambar 5.1). Bahkan, tingkat kemiskinan di Kota Semarang merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, walaupun dilihat dari jumlah penduduk Kota Semarang lebih besar. Semenjak Indonesia masuk era pandemi tingkat kemiskinan Kota Semarang sedikit meningkat dari 3,98% tahun 2019 menjadi 4,34% tahun 2020 dan 4,56% tahun 2021. Perlu dicatat tingkat kemiskinan Kota Semarang masih di bawah nasional, Jawa Tengah, maupun kota-kota lainnya selama tahun 2014-2020 (lihat Gambar 5.1).

Tingkat kemiskinan Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 4,85% yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 13,27%. Bahkan, tingkat kemiskinan di Kota Semarang merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, walaupun dilihat dari jumlah penduduk Kota Semarang lebih besar. Untuk lebih jelasnya posisi relatif tingkat kemiskinan Kota Semarang dibanding kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Gambar 5.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Semarang Dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016 (%)



Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2017)

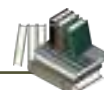


Tabel 5.3

Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Cilacap	15,92	15,24	14,21	14,39	14,12
Kabupaten Banyumas	19,44	18,44	17,45	17,52	17,23
Kabupaten Purbalingga	21,19	20,53	19,75	19,70	18,98
Kabupaten Banjarnegara	18,87	18,71	17,77	18,37	17,46
Kabupaten Kebumen	22,40	21,32	20,50	20,44	19,86
Kabupaten Purworejo	16,32	15,44	14,41	14,27	13,91
Kabupaten Wonosobo	22,50	22,08	21,42	21,45	20,53
Kabupaten Magelang	13,97	13,96	12,98	13,07	12,67
Kabupaten Boyolali	13,88	13,27	12,36	12,45	12,09
Kabupaten Klaten	16,71	15,60	14,56	14,89	14,46
Kabupaten Sukoharjo	10,15	9,87	9,18	9,26	9,07
Kabupaten Wonogiri	14,67	14,02	13,09	12,98	13,12
Kabupaten Karanganyar	14,07	13,58	12,62	12,46	12,49
Kabupaten Sragen	16,72	15,93	14,87	14,86	14,38
Kabupaten Grobogan	16,13	14,87	13,86	13,68	13,57
Kabupaten Blora	15,10	14,64	13,66	13,52	13,33
Kabupaten Rembang	21,88	20,97	19,50	19,28	18,54
Kabupaten Pati	13,61	12,94	12,06	11,95	11,65
Kabupaten Kudus	8,63	8,62	7,99	7,73	7,65
Kabupaten Jepara	9,38	9,23	8,55	8,50	8,35
Kabupaten Demak	16,73	15,72	14,60	14,44	14,10
Kabupaten Semarang	9,40	8,51	8,05	8,15	7,99
Kabupaten Temanggung	12,32	12,42	11,55	11,76	11,60
Kabupaten Kendal	13,17	12,68	11,80	11,62	11,37
Kabupaten Batang	12,40	11,96	11,13	11,27	11,04
Kabupaten Pekalongan	13,85	13,51	12,57	12,84	12,90
Kabupaten Pemalang	19,27	19,27	18,44	18,30	17,58
Kabupaten Tegal	10,75	10,58	9,87	10,09	10,10
Kabupaten Brebes	21,12	20,82	20,00	19,79	19,47
Kota Magelang	10,31	9,80	9,14	9,05	8,79
Kota Surakarta	12,00	11,74	10,95	10,89	10,88
Kota Salatiga	7,11	6,40	5,93	5,80	5,24
Kota Semarang	5,13	5,25	5,04	4,97	4,85
Kota Pekalongan	9,47	8,26	8,02	8,09	7,92
Kota Tegal	10,04	8,84	8,54	8,26	8,20
Provinsi Jawa Tengah	14,98	14,44	13,58	13,32	13,27

Sumber: Diolah dari BPS Jawa Tengah (2022)



5.2 PENGANGGURAN

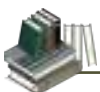
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat TPT, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPT di suatu wilayah mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Semarang indeks TPT dari tahun 2010-2016 mengalami tren penurunan dari 8,98% tahun 2010 menjadi 6,02% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 meningkat mencapai 7,76%, kemudian berangsur turun menjadi 5,77% pada tahun 2015 dan 6,61% tahun 2016 (lihat Tabel 5.4).

Tabel 5.4 TPT Kota Semarang dan Jateng Tahun 2010–2016 (%)

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Semarang	8,98	7,65	6,01	6,02	7,76	5,77	6,61
Jateng	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,63

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2022)

Perlu dicatat, Kota Semarang merupakan kota dengan TPT terendah di Jawa Tengah pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,01%. Akan tetapi, pada tahun 2015, Kota Semarang menempati posisi ketiga terendah dari seluruh kota yang ada di Jawa Tengah, yaitu sebesar 5,77% (lihat Tabel 5.5). TPT Kota Semarang terlihat selalu lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2010-2016 (lihat Tabel 5.4).



Tabel 5.5

Perkembangan TPT Menurut Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 2012–2015 (%)

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	7,29	6,68	5,65	8,01
Kabupaten Banyumas	5,11	5,45	5,37	6,37
Kabupaten Purbalingga	5,02	5,63	5,13	4,84
Kabupaten Banjarnegara	3,69	4,16	4,06	5,05
Kabupaten Kebumen	3,58	3,52	3,25	4,14
Kabupaten Purworejo	3,20	5,15	5,10	4,01
Kabupaten Wonosobo	5,21	5,82	5,34	4,47
Kabupaten Magelang	4,38	6,13	7,45	5,16
Kabupaten Boyolali	4,43	5,44	4,95	2,03
Kabupaten Klaten	3,70	5,34	4,75	2,51
Kabupaten Sukoharjo	6,10	5,98	4,60	4,52
Kabupaten Wonogiri	3,46	3,61	3,45	3,07
Kabupaten Karanganyar	5,82	3,84	3,54	3,60
Kabupaten Sragen	5,88	5,63	6,04	4,51
Kabupaten Grobogan	4,20	6,10	4,25	5,22
Kabupaten Blora	4,75	6,23	4,30	4,68
Kabupaten Rembang	5,75	5,97	5,23	4,51
Kabupaten Pati	11,98	7,29	6,37	4,43
Kabupaten Kudus	5,89	8,07	5,03	5,04
Kabupaten Jepara	4,29	6,34	5,09	3,12
Kabupaten Demak	8,40	7,08	5,17	6,02
Kabupaten Semarang	4,87	3,90	4,38	2,57
Kabupaten Temanggung	3,39	4,87	3,19	1,50
Kabupaten Kendal	6,31	6,43	6,15	7,07
Kabupaten Batang	5,88	7,02	7,42	4,56
Kabupaten Pekalongan	5,08	4,78	6,03	5,10
Kabupaten Pemalang	4,85	6,48	7,44	6,53
Kabupaten Tegal	6,12	6,89	8,47	9,52
Kabupaten Brebes	8,22	9,61	9,53	6,49
Kota Magelang	8,99	6,75	7,38	6,43
Kota Surakarta	6,29	7,22	6,16	4,53
Kota Salatiga	6,84	6,21	4,46	6,43
Kota Semarang	6,01	6,02	7,76	5,77
Kota Pekalongan	7,67	5,28	5,42	4,10
Kota Tegal	8,75	9,32	9,20	8,06
Provinsi Jawa Tengah	5,61	6,01	5,68	4,99

Sumber: Diolah dari BPS Jawa Tengah (2022)



5.3 KUALITAS SDM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia di masing-masing daerah. Ukuran pencapaian keberhasilan suatu daerah dilihat melalui tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan, dan (3) standar hidup layak (Kuncoro, 2006). Indikator yang mewakili ketiga dimensi tersebut, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup, Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur status tingkat pendidikan, serta pengeluaran riil per kapita disesuaikan untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

Secara umum, dalam enam tahun terakhir yaitu, 2010-2016, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Pada Tabel 5.6, terlihat bahwa pada tahun 2010, capaian IPM Kota Semarang adalah sebesar 76,96 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,19 pada tahun 2016. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 4,23 selama periode tersebut. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2016, capaian IPM Kota Semarang yang sebesar 81,19 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 69,98 dengan selisih capaian sebesar 11,21. Daerah dengan IPM yang tinggi dalam jangka panjang akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Agusalim *et al.*, 2022).

Tabel 5.6 IPM Kota Semarang Tahun 2012–2016

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Semarang	76,96	77,58	78,04	78,68	79,24	80,23	81,19
Jateng	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2022)



Indikator pembentuk IPM Kota Semarang, meliputi Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2010-2016. Pencapaian indikator pembentuk IPM, baik usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga sudah berada di atas pencapaian indikator pembentuk IPM Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2014, terdapat metode baru untuk menghitung IPM dan indikator kompositnya. Capaian indikator komposit IPM Kota Semarang pada tahun 2016, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Semarang sebesar 77,21, kemudian indikator komposit Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) sebesar 10,49 tahun, Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) sebesar 14,70 tahun, dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang didekati dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP) yang sebesar Rp13,91 juta. Perkembangan indikator pembentuk IPM Kota Semarang tahun 2014–2016 dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2014-2016

Tahun	AHH	HLS	RLS	PPP-Ribu Rupiah
2014	77,18	13,97	10,19	12.802,48
2015	77,20	14,33	10,20	13.589,00
2016	77,21	14,70	10,49	13.909,00

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2021)

5.4 KETIMPANGAN PENDAPATAN

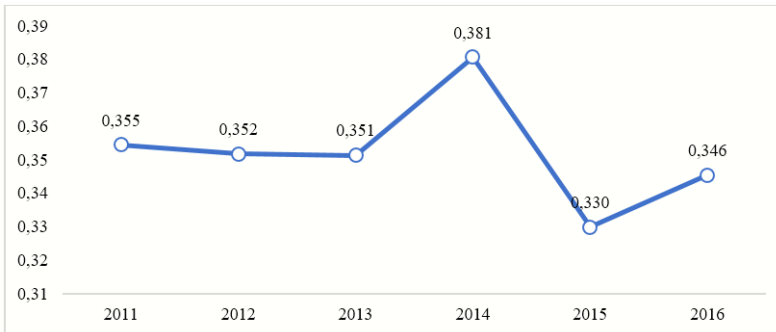
Indeks atau koefisien Gini adalah salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1 (Kuncoro, 2010). Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata, yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai



1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna, yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa (Agusalim, 2016).

Perkembangan indeks Gini Kota Semarang selama enam tahun terakhir menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam kondisi sedang. Pada tahun 2013 indeks Gini sebesar 0,351, sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi 0,381 dan menurun tajam hingga 0,330 di tahun 2015, sedangkan kondisi tahun 2016 adalah sebesar 0,346. Kondisi indeks Gini Kota Semarang dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.2, yang menunjukkan adanya tren penurunan ketimpangan pendapatan.

Gambar 5.2 Indeks Gini Kota Semarang Tahun 2011-2016



Sumber: BPS Kota Semarang (2017)

5.5 INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG

Sektor pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.



Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antarwilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk serta mempercepat



Salah satu jalan yang penuh lubang di Kota Semarang (Solopos, 26/2/2018).

laju pertumbuhan ekonomi sehingga wilayah Kota Semarang akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan infrastruktur kota menjadi permasalahan di Kota Semarang.

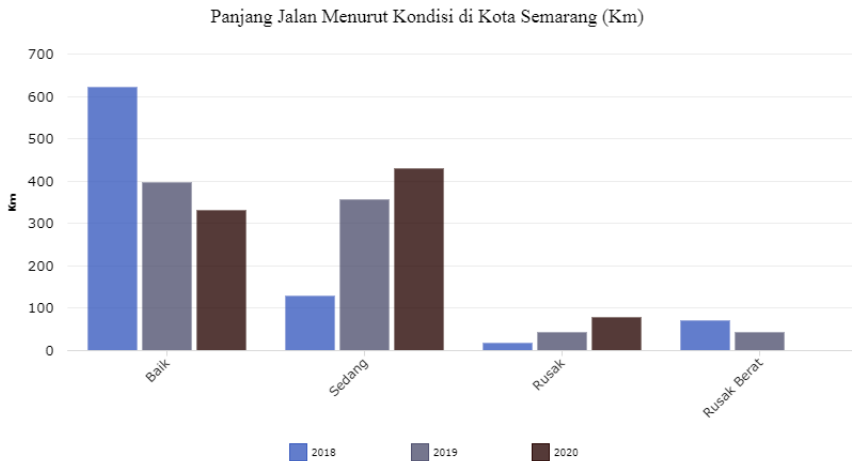
Kota Semarang, selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan koridor jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah timur (Surabaya) dan selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya. Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah dan DIY. Namun, masalahnya, banyak jalan di Kota Semarang dilaporkan rusak. Kerusakan jalan di Jl. Yos Sudarso, Bandarharjo, dan jalan-jalan lain di Kota Semarang, telah diberitakan oleh Kantor Berita Antara dan media lainnya (Tribun, 19/1/2014; Solopos, 26/2/2018). Rusaknya jalan di sejumlah titik jalur pantai utara (pantura) Jateng tersebut disebabkan genangan air setelah hujan dengan intensitas relatif tinggi dalam sebulan terakhir. Kondisi jalan yang penuh lubang besar tersebut memicu antrean panjang kendaraan bermotor.

Gambar 5.3 menunjukkan data jalan yang rusak berat dan baik berkurang, sedangkan jenis jalan yang rusak dan rusak sedang cenderung meningkat selama 2018-2020. Total jalan dengan kondisi



baik pada 2020 sepanjang 331,4 km, berkurang 65,4 km (16,5%) dibanding tahun sebelumnya yang sepanjang 396,8 km, yang pada gilirannya mengakibatkan jalan berkondisi rusak sedang dan rusak semakin bertambah di Kota Semarang (Katadata, 2021). Jalan berkondisi sedang sepanjang 430,25 km pada tahun 2020, bertambah 74,1 km (20,8%) dibanding tahun sebelumnya 356,15 km, sedangkan jalan dengan kondisi rusak tercatat sepanjang 78,24 km pada tahun 2020, bertambah 34,07 km (77,14%) dari tahun sebelumnya sepanjang 44,17 km. Adapun pada tahun 2020, sudah tidak ada kondisi jalan yang termasuk kategori rusak berat di Kota Semarang.

Gambar 5.3 Kondisi Jalan Rusak di Kota Semarang Tahun 2018-2020



Sumber: Diolah oleh Katadata (2021) dari data BPS

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antardaerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang ditopang oleh: Pertama, peningkatan kualitas **Bandar Udara Internasional Ahmad Yani** yang melayani penumpang domestik antarpulau juga melayani penumpang internasional. Kedua, peningkatan kualitas **Pelabuhan Tanjung Emas** yang merupakan



pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antarprovinsi, melayani angkutan barang dengan adanya Terminal Peti Kemas untuk bongkar muat barang, baik nasional maupun internasional. Ketiga, peningkatan kualitas **Terminal Bus** untuk melayani angkutan bus di dalam kota, antarkota, bahkan antarprovinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan, yaitu: Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu. Terminal penumpang Tipe B di Kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan di Penggaron Kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C, yaitu di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen, di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan Tembalang. Keempat, peningkatan kualitas dua stasiun kereta api di Kota Semarang: untuk pelayanan angkutan kelas eksekutif dan bisnis pelayanan diutamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi serta bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.

Masalah lain yang menonjol adalah semakin **meningkatnya jumlah pelanggan air minum yang belum diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanan air minum**. Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota Semarang terbagi ke dalam dua sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem nonperpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Hingga tahun 2010, pelayanan dan pengelolaan sistem jaringan perpipaan di Kota Semarang dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan 15 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang (Pemerintah Kota Semarang, 2011).

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan **tata ruang wilayah**. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan perdagangan serta jasa. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan



pembangunan Kota Semarang terdapat kompensasi tak bisa dihindari dalam tata guna lahan, yaitu **tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan**. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru, seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran kota. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

Gunungpati merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang dengan banyak lahan pertanian yang berisi lahan basah/sawah hingga tegalan, tetapi dengan berkembangnya kota, banyak lahan pertanian yang dikonversikan menjadi lahan nonpertanian, seperti permukiman, perumahan. Konflik alih fungsi lahan ini mengalami perubahan yang sangat signifikan dari sepuluh tahun terakhir terjadi perubahan fungsi lahan pada tahun 2001 ke tahun 2006 dan 2010 semakin banyak pembangunan pada permukiman di daerah sekitar kampus UNNES tepatnya di Kelurahan Sekaran. Kecamatan Gunungpati ini merupakan daerah yang progresif yang sangat strategis, yaitu dekat dengan area pengembangan, dekat dengan pusat kota, dan kawasan pendidikan. Perubahan yang terjadi akibat alih fungsi lahan ini sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak alih fungsi lahan ini, dahulu banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sekarang banyak petani yang mengalami penurunan pendapatan karena kehilangan lahan sawahnya, hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki serta keahlian para petani terbatas sehingga mereka belum mampu mengakses pekerjaan formal (Sari & Yuliani, 2021).

Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kota Semarang adalah **pembangunan pemukiman**. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0-100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh kabupaten/kota pada tahun 2019. Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi



Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang telah diputuskan sebesar 415,83 *ha* atau 4,16 km² atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang pada tahun 2014. Kota Semarang, sebagai kota yang maju memiliki persentase rumah tangga kumuh yang nilainya lebih besar dibandingkan kabupaten di sekitarnya. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang untuk memperhatikan rumah tangga kumuh sehingga target nasional tercapai 0% kawasan kumuh di Semarang. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Pak Hendi, pemugaran rumah tidak layak meningkat dari 204 unit tahun 2011 menjadi 1.598 unit tahun 2016, demikian juga persentase rumah layak huni meningkat sejak tahun 2014, sedangkan luas lingkungan pemukiman kumuh makin berkurang tiap tahun (lihat Tabel 5.8).

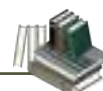
Tabel 5.8 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100	100
2	Luas Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,63	0,60	0,56	1,11	0,99	0,79
3	Persentase rumah layak huni (%)	80,25	80,25	80,9	81,05	91,69	90,94
4	Pemugaran rumah tidak layak huni (unit)	204	408	610	1.186	1.598	1.598
6	Persentase permukiman layak huni	99,40	99,44	99,16	99,26	99,45	99,21
7	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	10,32	35,92	35,80	35,68	34,35	37,85

Sumber: Wali Kota Semarang (2017)

5.6 KRIMINALITAS

Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif, seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selama enam tahun dari tahun 2011-2016, jumlah tindak pidana menonjol (*crime index*) menurut jenis dapat dilihat pada Tabel 5.9.



Selama tahun 2016, jumlah kasus tindak pidana di Kota Semarang yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang adalah sejumlah 2.085 kejadian, menurun jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2015 yang sebanyak 2.792 kejadian. Dari jumlah kejadian tindak pidana tersebut, yang paling menonjol di tahun 2016 adalah kejadian curanmor yang sebanyak 152 kejadian dan penganiayaan berat sebanyak 47 kejadian. Meskipun secara statistik total jumlah kriminalitas menurun, tetapi secara rata-rata lima tahun terakhir masih cukup tinggi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan masih rendah/belum optimal.

Tabel 5.9 Jumlah Tindak Pidana Menonjol (*Crime Index*) Menurut Jenis di Kota Semarang Tahun 2011–2016

Jenis Tindak Pidana	Jumlah di Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pencurian dengan pemberatan	539	521	419	441	476	7
2. Pencurian kendaraan bermotor	884	768	566	633	667	152
3. Pencurian dengan kekerasan	58	92	82	88	206	17
4. Penganiayaan berat	171	206	200	203	42	47
5. Pembunuhan	7	14	2	10	6	0
6. Perkosaan	5	3	3	3	215	0
7. Uang palsu	2	2	3	1	1	3
8. Narkotika	40	63	61	79	463	0
9. Perjudian	81	92	88	42	110	0
10. Pemerasan/ancaman	94	150	116	N/A	N/A	9
11. Lainnya	14	11	13	2.005	606	1850
Jumlah	1.895	1.922	1.553	3.505	2.792	2.085

Sumber: Badan Kesatuan bangsa & Politik Kota Semarang (2017)



Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya, yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, serta *participation*. Apabila keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang yang belum optimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

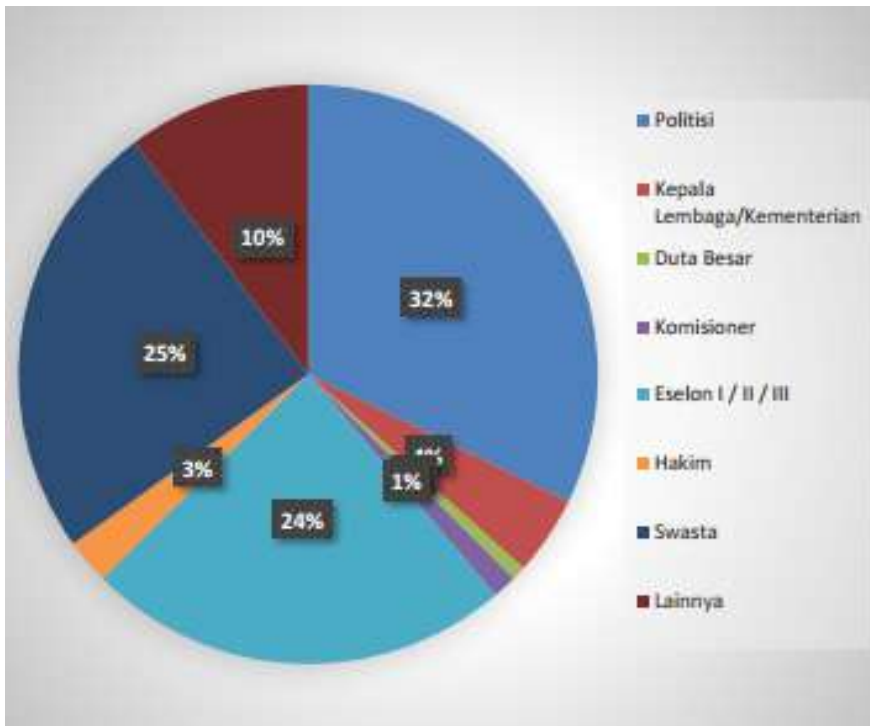
Gejala merebaknya praktik korupsi di Kota Semarang perlu memperoleh perhatian serius. Puncak dari semakin mengguritanya praktik korupsi di Kota Semarang adalah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Semarang Soemarmo H.S. sebagai tersangka kasus suap kepada anggota DPRD Kota Semarang dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2011-2012. Soemarmo dinyatakan telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang tunai senilai Rp304 juta dan Rp40 juta kepada anggota DPRD Semarang, khususnya kepada anggota DPRD Semarang Agung Purno Sarjono dan Sumartono. Pemberian uang bertujuan supaya DPRD Semarang mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai APBD Semarang 2012, yang memuat soal tambahan penghasilan pegawai di Pemerintah Kota Semarang. Soemarmo akhirnya divonis 1,5 tahun dengan denda Rp50 juta setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001



(Kontan, 3/8/2012). Dua orang mantan Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip dan Soemarmo H. S. juga diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Semarang, dimintai keterangan terkait kasus korupsi Semarang Pesona Asia (SPA) tahun 2007 (Kompas, 28/1/2015).

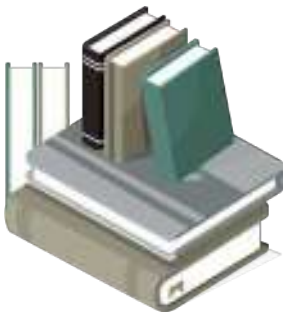
Politisi, swasta, dan pejabat pemerintah merupakan dua kelompok utama, yang rentan melakukan tindak pidana korupsi. Survei yang dilakukan Cegah Korupsi FEB UGM (2016) menemukan bahwa pelaku utama korupsi di Indonesia adalah: (1) Politisi (32%); (2) Swasta (25%); (3) Pejabat Pemerintah (24%) (lihat Gambar 5.4).

Gambar 5.4 Pelaku Utama Korupsi di Indonesia



Sumber: Pradiptyo et al. (2016)





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

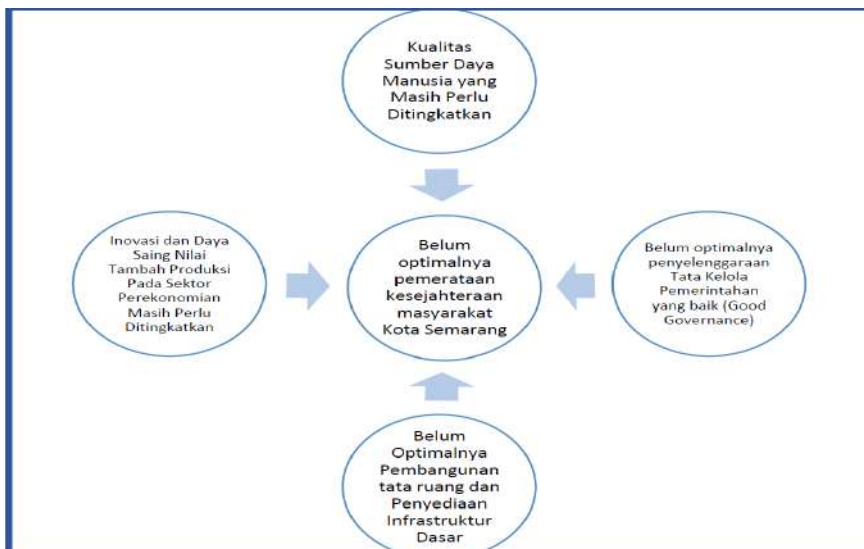
BAB 6

ISU-ISU STRATEJIK DI KOTA SEMARANG



Bab 6 akan menganalisis berbagai isu strategik sebelum Bapak Hendrar Prihadi mendapat mandat rakyat sebagai Wali Kota Semarang. Isu strategik yang dimaksud setidaknya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar, inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan, kemerosotan mutu lingkungan hidup, banjir dan rob, serta masih rendahnya iklim investasi (lihat Gambar 6.1).

Gambar 6.1 Isu Strategik Kota Semarang

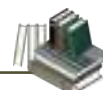


Sumber: Perda No. 11 Tahun 2017

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas. Ini diakibatkan karena IPM mencerminkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas, dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen, yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) (Kuncoro, 2004). Pada tahun 2009, IPM Kota Semarang telah mencapai skor 76,90, angka tersebut menempati urutan kedua di bawah Kota Surakarta, tetapi sudah jauh di atas angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,10. Pada tahun 2014, capaian IPM Kota Semarang yang sebesar 79,24, yang ternyata lebih rendah daripada IPM Kota Salatiga yang sebesar 79,98. Pada tahun 2011, capaian IPM Kota Semarang adalah sebesar 77,58 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,19 pada tahun 2016 (lihat kembali Bab 5 Tabel 5.6).

Jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kota Semarang masih lebih tinggi dengan perbedaan capaian sebesar 4,49. Selain itu, peningkatan angka IPM di Kota Semarang secara umum masih lamban, dengan perkembangan IPM selama 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 1% per tahun.

Jumlah siswa putus sekolah di Kota Semarang khususnya pada jenjang pendidikan tingkat SLTA/SMK/MA sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan. Tabel 6.1 menunjukkan putus sekolah pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2005 mengalami penurunan di banding tahun-tahun sebelumnya, tetapi untuk jenjang pendidikan



SMA/SMK mengalami kenaikan, yakni menjadi sebesar 0,85%. Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan hampir sebagian besar siswa yang tidak meneruskan sekolah berasal dari keluarga miskin. Masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Tabel 6.1 Perkembangan Angka Siswa Putus Sekolah Kota Semarang Tahun 2000-2005

No	Jenjang Pendidikan	Tahun (%)					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	SD	0.07	0.07	0.07	0.06	0.1	0.05
2.	SLTP/MTS	0.39	0.39	0.42	0.46	0.48	0.4
3.	SMA/SMK	0.74	0.74	0.45	0.75	0.78	0.85

Sumber: Perda No. 11 Tahun 2017

6.2 BELUM OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang sebelum dipimpin oleh Pak Hendrar Prihadi masih belum optimal. Masih adanya *weak governance* yang tecermin dari: (1) belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik; (2) belum optimalnya penyelenggaraan pemda; (3) masih tingginya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Tabel 6.2 secara terperinci menjabarkan ketiga akar masalah ini. Beberapa faktor penyebab masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat diidentifikasi setidaknya sebagai berikut: belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN); masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.



Tabel 6.2 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Permasalahan	Akar Masalah
1) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP, SP dan SPM
	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
2) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya budaya kerja aparatur
	Belum optimalnya Implementasi SPIP dan Kapabilitas APIP
	belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
	belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD
	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3) Masih tingginya gangguan ketertarikan dan ketertiban masyarakat	Belum optimalnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
	Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan perundangan
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketertarikan
Masih adanya ancaman dan gangguan , kerawanan sosial politik terhadap masyarakat	

Sumber: Perda No. 11 Tahun 2017

Pemerintah yang bersih dari KKN merupakan salah satu ciri pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam hal ini sebagian responden menyatakan bahwa kinerja wali kota dan aparat pemda Kota Semarang belum menunjukkan pemerintah yang bersih dari KKN. Soemarmo H.S., Wali Kota Semarang, diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada tanggal 22 Juni 2012 dan diberhentikan sepenuhnya pada 21 Mei 2013 karena kasus korupsi yang menjeratnya. Kenyataan di lapangan bahwa jajaran pemerintahan pimpinan Wali Kota Semarang belum benar-benar bersih KKN pada tahun 2014 di beberapa kecamatan (Ilham, 2015) (lihat Tabel 6.3).



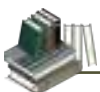
Tabel 6.3

Survei Persepsi Masyarakat terhadap Pemerintah yang Bersih dari KKN di Lima Kecamatan

Kategori	Kecamatan					Total	
	Semarang Selatan	Semarang Tengah	Genuk	Ngaliyan	Gunungpati		
Pemerintah Bersih KKN	Sangat Baik	25 17,4%	31 21,6%	28 19,4%	28 19,4%	32 22,2%	144 100%
	Baik	28 24,8%	21 18,6%	20 17,7%	27 23,9%	17 15%	113 100%
	Tidak Baik	3 13,1%	4 17,4%	8 34,8%	1 4,3%	7 30,4%	23 100%
Total	56 20,0%	56 20,0%	56 20,0%	56 20,0%	56 20,0%	280 100,0%	

Sumber: Ilham (2015)

Transparency International Indonesia meluncurkan Laporan Survei Persepsi Korupsi 2015. Survei ini selain merupakan kelanjutan dari survei sejenis pada tahun 2010, yang merupakan alat untuk memetakan risiko korupsi serta menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dijalankan pemerintah. Survei Persepsi Korupsi 2015 dilakukan di sebelas kota di Indonesia, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Medan, Kota Padang, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Jakarta. Survei dilakukan serentak di sebelas kota di Indonesia pada 20 Mei-17 Juni 2015 kepada 1.100 pengusaha. Skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, diikuti oleh Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60 (lihat Gambar 6.2). Dengan kata lain, Kota



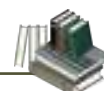
Semarang menempati peringkat ke-3 sebagai kota tebersih dalam hal korupsi menurut para pengusaha. Sementara itu, kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassar skor 48.

Gambar 6.2 Indeks Persepsi Korupsi 11 Kota Tahun 2015



Sumber: Beritagar.id (2015)

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kota Semarang,



yang dilaksanakan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020), menemukan secara keseluruhan kategori kinerja seluruh unit pelayanan publik Kota Semarang tergolong baik (B), dengan nilai rata-rata 3,217 (lihat Tabel 6.4). Kendati demikian, ini belum nilai yang tertinggi (A) karena masih di bawah interval 3,5324–4,00.

Tabel 6.4 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat per Unsur

No.	Unsur	Rata-rata
1.	Kemudahan dalam prosedur/ alur pelayanan	3.29
2.	Kemudahan melengkapi dokumen persyaratan	3.27
3.	Biaya dalam pelayanan tersebut terjangkau	3.41
4.	Kejelasan informasi biaya dalam pelayanan	3.26
5.	Kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan prosedur yang dijanjikan	3.11
6.	Kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan	3.08
7.	Keahlian dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan	3.25
8.	Kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang layanan	3.23
9.	Kecepatan tindak lanjut penanganan pengaduan ketika ada keluhan	3.05
Rata-Rata		3,217

Sumber: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020)

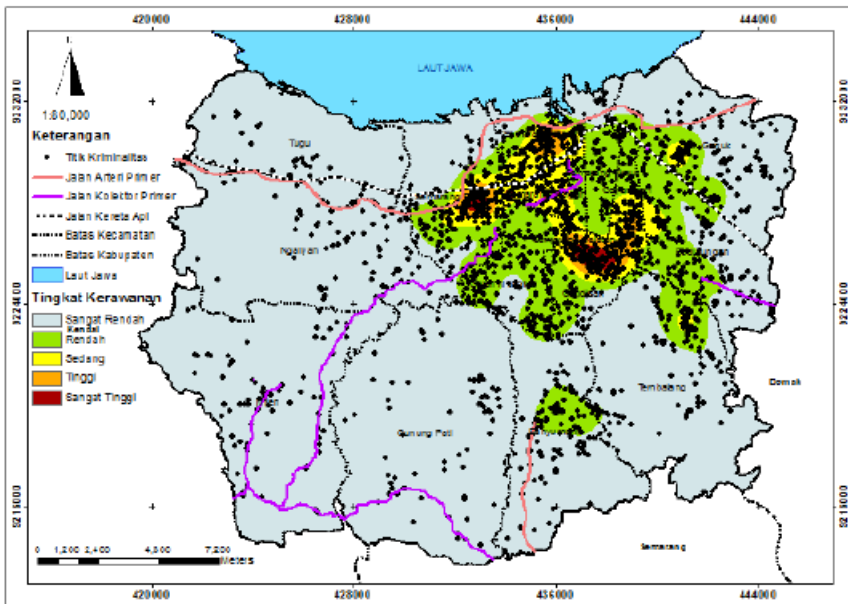
Berdasarkan data tindak kriminalitas yang diperoleh dari Polrestabes Kota Semarang selama tahun 2016–2018 berjumlah 1.965 kasus. Jumlah tersebut terus mengalami penurunan dari 938 kasus menjadi 416 kasus. Persebaran tindak kriminalitas yang terjadi berdasarkan 10 jenis kasus pada tiap kecamatan, dengan jumlah kasus 586 untuk curanmor, 140 kasus untuk curas, 456 kasus untuk curat, 66 kasus untuk narkoba, 14 kasus untuk pembunuhan, 181 kasus untuk penganiayaan, 142 kasus untuk pengeroyokan, 243 kasus untuk penggelapan, 110 kasus untuk penipuan dan 27 kasus untuk perjudian (Nanda *et al.*, 2019).

Berdasarkan Gambar 6.3, dengan menggunakan radius 1.300 meter dan metode *Kernel Density*, terlihat bahwa kecamatan yang memiliki

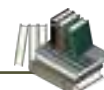


tingkat kerawanan sangat tinggi hingga sangat rendah berada pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, dan Candisari. Tingkat tinggi hingga sangat rendah berada pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Semarang Utara dan Gayamsari. Tingkat sedang hingga sangat rendah berada pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Genuk, Tembalang, dan Semarang Tengah. Tingkat Rendah hingga sangat rendah berada pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Banyumanik, Gajah Mungkur, dan Semarang Timur. Sementara itu, daerah lainnya hanya termasuk tingkat kerawanan sangat rendah saja. Sebaran titik rawan kriminalitas tahun 2016-2018 mempunyai tren yang sama, yaitu paling banyak berada di pusat Kota Semarang, sedangkan daerah pinggir kota cenderung jauh lebih sedikit.

Gambar 6.3 Peta Rawan Kriminalitas Seluruh Kasus dengan Metode *Kernel Density*



Sumber: Nanda *et al.* (2019)



Sepanjang tahun 2016-2018, kinerja akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang mendapatkan penilaian yang semakin meningkat meskipun masih CC dan B. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meningkat dari CC dengan skor 55,94 tahun 2016 menjadi B selama 2017-2018. Arti nilai CC adalah terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Arti nilai B adalah AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, tetapi terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Selain itu, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Makin tinggi nilai SAKIP maka makin efisien anggaran, mampu mempertanggungjawabkan hasil penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas (lihat Gambar 6.4).

Gambar 6.4 AKIP Kota Semarang Tahun 2016-2018



Sumber: Pemkot Semarang (2020)

Gambar 6.5 menunjukkan daerah kota/kabupaten di Indonesia yang mendapat nilai SAKIP B sebanyak 220 pada tahun 2019, sedangkan daerah provinsi yang mendapat nilai SAKIP B sebanyak 22 dari total 34 provinsi. Kategori nilai “B” dengan nilai absolut 60-70 memiliki interpretasi “Baik”. Dengan kata lain, AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, tetapi terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja pun baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 untuk setiap unit kerja.



Gambar 6.5

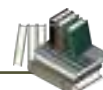
Nilai SAKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019



Sumber: Kementerian PAN & RB (2020)

6.3**PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR**

Kondisi infrastruktur jalan ditunjukkan oleh Tabel 6.5. Sarana jalan di Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang ada sepanjang 722,46 km dengan kondisi jalan baik mencapai 52,5%, kondisi sedang 35,6%, rusak ringan 10%, dan rusak berat hanya sebesar 1,9%. Dengan kata lain, pekerjaan rumah pemda Kota Semarang adalah menangani pembangunan jalan yang rusak ringan dan berat yang mencapai 11,9% dari total jalan.



Tabel 6.5

Kondisi Jalan Kota di Kota Semarang Tahun 2016

NO	KECAMATAN	KONDISI JALAN				TOTAL PANJANG JALAN (m)
		BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
		(m)	(m)	(m)	(m)	
1.	BANYUMANIK	26.754	10.241	1.489	-	38.484
2.	CANDISARI	19.152	1.264	0,12	-	20.532
3.	GAJAH MUNGKUR	22.140	11.584	1.966	-	35.690
4.	GAYAMSARI	16.557	5.969	0,80	-	23.326
5.	GENUK	23.963	15.668	6.279	1.621	47.530
6.	GUNUNGPATI	32.125	31.095	13.155	2.125	78.500
7.	MIJEN	48.669	56.987	12.592	3.968	122.215
8.	NGALIYAN	24.868	17.549	3.436	1.425	47.278
9.	PEDURUNGAN	22.865	7.885	2.347	-	33.097
10.	SMG BARAT	33.251	10.416	1.984	0,55	46.201
11.	SMG SELATAN	20.909	3.997	0,47	-	25.376
12.	SMG TENGAH	30.578	23.593	11.327	2.126	67.624
13.	SMG TIMUR	-	15.350	2.579	1.075	19.004
14.	SMG UTARA	2.843	13.817	3.290	0,53	20.475
15.	TEMBALANG	46.726	7.379	4.830	0,50	59.434
16.	TUGU	7.968	24.103	5.620	-	37.690
TOTAL PANJANG	(m)	379.367	256.895	72.279	13.915	722.456
	(km)	379	257	70	12	722

Sumber: Perda No. 11 Tahun 2017

Perkembangan urusan penataan ruang dijabarkan berdasarkan beberapa variabel yang ditunjukkan Tabel 6.6. Persentase bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) naik dari 49,73% tahun 2005 hingga 55% tahun 2010. Pasca Pak Hendi menjadi wakil wali kota maupun wali kota, persentase bangunan yang memiliki IMB berkisar antara 52,6% tahun 2011 hingga 53,4% tahun 2016. Bahkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang meningkat menjadi 79% selama 2015-2016. Singkatnya, masih



banyak bangunan yang belum memiliki IMB dan masih ada wilayah yang peruntukannya belum sesuai dengan perencanaan tata ruang.

Tabel 6.6 Kinerja Penataan Ruang Tahun 2005-2016

No	Indikator	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB	1,1	1,09	1,08	1,07	1,06
2.	Jumlah bangunan ber-IMB / Jumlah bangunan	49,73 %	51,34 %	52,62 %	53,85 %	55,01 %

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	52,62	52,80	52,93	53,04	53,25	53,35%
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	0	0	0	0	79	79

Sumber: Perda No. 11 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2011

6.4 INOVASI DAN DAYA SAING DAERAH

Masih belum optimalnya inovasi juga merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing. Secara konseptual, variabel daya saing menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi, baik skala nasional, regional, maupun global (Kuncoro, 2020). Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah Kota Semarang menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan (lihat Tabel 6.7). Akar masalah inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian adalah:

1. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek serta daya tarik wisata.



2. Masih rendahnya kemudahan dalam berinvestasi.
3. Masih kurangnya sentra usaha/produk lokal.
4. Masih terbatasnya akses dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM).
5. Masih kurangnya hubungan kerja sama antara IKM dan usaha besar.
6. Masih tergantungnya ketersediaan pangan dari daerah sekitar.

Tabel 6.7 Permasalahan dan Akar Masalah Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi pada Sektor Perekonomian

Permasalahan	Akar Masalah
(1) Kurang berkontribusinya sektor-sektor lainnya dalam perekonomian daerah	Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata
(2) Masih belum optimalnya nilai investasi	Kemudahan dalam berinvestasi perlu ditingkatkan
(3) Kontribusi kategori-kategori pada sektor perdagangan dan jasa-jasa perlu dioptimalkan	Distribusi produk belum efektif dan efisien
	Masih kurangnya sentra usaha / produk ekonomi lokal
	Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas
(4) Ketahanan pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar Masih bergantungnya ketersediaan pangan dari daerah sekitar

Sumber: Perda No. 11 Tahun 2017

6.5 KEMEROSOTAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP, BANJIR, DAN ROB

Banyaknya penduduk dan juga keadaan dataran yang ada di Semarang ini menjadi potensi adanya bencana. Menurut catatan BPBD Kota Semarang, sudah 38 kali terjadi tanah longsor di Semarang. Kota Semarang yang memang memiliki daerah perbukitan ini menjadikan potensi tanah longsor. Untuk itu, menjaga lingkungan alam sangatlah penting sebagai salah satu usaha untuk menghindari tanah longsor. Tidak hanya itu saja, bencana yang sering terjadi yang melanda Kota Semarang setidaknya adalah: (1) Kota Semarang sudah mengalami bencana longsor sebanyak 38 kali pada November 2016 (BPBD Kota Semarang, 2016); (2) Kota Semarang memang sering mengalami banjir, baik banjir yang berskala kecil maupun tinggi yang diakibatkan oleh drainase yang masih kurang maksimal, adanya industri ataupun bisnis



yang menggunakan air bawah tanah juga menjadi penyebabnya; (3) adanya kenaikan suhu udara yang berkaitan dengan banyaknya karbon dioksida di udara dibandingkan dengan zat yang lainnya dan sekarang sudah banyak yang tercemar dengan asap kendaraan; (4) jika terjadi banjir selama sehari-hari, hal ini akan menjadikan air bersih susah dicari yang memunculkan penyakit gatal-gatal, pilek, dan penyakit lainnya.

Letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Namun, begitu berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut. Untuk meminimalisasi terjadinya banjir dan rob dilakukan kegiatan-kegiatan perawatan sungai-sungai secara berkala. Usaha-usaha tersebut terbukti efektif dalam menurunkan genangan banjir dan rob. Tabel 6.8 menunjukkan terlihat menurunnya persentase kawasan banjir dan rob dari 5,34% di tahun 2015 menjadi 5,02% di tahun 2016. Meskipun demikian terlihat lama genangan banjir dan rob masih 60 menit, panjang sungai serta saluran drainase masih tetap 206.506 meter, luas area tangkapan tetap 37.301 hektare, dan kapasitas pengendali banjir masih 77.405 liter/detik.

Tabel 6.8 Penanganan Banjir di Kota Semarang Tahun 2015-2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	
			2015	2016*
1	Persentase kawasan banjir dan rob	%	5,34	5,02
2	Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan gorong-gorong pada saat banjir	Menit	60	60
3	Panjang Sungai dan saluran drainase	meter	206.506	206.506
4	Kapasitas/fungsi drainase (luas areal tangkapan)	Hektar	37.301	37.301
5	Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder	Liter / detik	77.405	77.405

Sumber: Perda No. 11 Tahun 2017



6.6

MASIH RENDAHNYA IKLIM INVESTASI

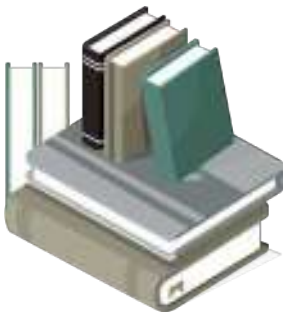
Perkembangan jumlah investor di Kota Semarang menunjukkan angka dengan jumlah investasi yang terus meningkat khususnya Penanaman Modal Domestik (PMDN) selama rata-rata lima tahun terakhir. Namun, jika dilihat secara perinciannya, untuk jumlah investasi Penanaman Modal Asing (PMA) justru menurun di tahun 2016, yang hanya sebesar Rp2,9 triliun dibandingkan tahun 2015 yang sempat mencapai di atas Rp5,4 triliun (lihat Tabel 6.9). Hal ini menunjukkan sebenarnya nilai investasi terutama PMA masih relatif rendah dan berfluktuasi cukup tinggi tiap tahunnya.

Tabel 6.9 Tren Investasi Kota Semarang Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	26	62	67	111	152	152
2.	Jumlah Investasi (Milyar Rp)	997,04	3.675,24	5.372,16	7.924,52	9.570,41	10.500,00
a	Jumlah Investasi PMDN (Milyar Rp)	437,34	1.554,97	4.129,10	5.332,51	4.138,41	7.550,00
b	Jumlah Investasi PMA (Milyar Rp)	559,70	2.120,27	1.243,06	2.592,01	5.432,00	2.950,00

Sumber: Perda No. 11 Tahun 2017





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

BAB 7

CHANGE BY DESIGN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG



Formulasi visi sangat penting sebagai arah strategi dan pedoman melaksanakan strategi yang diformulasikan. Visi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang apa yang diinginkan oleh pemimpin organisasi, mengapa suatu organisasi berdiri, dan apa yang diyakininya, atau gambaran masa depan organisasi (Kuncoro, 2004). Visi yang baik (*vision of success*) dapat didefinisikan sebagai “deskripsi tentang apa yang mau dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya” (Bryson, 2018).

Visi dan misi adalah sebuah bentuk perencanaan yang dapat mengarahkan pembangunan ke sasaran yang tepat. Hampir semua daerah memiliki perencanaan, tetapi tidak semua daerah menghasilkan kesejahteraan. Untuk itu, diperlukan sebuah perencanaan yang strategik dan rasional agar kesejahteraan itu dapat tercapai. Selanjutnya, kesinambungan serta keterkaitan visi dan misi antara pusat, provinsi, serta kabupaten/kota harus dijaga. Tujuannya adalah terjalannya keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah.

Bab 7 akan menguraikan secara terperinci mengapa perlu ada perubahan visi, misi, dan strategi pembangunan Kota Semarang. Dimulai dengan mengidentifikasi perlunya manajemen perubahan dan prioritas pembangunan, perubahan visi serta misi pembangunan jangka menengah Kota Semarang hingga tahun 2026.

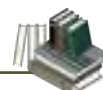
7.1 MENGAPA PERLU MANAJEMEN PERUBAHAN?

Berdasarkan hasil telaahan terhadap potensi ekonomi (Bab 4), permasalahan mendasar (Bab 5), dan isu strategik (Bab 6) Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, nasional, dan kondisi internasional maka pemerintah daerah Kota Semarang menetapkan prioritas pembangunan daerah selama beberapa periode pembangunan sebagaimana tersaji dalam dokumen RPJMD Kota Semarang, seperti yang terlihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Perubahan Prioritas Pembangunan Kota Semarang

RPJMD	Prioritas Pembangunan
RPJMD 2010-2015	<ol style="list-style-type: none">1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.2. Penanggulangan Rob dan Banjir.3. Peningkatan Infrastruktur.4. Peningkatan Pelayanan Publik.5. Kestetaraan Gender.6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan.7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
RPJMD 2016-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas Pendidikan.2. Peningkatan Kualitas Kesehatan.3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.5. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.6. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.7. Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup.8. Penanganan Banjir dan Rob.9. Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan.10. Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.
RPJMD 2021-2026	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas.2. Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial.4. Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Pelayanan yang Berkualitas serta Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan.5. Peningkatan Kebertahanan dan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan.6. Penyelenggaraan <i>Good Governance</i>.

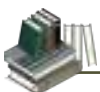
Sumber: Dirangkum dari RPJMD 2010-2015; RPJMD 2016-2021; RPJMD 2021-2026



Dengan mengamati dan mendalami informasi yang tertera pada Tabel 7.1, terlihat bahwa terdapat beberapa persamaan prioritas pembangunan Kota Semarang. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2026 mendatang, pemerintah Kota Semarang akan terus memprioritaskan **pembangunan manusia**, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Pembangunan manusia yang digencarkan oleh pemerintah Kota Semarang merupakan langkah yang harus diapresiasi karena selama ini masyarakat menilai pemerintah masih dianggap bias terhadap investasi modal fisik (infrastruktur), baik dalam konteks daerah dan nasional, dalam mendorong pembangunan ekonomi. Agusalim *et al.* (2022) menyatakan bahwa pembangunan modal manusia merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang dapat dinikmati dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Semarang dalam menyeimbangkan akumulasi modal manusia dan fisik dapat menjadi mesin utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Pemerintah Kota Semarang konsisten untuk meningkatkan **kesejahteraan masyarakat** meliputi kemakmuran, pemenuhan individu akan kebutuhannya dalam hal sosial, spiritual, dan tentunya material. Adapun prioritas pembangunan ini mutlak dibutuhkan agar masyarakat Kota Semarang dapat hidup layak serta mampu mengembangkan dirinya. Dengan demikian, maka tiap individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik pada tingkat masyarakat.

Pada RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026, pemerintah Kota Semarang juga memprioritaskan **peningkatan kebertahanan dan daya saing kota** melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan. Peningkatan kebertahanan dan daya saing kota dapat dilihat melalui dua komponen utama, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki oleh Kota Semarang. Daya saing merupakan aspek yang wajib dimiliki oleh sebuah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki. Dalam hal ini,



Kota Semarang memiliki beberapa potensi yang perlu dioptimalkan, seperti pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM, daya saing pariwisata, daya saing perdagangan dan industri, serta kinerja penanaman modal.

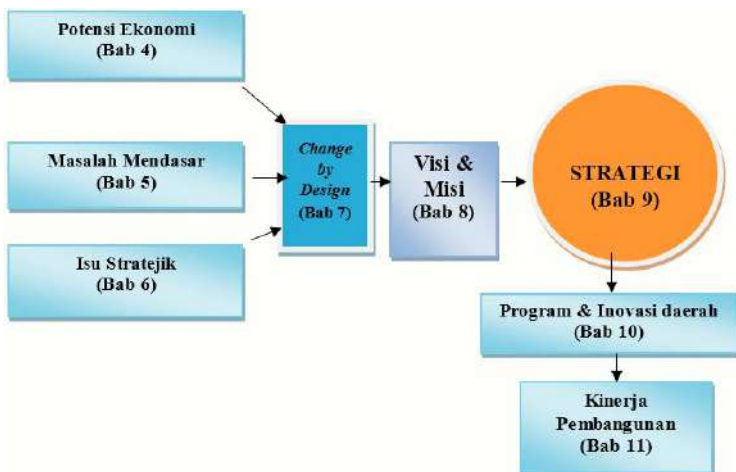
Dalam RPJMD 2010-2015, pemerintah Kota Semarang telah memprioritaskan untuk **meningkatkan pelayanan publik**. Namun demikian, selama periode tersebut Wali Kota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro, tertangkap karena melakukan tindak pidana korupsi (Kompas, 30/3/2012). Sejak itu, dalam RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026, pemerintah Kota Semarang terus melakukan berbagai perubahan dan inovasi untuk mewujudkan **penyelenggaraan *good governance***. Penyelenggaraan *good governance* merupakan sebuah solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, transparansi, dan tentunya supremasi hukum. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Kota Semarang dalam mencapai hal tersebut, antara lain terkait pengelolaan keuangan, pelayanan publik, manajemen kota, dan strategi kepemimpinan.

Kerangka konseptual penyusunan visi, strategi, dan program aksi “Kota Semarang di Era Pandemi dan Resesi” dirangkum pada Gambar 7.1. Visi Kota Semarang perlu dirumuskan atas dasar kajian kondisi terkini Jateng yang sudah dielaborasi dalam: Identifikasi potensi ekonomi Kota Semarang (Bab 4), masalah mendasar Jateng (Bab 5), dan isu strategik (Bab 6). Setelah mengkaji dan mengidentifikasi potensi ekonomi, permasalahan utama Kota Semarang, perumusan visi Kota Semarang perlu disusun, yang nantinya akan diikuti dengan strategi (akan dijabarkan di Bab 9) dan program aksi dan inovasi daerah (akan dijabarkan di Bab 10) yang jelas serta terarah dalam mencapai visi tersebut.



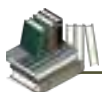
Supaya perekonomian Kota Semarang dapat tumbuh positif kembali maka sendi-sendi ekonomi Kota Semarang harus digerakkan secara serempak dengan berbasis sektor utama, spasial, dan manusia. Visi provinsi dan seluruh kabupaten-kota di Jateng harus sama atau sejalan, yaitu **Mewujudkan Jateng Bangkit (*Gumregah*)** (Kuncoro *et al.*, 2021). *Gumregah* dalam bahasa Jawa mengandung arti semangat, penuh keoptimisan, maupun memiliki keinginan yang kuat untuk bangkit dari resesi dan pandemi Covid-19. Caranya bagaimana untuk Kota Semarang? Bab 9 akan menjawab pertanyaan ini.

Gambar 7.1 Visi, Misi, Strategi Kota Semarang



7.2 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan, yaitu: (1) pendekatan perencanaan teknokratik; (2) pendekatan perencanaan dari atas (*top-down*); (3) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom-up*); (4) pendekatan partisipatif; dan (5) pendekatan politik (Kuncoro, 2018).



7.2.1 Pendekatan Teknokratik

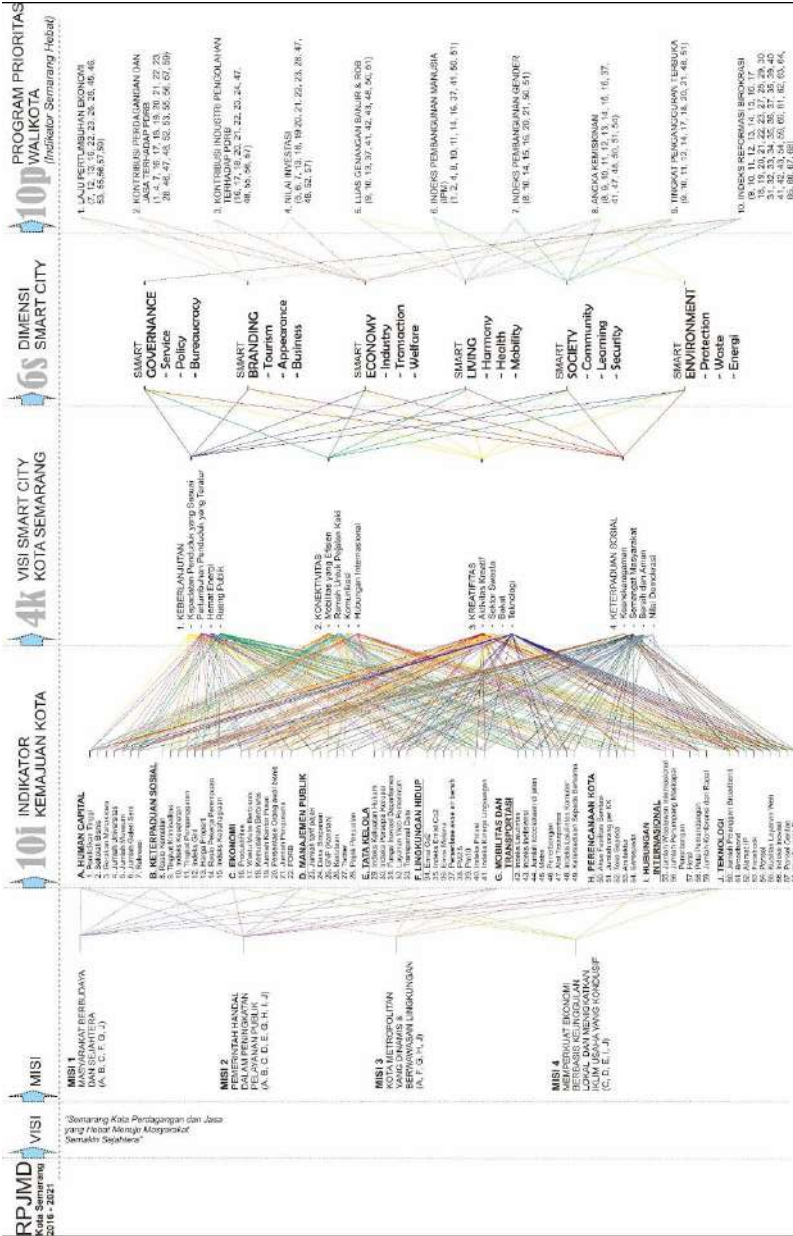
Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Semarang disusun dengan pendekatan teknokratik sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Semarang berdasarkan pada analisis data statistik serta informasi terkait lainnya. Selanjutnya, data dan informasi tersebut dikonstruksikan menjadi isu strategik yang diasumsikan akan dihadapi selama periode pembangunan tahun 2021-2025. Proses konstruksinya dilaksanakan dengan menerapkan cara-cara berpikir ilmiah, yaitu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data, dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga secara praktik penyusunannya. Dilihat secara waktu, penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Semarang Tahun 2021–2025 dilaksanakan sebelum penetapan Kepala Daerah terpilih sehingga belum mengolaborasikan pendekatan politis yang berupa visi dan misi dari wali kota dan wakil wali kota terpilih.

Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rencana pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Pendekatan teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan uraian visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk mewujudkan visi Kota Semarang, yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”, seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu diuraikan elemen-elemen untuk mewujudkan Semarang Hebat yang menjadi fokus kerja Kota Semarang tahun 2016-2021. Kerangka teknokratik pencapaian visi tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.2.



Gambar 7.2

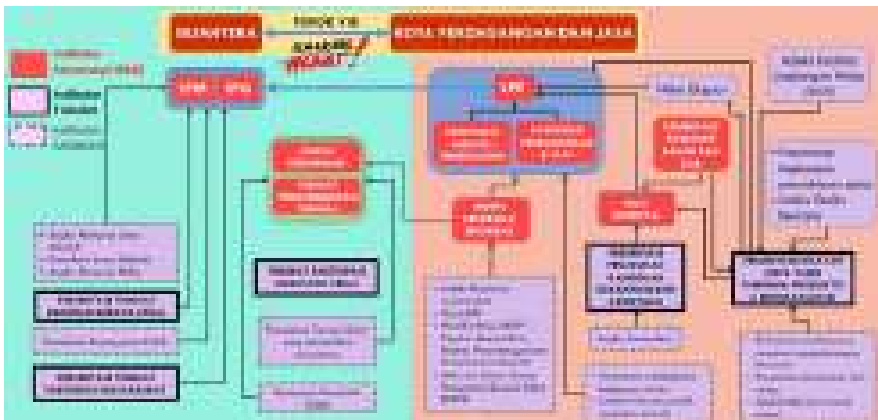
Kerangka Teknokratik Kota Semarang Berdasarkan RPJMD 2016-2021



Sumber: Bunyamin (2018)

Dari Gambar 7.3 terlihat bahwa terdapat dua pokok visi yang diuraikan dalam kata kunci kota perdagangan dan jasa serta sejahtera. Pokok visi “sejahtera” diukur melalui indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPM menjelaskan bagaimana mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dalam suatu daerah, yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak (Kuncoro, 2013; 2014). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-Laki. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar (BPS, 2015). Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia.

Gambar 7.3 Alur Kerangka Logis Pencapaian Visi



Sumber: RPJMD 2016-2021 Kota Semarang (2021)

Sementara itu, pokok visi Kota Perdagangan dan Jasa diukur melalui indikator utama Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE dipengaruhi oleh kontribusi sektor utama (industri, perdagangan, dan jasa) dan permintaan agregat khususnya nilai investasi serta ekspor.



LPE didukung secara langsung oleh indikator kontribusi perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, serta nilai investasi. LPE akan naik jika ketiga indikator tersebut dapat meningkat. Kontribusi perdagangan, jasa, dan industri pengolahan didukung secara tidak langsung oleh adanya pemerintahan yang baik yang terindikasi melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Di sisi lain, LPE juga ikut dibentuk oleh nilai investasi. Peningkatan nilai investasi ikut dipengaruhi oleh adanya kawasan yang tidak banjir dan rob, serta adanya pemerintahan yang mendukung iklim investasi yang kondusif. Sementara itu, indikator penurunan Angka Kemiskinan merupakan keniscayaan jika terdapat lapangan pekerjaan bagi warga miskin sehingga TPT akan dapat menurun.

Ketiga indikator tersebut akan saling terkait. Peningkatan IPM dan IPG akan dipengaruhi oleh peningkatan nilai LPE. Dengan semakin tingginya nilai LPE maka diasumsikan kesejahteraan akan meningkat yang ditandai oleh peningkatan nilai IPM dan IPG. Sebaliknya, dengan adanya masyarakat yang sejahtera dan tercukupi kebutuhannya (yang ditunjukkan oleh nilai IPM dan IPG) maka diharapkan akan berpengaruh terhadap produktivitas yang akan berkontribusi pada peningkatan LPE.

Selanjutnya, di antara ketiga indikator tersebut terdapat indikator utama “Angka Kemiskinan”, yang ketercapaiannya saling terpengaruh dan memengaruhi IPM, IPG, dan LPE. Dengan semakin meningkatnya LPE maka diasumsikan akan dapat menurunkan angka kemiskinan. Sebaliknya, dengan adanya penurunan angka kemiskinan maka produktivitas akan meningkat yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan nilai LPE. Demikian juga dengan hubungan antara nilai IPM dan IPG dengan angka kemiskinan. Nilai IPM dan IPG yang meningkat akan berpengaruh ke penurunan angka kemiskinan, dan sebaliknya, penurunan angka kemiskinan akan dapat meningkatkan nilai IPM serta IPG. Indikator utama IPM, IPG, LPE, dan Angka Kemiskinan merupakan indikator yang saling terkait



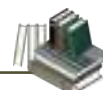
yang pencapaiannya dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung dengan enam indikator Semarang Hebat lainnya.

Selain indikator Semarang Hebat yang telah diuraikan sebelumnya, pencapaian visi dan misi didukung oleh tujuan serta sasaran. IPM dan IPG juga didukung oleh adanya kearifan budaya lokal untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka maka perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat terserap ke lapangan kerja yang selanjutnya akan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK yang meningkat diharapkan akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka dan pada gilirannya akan menurunkan angka kemiskinan.

Nilai investasi yang masuk ke Kota Semarang akan berpengaruh pada nilai LPE. Di sisi lain, peningkatan nilai investasi akan dipengaruhi oleh kondusivitas wilayah yang salah satunya dilihat melalui penurunan gangguan keamanan dan ketertiban. Semakin kondusif wilayah maka akan meningkatkan daya tarik berinvestasi. Indikator tujuan lain yang mendukung nilai investasi (yang selanjutnya juga mendukung LPE) adalah untuk mewujudkan wilayah kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Kota yang tangguh berarti bahwa Kota Semarang dapat terus berfungsi saat menghadapi tantangan, kemudian dapat kembali berkembang dengan baik. Kota yang produktif dan berkelanjutan berarti bahwa Kota Semarang akan dapat terus membangun dengan memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat dengan tetap berpedoman pada lingkup ekonomi, sosial, serta lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi di masa yang akan datang.

7.2.2 Pendekatan dari Atas (*Top-Down*)

Inti pendekatan *top-down* adalah bahwa pemerintah daerah kota perlu memperhatikan arah kebijakan, prioritas, dan strategi pembangunan nasional serta provinsi dalam proses perencanaan daerahnya. Secara prinsip, koordinasi antartingkatan pemerintah

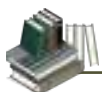


yang berbeda dilakukan melalui konsultasi dalam pertemuan koordinasi perencanaan pembangunan. Proses *top-down* perencanaan pembangunan tahunan dimulai ketika setiap tingkat pemerintahan memberikan acuan dan keputusan anggaran tahunan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.

Tabel 7.2 menunjukkan bagaimana Pemda Kota Semarang memperhatikan keselarasan dan sinergi penentuan prioritas pembangunannya dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Pada tahun 2021, dengan adanya dampak Covid-19 mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2021 bertema “Meningkatkan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Prioritas Nasional (PN) RKP 2021 adalah agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 (sebagaimana Perpres No. 18/2020). Dari 7 PN di tahun 2021 dilakukan penekanan pada PN 1, PN 3, PN 5, dan PN 6. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” sebagaimana RPJMD 2018-2023. Terdapat empat prioritas utama pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada Tabel 7.2 yang telah diselaraskan dengan PN. Keselarasan prioritas RKPD Kota Semarang dengan Prioritas RKP Pusat dan RKP Provinsi Jawa Tengah ditandai dengan warna yang berbeda untuk masing-masing prioritas. Sebagai contoh, PN 1 dengan warna merah yang menekankan pentingnya “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas”, dijabarkan oleh Pemda Provinsi Jateng sebagai “Penguatan Kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana”, dan menjadi dasar bagi Pemda Kota Semarang menetapkan prioritas “Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas”.

Secara umum prioritas pembangunan Kota Semarang di tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD



Tahun 2016-2021 serta arahan kebijakan dari wali kota dan wakil wali kota. Selain itu, prioritas di tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan dampak COVID-19. Di tahun 2021 juga akan difokuskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas di tahun 2020 yang tidak dapat terlaksana karena adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Selain itu, RKP tahun 2021 juga disusun melalui pendekatan holistik, tematik, spasial, dan integratif dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, perkiraan capaian di tahun 2020, target kinerja RPJMD tahun 2016-2021 di tahun 2021, serta isu-isu strategis di tahun 2021.

Tabel 7.2 Keselarasan Prioritas RKP Kota Semarang dengan Prioritas RKP Pusat dan RKP Provinsi Jawa Tengah 2021

KESELARASAN PRIORITAS RKP DENGAN PRIORITAS RKP DAN RKP PROV 2021		
PUSAT	PROVINSI JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG
1. Mendukung kebijakan Nasional serta Realokasi yang Berkelanjutan	1. Peningkatan peran sektor pariwisata berkelanjutan dan Penganggaran	1. Peningkatan kemampuan dan kemandirian Kota Semarang dalam menghadapi tantangan global
2. Mendukung program prioritas nasional, pembangunan ekonomi nasional, dan pembangunan daerah	2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan Fasilitas Sarana (Jalan, Air, Listrik, Gas, Telekomunikasi, IDN, dan Telekomunikasi) dan Ruang Publik	2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar (Jalan, Air, Listrik, Gas, Telekomunikasi)
3. Peningkatan UTM, Investasi dan Tenaga Kerja	3. Peningkatan Kualitas Investasi dan Tenaga Kerja	3. Peningkatan kemampuan dan kemandirian Kota Semarang dalam menghadapi tantangan global
4. Berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan	4. Peningkatan peran fungsi pemerintahan dan pembangunan wilayah serta peningkatan kapasitas Perekonomian	4. Peningkatan peran fungsi pemerintahan dan pembangunan wilayah
5. Memperkuat infrastruktur pendukung pembangunan Nasional dan pembangunan daerah		5. Peningkatan infrastruktur kota yang mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi tantangan global
6. Mendukung lingkungan hidup, pembangunan sumberdaya manusia, dan pembangunan berkelanjutan		
7. Memperkuat kualitas publik layanan dan transformasi pelayanan publik		

Sumber: Dirangkur dari RKP 2021; RKP Kota Semarang 2021; RKP Provinsi Jawa Tengah 2021

Untuk itu, prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021 diambil dengan memerhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2021, RKP tahun 2021, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, tema/agenda pembangunan Kota Semarang tahun 2021, serta isu-isu strategis Kota Semarang sehingga prioritas RKP Kota Semarang tahun 2021 dirumuskan sebanyak lima prioritas sebagaimana terlihat pada Tabel 7.2.



7.2.3 Pendekatan dari Bawah (*Bottom-Up*)

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan partisipatif diwujudkan, antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan, yaitu pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, maupun masyarakat. Selain itu, juga diperlukan adanya koordinasi pelaku pembangunan di pemerintah yang mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan (institusi/lembaga perencana).

Mekanisme teknis Musrenbang setidaknya diatur dalam **UU No. 25/2004** tentang SPPN, khususnya: (1) Pasal 1 ayat 21: Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah; (2) Pasal 3 ayat 3: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam **Peraturan Pemerintah No. 40/2006** tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, mekanisme Musrenbang diatur dalam: (1) Pasal 24 ayat 1: Musrenbang Tahunan Nasional diselenggarakan oleh Menteri dalam rangka membahas penyempurnaan Rancangan RKP dan Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L); (2) Pasal 24 ayat 2: Musrenbang Tahunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi Rancangan RKP dengan Rancangan RKPD.

Pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil *bottom-up* diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan, baik di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pendekatan ini dirumuskan



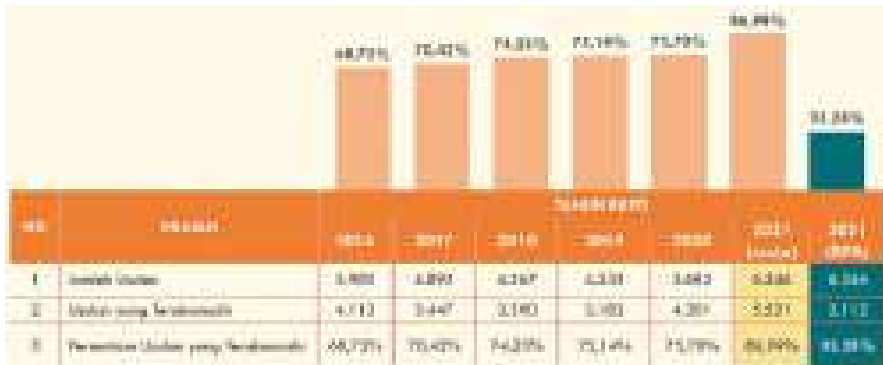
untuk memaksimalkan proses perumusan kebijakan dari aspek kepentingan publik. Penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat desa/ kelurahan yang dimaksudkan sebagai wahana menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang kemudian hasilnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan, kemudian Musrenbang tingkat kabupaten/kota. Program dan proyek yang diusulkan oleh masyarakat akan dinilai dari urgensi dan kemampuan pemerintah di tingkat bawah dalam melaksanakan usulan tersebut. Sejauh mana urgensi dan kemampuan pemerintah berkaitan dengan berbagai usulan yang masuk akan menentukan pelaksanaan program serta proyek nantinya. Apabila suatu usulan dianggap sangat penting, tetapi tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat bawah maka akan diusulkan untuk dibawa ke Musrenbang di atasnya, yaitu: di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Gambar 7.4 memperlihatkan perkembangan jumlah usulan, usulan yang terakomodir, dan persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD Kota Semarang tahun sejak tahun 2016 hingga 2021. Jumlah usulan pada tahun 2016 sebanyak 5.985 usulan, naik menjadi 6.346 usulan pada tahun 2021 (meningkat 6,03%). Jumlah usulan yang terakomodir pada tahun 2016 sebanyak 4.113 usulan, naik menjadi 5.521 usulan terakomodir (meningkat 34,32%). Selama periode 2016-2021, terlihat persentase usulan yang terakomodir mengalami peningkatan yang konsisten, di mana pada tahun 2016, persentase usulan terakomodir sebesar 68,72% naik menjadi 86,99% pada tahun 2021.



Gambar 7.4

Jumlah dan Persentase Usulan Hasil Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang



Sumber: RKPDP Kota Semarang (2021)

Pelaksanaan Musrenbang yang merupakan media partisipasi publik digunakan untuk menjangkau dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Kegiatan Musrenbang diawali dari tingkat bawah, yaitu desa/kelurahan. Berbagai usulan yang muncul pada Musrenbang tersebut disusun skala prioritas berdasarkan urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan yang bisa dijalankan oleh desa/kelurahan secara mandiri akan dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Sementara itu, usulan kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh desa/kelurahan maka dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.

Musrenbang kecamatan dilakukan setelah pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan selesai. Musrenbang kecamatan dilakukan untuk mengoordinasikan rencana kegiatan desa/kelurahan dalam lingkup wilayah kecamatan yang bersangkutan dan dalam forum tersebut dilakukan pemilahan terhadap usulan-usulan program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh desa/kelurahan. Setelah melalui Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan dengan musyawarah Forum SKPD. Forum ini dimaksudkan sebagai forum koordinasi dalam rangka menyinkronkan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan



hasil Musrenbang kecamatan. Hasil-hasil musyawarah dalam Forum SKPD tersebut akan dibawa ke dalam Forum Musrenbang kabupaten/kota, di mana Musrenbang ini dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk skala kabupaten/kota yang akan menghasilkan RKPD kabupaten/kota hanya dilaksanakan hingga pada Musrenbang kabupaten/kota.

Gambar 7.5 memperlihatkan jumlah undangan dan kehadiran peserta Musrenbang dengan memperhatikan keterlibatan gender. Pada tahun 2021 jumlah undangan Musrenbang Kelurahan sebanyak 11.318 orang dengan tingkat kehadiran sebanyak 93,85%, yang terdiri atas 75,78% berjenis kelamin laki-laki dan 24,22% perempuan. Pada tingkat kecamatan, jumlah undangan sebanyak 3.341 orang, dengan tingkat kehadiran sebesar 95,48%. Partisipasi kehadiran laki-laki sebanyak 67,52%, sedangkan tingkat kehadiran perempuan sebesar 32,48% dari total undangan. Pada level kabupaten, jumlah undangan sebanyak 196 orang. Tingkat kehadiran peserta sebesar 91,33%, di mana 70,39% yang hadir adalah laki-laki dan 29,61% peserta yang hadir adalah perempuan.

7.2.4 Pendekatan Perencanaan Partisipatif

Pendekatan partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pergeseran pemahaman bahwa masyarakat bukan sekadar objek, tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan). Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut dengan istilah



tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Musrenbang.

Gambar 7.5 Pendekatan Perencanaan *Bottom-Up* Melalui Musrenbang Tahun 2021

MUSRENBANG	TAHAP DIUNDANG	GABUNGAN						TAHAP TRAD MUSRENBANG	
		Jumlah	Laki - Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%	
Musrenbang Kota	136	126	70,30%	52	39,61%	17	12,38%	17	12,38%
Musrenbang Kecamatan	3.341	3.154	94,39%	1.034	32,48%	117	3,50%	117	3,50%
Musrenbang Kecamatan	11.314	8.048	70,70%	2.871	25,37%	1.842	16,28%	1.842	16,28%



Sumber: RKP Kota Semarang (2021)

Gambar 7.6 memperlihatkan forum konsultasi publik rancangan awal RKP Kota Semarang tahun 2021. Dalam forum konsultasi publik telah diundang sebanyak 136 orang dengan tingkat kehadiran sebesar 81,62%. Terdapat 67 orang laki-laki (60,36%) yang hadir dalam forum tersebut. Jumlah perempuan yang hadir sebanyak 44 orang (39,62%) dari total undangan. Tingkat ketidakhadiran peserta undangan sebesar 18,38%. Dalam forum gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jumlah undangan sebanyak 139 orang dengan tingkat kehadiran sebesar 82,01% yang terdiri atas 70,18% laki-laki dan 29,82% perempuan. Tingkat ketidakhadiran forum gabungan OPD sebesar 17,99%.



Gambar 7.6

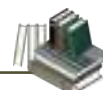
Forum Konsultasi Publik

No	FORUM	RANGKAIAN		KONTRIBUSI				TANGGAPAN	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Konsultasi P/0/0	130	87	44	33,8%	111	86,2%	20	15,2%
2	Online Konsultasi	138	89	34	24,6%	114	85,4%	18	13,2%



Sumber: RKPD Kota Semarang (2021)

Wali Kota Semarang telah membentuk Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang yang anggotanya terdiri atas para akademisi, cendekiawan, profesional, dan tokoh-tokoh ternama di Kota Semarang. Gambar 7.7 memperlihatkan keterlibatan DP2K dalam proses perencanaan pembangunan. Pada tahun 28 Februari 2020, DP2K berkunjung dan meninjau ke Pasar Johar yang telah direvitalisasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian DP2K adalah penataan kembali para pedagang yang saat ini menempati lokasi sementara di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), perawatan pasar setelah difungsikan kembali, sistem drainase agar pasar tersebut tidak dilanda banjir, serta penataan alun-alun agar tidak dipenuhi pedagang kaki lima dan kumuh. Hasil kunjungan tersebut dijadikan bahan kajian untuk disampaikan kepada wali kota. Pada 23 April 2020, DP2K melaksanakan webinar tentang penanganan dampak Covid-19. Pada 20 November 2020, DP2K kembali melaksanakan webinar tentang kinerja kampung siaga dan menjaga warga di masa Pilkada. Selain itu, pada tahun 2020 DP2K Semarang menerbitkan *policy brief*, yaitu dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan.



Gambar 7.7

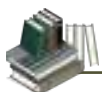
Keterlibatan DP2K dalam Proses Perencanaan



Sumber: RKPd Kota Semarang (2021)

7.2.5 Pendekatan Politik

Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, pokok-pokok pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan Musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan RKPd Kota Semarang yang diharmonisasi dalam SIMPERDA melalui e-POKIR. Pada tahun 2021, terdapat 675 usulan titik lokasi, dengan realisasi sebanyak 400 titik lokasi (lihat Gambar 7.8). Dengan demikian, usulan DPRD yang terealisasi sebesar 59,26%.



Gambar 7.8

Pendekatan Politik dalam Penyusunan Dokumen RKPD Kota Semarang



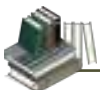
Sumber: RKPDP Kota Semarang (2021)

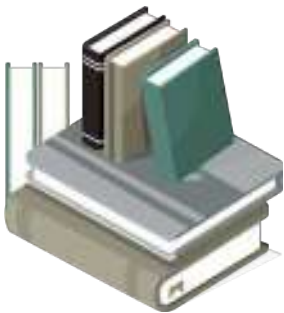
Secara umum terdapat tiga pokok pikiran DPRD Kota Semarang, yaitu: (1) DPRD mendukung setiap kebijakan dan mengapresiasi langkah-langkah wali kota dan wakil wali kota terhadap kewaspadaan terhadap risiko penularan virus corona di Kota Semarang; (2) Penyusunan RKPDP tahun 2021 Kota Semarang diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian kerja sampai dengan tahun 2021; dan (3) DPRD memandang perlu memberikan perhatian dan prioritas terhadap pemilihan strategi dan penetapan kebijakan pembangunan tahun 2021, untuk memberikan ruang yang cukup bagi pemanfaatan, pendayagunaan, dan pemberdayaan seluruh potensi serta kekuatan di Kota Semarang.

Pokok pikiran DPRD Kota Semarang menetapkan sebelas prioritas pembangunan pada tahun 2021, yaitu: (1) peningkatan potensi unggulan daerah berdaya saing; (2) pembangunan konektivitas pusat-pusat ekonomi; (3) pemantapan pelayanan publik; (4) tata kelola



pemerintahan; (5) penurunan pembangunan; (6) penanggulangan kemiskinan; (7) peningkatan kualitas pendidikan; (8) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (9) penguatan ketahanan pangan; (10) penanggulangan bencana; dan (11) peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan.





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

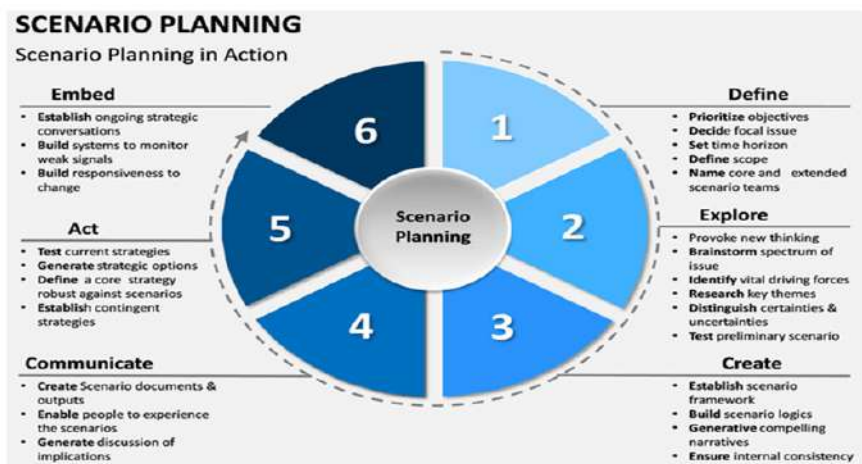
BAB 8

PERUBAHAN VISI DAN MISI KOTA SEMARANG



Bab 8 akan menjelaskan perubahan visi dan misi Kota Semarang. Perencanaan skenario dibutuhkan, sebagaimana dirangkum dalam Gambar 2.3 di Bab 2, untuk memperlihatkan ke mana arah pembangunan Kota Semarang. Gambar 8.1 menunjukkan bagaimana perencanaan skenario (*scenario planning*) dimulai dari merumuskan visi dan misi mau dibawa ke mana Kota Semarang lima tahun ke depan? Perubahan visi, misi, dan strategi diperlukan untuk mewujudkan “Semarang Kota Perdagangan & Jasa yang Hebat dan Makin Hebat”. Seberapa jauh keselarasan visi antara Pemda Kota Semarang dengan Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah pusat akan diidentifikasi.

Gambar 8.1 Scenario Planning



Sumber: Polito (2020)

8.1 PERUBAHAN VISI

8.1.1 Keselarasan Visi Pemkot Semarang dengan Pemprov Jawa Tengah dan Pusat

Keselarasan visi antar-pemda kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) dengan Pemda Provinsi Jateng dibutuhkan agar arah pembangunan bergerak ke titik yang sama. *Grand strategy* atau konsepsi umum tentang pendekatan pembangunan daerah di Jawa Tengah selama 2005-2025 dikenal dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Jateng. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jateng, visinya adalah “**Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari**”.

Tabel 8.1 menyajikan visi pembangunan jangka panjang dan menengah Kota Semarang dibandingkan dengan visi Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat yang tecermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada periode 2016-2021 dan 2021-2026. Visi ini berbasis pada pemberdayaan semua komponen, baik pemerintah, legislatif, masyarakat, maupun investor swasta merupakan visi dan misi pembangunan yang tidak bersifat dogmatis atau bersifat kaku, tetapi merupakan konsepsi pembangunan yang bersifat inklusif (terbuka) bagi tumbuh dan berkembangnya ide dan kreativitas yang akan memberikan penguatan bagi terwujudnya masyarakat Kota Semarang yang religius, tertib dan berbudaya, sejahtera, dan semakin hebat.



Tabel 8.1

Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jateng, dan Nasional

Pemerintah	Periode	Visi
Pemda Kota Semarang	RPJPD 2005-2025	Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya.
	RPJMD 2016-2021	Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.
	RPJMD 2021-2026	Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber- <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .
Pemda Provinsi Jawa Tengah	Jangka Panjang (RPJP) Jateng Tahun 2005-2025	Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari.
	Jangka Menengah (RPJMD) Jateng Tahun 2013-2018	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.
	Jangka Menengah (RPJMD) Jateng Tahun 2019-2024	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.
Pemerintah Pusat	RPJMN Tahun 2015-2019	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
	RPJMN Tahun 2020-2024	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Sumber: Diolah dari Bappeda Jateng (2020); Bappenas (2015); RPJPD 2005-2025; RPJMD 2010-2015; RPJMD 2016-2021; RPJMD 2021-2026 Kota Semarang



Prioritas pembangunan secara nasional dan provinsi perlu dijadikan pijakan bagi Kota Semarang dalam menentukan prioritas pembangunan jangka menengahnya. Tabel 8.2 merangkum konsistensi, keselarasan, dan sinergi antara prioritas pembangunan Nasional, Jawa Tengah, dan Kota Semarang. Karena prioritas nasional yang pertama adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, sedangkan prioritas Provinsi Jateng adalah percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka pemerintah Kota Semarang menetapkan prioritas pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Prioritas pembangunan Kota Semarang yang kedua adalah penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Prioritas pembangunan nasional ketiga yang menekankan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja telah dijabarkan dengan prioritas yang senada oleh Pemprov Jateng dan Kota Semarang. Pemprov Jateng memprioritaskan “peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan”. Kota Semarang memprioritaskan “penguatan daya saing ekonomi daerah” sebagai prioritas pembangunan keempat.

Prioritas pembangunan nasional keempat yang menekankan “ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup” telah dijabarkan dengan prioritas yang senada oleh Pemprov Jateng dan Kota Semarang. Pemprov Jateng memprioritaskan “peningkatan kualitas hidup dan kualitas SDM”. Kota Semarang memprioritaskan “pembangunan infrastruktur kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan” sebagai prioritas pembangunan ketiga.

Prioritas pembangunan nasional kelima yang menekankan “stabilitas pertahanan dan keamanan” telah dijabarkan dengan prioritas yang senada oleh Pemprov Jateng dan Kota Semarang. Pemprov Jateng memprioritaskan “tata kelola pemerintahan”. Kota Semarang memprioritaskan “peningkatan tata kelola pemerintahan”.



Tabel 8.2

Sinergi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Tengah, dan Kota Semarang

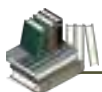
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Semarang
		
1 Pembangunan Manusia & Pengentasan Kemiskinan	1 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & Pengangguran	1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2 Konektivitas & Pemerataan	2 Peningkatan Kualitas Hidup & Kapasitas SDM	2 Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
3 Nilai Tambah Ekonomi & Kesempatan Kerja	3 Peningkatan Kapasitas & Daya Saing Ekonomi Rakyat secara Berkelanjutan	3 Pembangunan Infrastruktur Kota yang Tangguh, Produktif, & Berkelanjutan
4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, & Lingkungan Hidup	4 Reformasi Birokrasi	4 Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah
5 Stabilitas Pertahanan & Keamanan	5 Tata Kelola Pemerintahan	5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

8.1.2 Visi Kota Semarang

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Pemerintah Kota Semarang bersama dengan para pemangku kepentingan berkomitmen dan bercita-cita untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini digambarkan secara ringkas dalam visi pembangunan Kota Semarang untuk jangka panjang maupun menengah (lihat Tabel 8.3).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 ditetapkan visi Kota Semarang adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya”. Kota Metropolitan,



mengandung arti kota yang berpenduduk lebih besar dari 1.250.000 jiwa. Kota metropolitan di Indonesia adalah DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang harus menyediakan sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan *hinterland*-nya dengan aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, serta industri, dan didukung sektor ekonomi lainnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Metropolitan juga mengandung makna dapat menjamin kehidupan masyarakatnya yang aman, tenteram, lancar, asri, sehat, dan berkelanjutan.

Tabel 8.3 Perubahan Visi Kota Semarang Sejak Tahun 2005

RPJPD/RPJMD	Visi
1. RPJPD 2005-2025	Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib, dan Berbudaya .
2. RPJMD 2010-2015	Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera.
3. RPJMD 2016-2021	Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.
4. RPJMD 2021-2026	Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber- <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> .

Sumber: Dirangkum dari RPJPD 2005-2025; RPJMD 2010-2015; RPJMD 2016-2021; RPJMD 2021-2026 Kota Semarang

Kata “**Religius**”, mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sekaligus diperlukan tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

Tertib, mempunyai arti bahwa setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan serta



kemasyarakatan yang teratur dan pasti. Selain itu, perlu senantiasa berpedoman pada sistem ketentuan perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju.

Berbudaya, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Ini perlu diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2005 hingga tahun 2025, Kota Semarang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan perkembangan yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial, serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga terwujud kehidupan pemerintahan serta kemasyarakatan yang teratur, sejahtera, dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama yang berupa perdagangan, jasa, serta industri, dan ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota serta daerah *hinterland*-nya dengan aman, tenteram, nyaman, lancar, asri, sehat, dan berkelanjutan.

Berdasarkan RPJPD 2005-2025 tersebut, disusunlah tahapan RPJMD yang disesuaikan dengan potensi ekonomi, masalah mendasar, dan isu strategik yang dihadapi agar visi jangka panjang pembangunan Kota Semarang dapat terwujud. Pada **RPJMD 2010-2015 dan RPJMD 2016-2021**, visi pemerintah Kota Semarang fokus untuk mewujudkan “Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang dapat menyejahterakan masyarakat”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan



akan menjadi kota yang andal dan maju dalam perdagangan serta jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, serta budaya.

Kota Perdagangan dan Jasa, mengandung arti bahwa Kota Semarang akan memfokuskan sebagai kota perdagangan serta jasa yang hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. **Semarang yang Hebat** dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi perdagangan dan jasa terhadap PDRB serta kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun. Hal-hal tersebut didukung oleh adanya tata kelola birokrasi yang baik yang dilihat melalui peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan Kota Semarang yang “Hebat” ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta penurunan angka kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Penjabaran visi RPJMD 2016-2021 adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan, dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah.

Dalam RPJMD 2021-2026, visi pembangunan Kota Semarang juga memperhatikan visi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum



dalam RPJMN tahun 2020-2024. Selain itu, visi pembangunan Kota Semarang juga diselaraskan dengan visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Semarang tahun 2005-2025. **Visi pembangunan Kota Semarang tahun 2021-2026** berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-*Bhinneka Tunggal Ika*”.

Makna dari visi tersebut adalah **Kota Semarang yang hebat** akan menjadi semakin hebat ke depannya. **Semakin hebat**, mengandung arti bahwa Kota Semarang melalui semangat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota akan menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti bahwa Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan telah dapat menyelesaikan isu-isu strategik kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kontribusi perdagangan, jasa, serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, mengatasi masalah rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tabel 8.4 menunjukkan peranan sektor utama Kota Semarang cenderung meningkat selama tahun 2007-2021 dengan sektor penyumbang PDRB terbesar adalah industri pengolahan (27-29%), diikuti oleh konstruksi (26-27%), perdagangan (13-14%), dan jasa keuangan-asuransi, pendidikan, dan lain-lain (10-12%). Tataran **semakin hebat** dapat dimaknai bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Semarang akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi, serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan.



Tabel 8.4

Distribusi PDRB Kota Semarang Berdasarkan Lapangan Usaha (%)

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	0,88	0,85	0,81	0,85	0,84
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	0,18	0,17	0,18	0,19	0,18
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	27,62	27,24	27,46	28,62	28,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
F	Konstruksi/Construction	26,58	26,87	26,88	26,00	27,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	13,81	13,74	13,62	13,52	13,46
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	3,77	3,84	3,94	2,35	2,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & Food Service Activities	3,42	3,44	3,34	2,78	2,77
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	7,39	7,59	7,85	9,58	9,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	4,46	4,37	4,20	4,32	4,24
L	Real Estate/Real Estate Activities	2,88	2,86	2,81	2,86	2,77
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,67	0,71	0,74	0,70	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	3,29	3,15	3,04	3,06	2,83
P	Jasa Pendidikan/Education	2,86	2,91	2,91	2,85	2,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	0,82	0,88	0,83	0,97	0,90
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	1,19	1,20	1,21	1,06	0,99
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Semarang (2022)

Untuk mencapai kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan **berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika** agar Kota Semarang menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat, yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kota Semarang yang penduduknya berjumlah 1.544.358 jiwa pada tahun 2014 dengan mayoritas memeluk agama Islam 1.288.502 jiwa (83,43%), agama Katolik 114.857 jiwa (7,43%), agama Kristen Protestan 109.707 jiwa (7,10%), agama Buddha 18.496 jiwa (1,20%), agama Hindu 10.537 jiwa (0,68%), dan agama Konghucu 2.259 jiwa (0,15%). Tabel 8.5 menunjukkan jumlah penduduk Kota Semarang meningkat menjadi 1,686 juta jiwa dengan mayoritas beragama Islam (87,2%), diikuti Protestan (6,9%), Katolik (5,1%), Buddha (0,6%), agama Hindu (0,1%). Sebaran penduduk per kecamatan dan berdasarkan agama juga amat bervariasi. Tidak berlebihan bila Pemda Kota Semarang ingin membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang **ber-Bhinneka Tunggal Ika**.



Tabel 8.5

Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Agama dan Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Lainnya	Total Penduduk
Mijen	72.333	10.009	7.248	64	3.332	56	93.042
Gunungpati	92.947	11.017	6.862	44	1.701	32	112.603
Banyumanik	122.294	11.069	6.761	184	1.730	67	142.105
Gajahmungkur	49.914	4.247	2.427	53	253	19	56.913
Semarang Selatan	57.007	3.042	1.537	41	119	19	61.765
Candisari	68.249	16.642	10.621	84	975	27	96.598
Tembalang	166.567	5.423	5.223	238	297	19	177.767
Pedurungan	167.167	5.005	5.986	136	234	30	178.558
Genuk	114.973	4.426	4.461	20	284	26	124.190
Gayamsari	66.591	10.398	7.329	14	257	16	84.605
Semarang Timur	52.634	9.472	9.977	8	347	23	72.461
Semarang Utara	104.653	1.865	1.309	31	96	24	107.978
Semarang Tengah	40.331	14.738	10.246	34	1.054	19	66.422
Semarang Barat	131.211	2.904	1.425	152	55	27	135.774
Tugu	33.026	5.932	4.370	8	106	8	43.450
Ngaliyan	130.545	555	384	125	54	15	131.678
Jumlah penduduk Semarang	1.470.442	116.744	86.166	1.236	10.894	427	1.685.909
% penduduk menurut agama	87,2	6,9	5,1	0,1	0,6	0,0	100

Sumber: BPS Kota Semarang (2021)

8.2 PERUBAHAN MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Semarang yang terdapat dalam RPJMD maka dirumuskanlah misi pembangunan daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 8.6, yang menunjukkan perubahan misi pembangunan akibat perubahan visi dan prioritas pembangunan daerah. Adanya beberapa persamaan visi pada beberapa tahapan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, berimplikasi pada keberlanjutan misi dari setiap tahapan pembangunan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pembangunan.

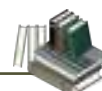


Pada RPJMD 2021-2026, untuk mewujudkan misi pertama pemerintah Kota Semarang akan memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil, serta semangat pembangunan kepemudaan.

Tabel 8.6 Perubahan Misi Kota Semarang

RPJMD	Misi
RPJMD 2010-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. 2. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
RPJMD 2016-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. 2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin andal untuk meningkatkan pelayanan publik. 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan. 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.
RPJMD 2021-2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset serta Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila. 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial, serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat secara Berkeadilan. 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota. 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber: Dirangkum dari RPJMD 2010-2015, RPJMD 2016-2021, RPJMD 2021-2026



Misi kedua diwujudkan dengan meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah, serta dukungan dalam kemitraan usaha. Kota Semarang yang menjadi juara umum pemenang Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Prestasi ini diserahkan oleh Plh Sekda Jateng Prasetyo Aribowo mewakili Gubernur Ganjar Pranowo, dalam acara Penyerahan Penghargaan Krenova dan IDSD di Gradhika Bhakti Praja kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang (Pemprov Jateng, 25/11/2020).

Misi ketiga dicapai dengan cara meningkatkan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Semarang, pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dengan menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan ibadah, perwujudan Kota Religius, seperti yang tercantum dalam dokumen RPJPD diharapkan akan tercapai.

Misi keempat dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Ini dilakukan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.

Misi kelima dilakukan dengan cara memantapkan reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang “Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024” secara terperinci menjabarkan bentuk operasional *grand*



design reformasi birokrasi mencakup seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dirangkum pada Tabel 8.7. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 8.8.

Berdasarkan uraian misi RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026, kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan produktif.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat dan kehidupan masyarakat yang berbudaya serta berkualitas.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas dengan mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Tabel 8.7 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

AREA	HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Per-UU-an	Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
SDM Aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi
Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha
Pola Pikir & Budaya Kerja Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (sesuaikan dengan bahasa budaya kerja)

Sumber: Perwali Semarang Nomor 66 Tahun 2020



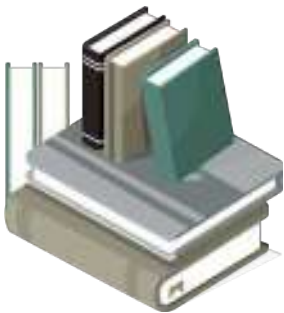
Tabel 8.8

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Stn	Target					
				Kondisi Awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang berkualitas	Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Indeks RB	Indeks	69,46	70,00	72,00	73,00	75,00	80,20
		Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	Skor	B (67,92)	BB (>70,00)	BB (>72,00)	BB (73,00)	BB (75,00)	A (80,20)
	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	Prangkat Daerah yang merah predikat WBK	Jumlah Perangda/ Unit	3	6	10	14	18	25
		Indeks Komposit Efektivitas Kelembagaan	Skor	NA	44	45	46	47	48
		Indeks SPBE	Skor	NA	2,76	2,88	3,00	3,12	3,24
	Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	78,42	80,1	82,15	84,3	86,45	88,65
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	83,81	85,00	87,00	87,50	88,00

Sumber: Perwali Semarang Nomor 66 Tahun 2020, Tabel 3.5





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

BAB 9

STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG



Bab 9 akan menguraikan bagaimana strategi perubahan yang dibutuhkan Kota Semarang agar tetap bertahan dalam menghadapi konsep *new normal* di tengah pandemi virus Covid-19? Pandemi ini membuat segala aktivitas menjadi terbatas sehingga Kota Semarang mau tidak mau harus menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat dan provinsi. Subbab 9.1 akan menguraikan bagaimana arah kebijakan pemerintah, BI, dan OJK. Manajemen perubahan menjadi suatu kebutuhan dan keniscayaan, termasuk bagaimana Kota Semarang mengubah tema pembangunan, prioritas pembangunan, dan melakukan perubahan strategi pembangunan?

9.1 ARAH KEBIJAKAN

Bagaimana dampak Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia? Sejak Covid-19 mulai menjalar Januari 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 merosot menjadi 2,97% (yoy), bahkan sudah negatif 2,41% (qtq) dibanding kuartal 4 tahun 2019. Padahal sejak Presiden Jokowi memerintah Oktober 2014, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sekitar 5% (Kuncoro, 2020). Pada triwulan 2 tahun 2020, Menteri Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan makin merosot hingga minus 3,8%. Tanda ekonomi Indonesia memasuki resesi mulai terlihat. Ada beberapa penyebab

kontraksi di triwulan 1 dan 2 tahun ini. Pertama, tekanan besar perekonomian di hampir semua sektor lantaran kinerjanya lesu sejak Januari 2020. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya penerimaan negara dari pajak yang berkontraksi 10,8% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu dengan realisasi sebesar Rp444,6 triliun.

Kedua, mana sektor yang paling terpukul akibat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2020 yang -2,41%? Sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi adalah jasa pendidikan (-10,4%), diikuti administrasi pemerintahan-pertahanan-jaminan sosial wajib (-8,5%), konstruksi (-6,9%), transportasi dan pergudangan (-6,4%), pengadaan listrik dan gas (-5,7%), penyediaan akomodasi dan makan minum (-3,5%), serta pertambangan dan penggalian (-0,8%). Sebaliknya, sektor yang tumbuh tinggi di tengah pandemi adalah pertanian-kehutanan-perikanan (9,5%), diikuti jasa keuangan & asuransi (5,3%), serta informasi & komunikasi (3%).

Ketiga, jumlah penduduk miskin meningkat pascapandemi. Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2020 sebesar 9,78%, dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 menjadi 26,42 juta orang. Artinya, ini meningkat 1,63 juta orang dibandingkan September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019 (Beritasatu, 17/7/20/20). Di sisi lain, masih ada disparitas kemiskinan yang cukup tinggi antara kota dan desa. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38%, sedangkan di daerah perdesaan 12,82%. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan melonjak sebanyak 1,3 juta orang menjadi 11,16 juta orang. Sementara itu, daerah perdesaan meningkat sebanyak 333.900 orang menjadi 15,26 juta orang. Persebaran Covid-19 saat ini terpusat di wilayah perkotaan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dll.) justru menyebabkan potensi peningkatan kemiskinan lebih besar terjadi di perkotaan.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin mencerminkan ODP (*Ora Duwe Penghasilan* alias Tidak Punya Penghasilan) dan PDP (Positif Dadi Pengangguran) (Kuncoro, 2020). Diberlakukannya PSBP (Pembatasan



Sosial Berskala Besar) telah memukul sektor riil, khususnya di sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Kebijakan *lockdown* mandiri di banyak kabupaten/kota, bahkan kampung, membuat pedagang kecil, warung angkringan, pengemudi gojek/grab/taksi, benar-benar anjlok penghasilan, bahkan tidak punya penghasilan. Hotel, *homestay*, resto, industri mulai mengurangi jumlah karyawan, merumahkan sebagian karyawan, bahkan tidak sedikit yang mem-PHK karyawannya. Tidak hanya kemiskinan naik, tetapi pengangguran diperkirakan akan melonjak dari sekitar empat hingga sembilan juta penganggur.

Presiden Jokowi menyatakan, “Sampai ditemukan vaksin yang efektif, masyarakat dunia harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan” (CNBC Indonesia, 2020). Ini sejalan dengan WHO yang menyatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Mengapa? Karena ada potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. Berdampingan bukan berarti menyerah, tetapi menyesuaikan diri.

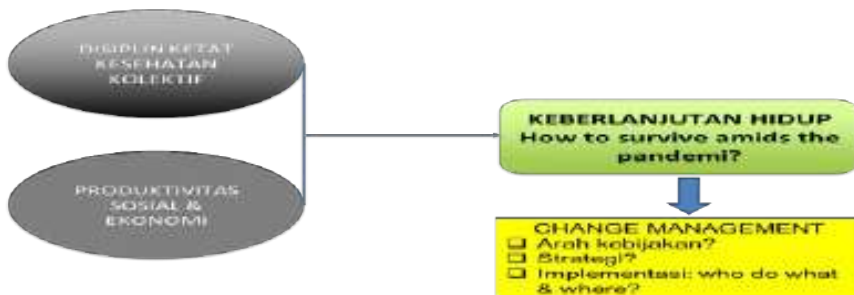
Indonesia beruntung karena sejak awal pemerintah memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan karantina wilayah (*lockdown*). Seperti diketahui, PSBB adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau di fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antarorang. Supaya era normal baru (*new normal*) dapat segera mulai, Presiden Jokowi ingin agar roda perekonomian tetap berjalan dan produktivitas sosial terus berlangsung, masyarakat harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan secara kolektif (lihat Gambar 9.1). Dengan kata lain, silakan beraktivitas ekonomi dan sosial secara terbatas, tetapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan. Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan warga, serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur.

Kedadaan *new normal* merupakan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 Pertama, banyak orang pusing gara-gara



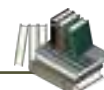
virus corona yang sudah menyebar di 34 provinsi, 496 kabupaten/kota, dengan 84.882 positif terkena virus dan 4.016 meninggal (<https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-18-juli-2020>, 18 Juli 2020). Risiko tertular virus ini bisa di mana-mana, di KRL, mal, naik pesawat udara, pasar, restoran, *gym*, hotel, dan lain-lain tempat di mana banyak orang berkerumun atau bersenggolan. Bagi yang suka bepergian, minimal harus memiliki surat sehat atau hasil rapid/*test* PCR, belum lagi mengurus SIKM (Surat Izin Keluar Masuk), surat domisili, dan surat tugas. Repot dan bikin pusing, baik mengurus berbagai surat serta tes maupun biayanya. Itulah kebiasaan baru yang tidak ada sebelum virus dari Wuhan itu merebak. Padahal mobilitas manusia antarkota, antarprovinsi, antarpulau, bahkan antarnegara sudah demikian tingginya sebelum Covid-19 ini menyebar ke 216 negara dan menjangkiti 13.824.739 orang di planet ini.

Gambar 9.1 *New Normal dan Perlu nya Change Management*



Sumber: Dimodifikasi dari M. Fadjroel Rachman (juru bicara Presiden Jokowi)(2020)

Oleh karena itu, tepat sekali tema pembangunan nasional tahun 2021 adalah “Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial”. Pemda Provinsi Jawa Tengah menetapkan tema pembangunan tahun 2021 adalah “Percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing SDM”. Sementara itu, Pemda Kota Semarang menetapkan tema pembangunan tahun 2021 adalah “Perwujudan Semarang Hebat dengan penekanan pada pemulihan ekonomi”. Gambar 9.2 merangkum keselarasan tema pembangunan nasional, provinsi, dan Kota Semarang.



Gambar 9.2

Tema Pembangunan Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

Untuk mempercepat kebangkitan ekonomi nasional dan daerah di fase pandemi, disarankan menerapkan strategi **COVID** (Kuncoro, 2020). Pertama, **Change** bahwa pengusaha, rakyat, dan pemerintah Indonesia harus mengubah strategi berusaha, relokasi anggaran, serta strategi bertahan di tengah pandemi. Respons kebijakan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan sejumlah paket kebijakan stimulus ekonomi (lihat Gambar 9.3) perlu diapresiasi dan didukung oleh semua *stakeholders*. Menteri Keuangan mengumumkan percepatan belanja dan kebijakan mendorong proyek padat karya, stimulus belanja dengan perluasan kartu sembako serta subsidi bunga perumahan bagi masyarakat, dan bantuan kartu prakerja, serta kebijakan fiskal dan nonfiskal yang penting untuk menopang aktivitas industri termasuk pembebasan pajak penghasilan untuk pekerja. Gubernur BI mengumumkan penurunan suku bunga BI7DDR pada Februari dan Maret masing-masing sebesar 25 bps, meningkatkan intensitas *triple intervention* di pasar spot, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas bank umum konvensional dari semula 8% menjadi 4%, memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari untuk memperkuat

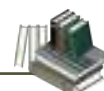


pelonggaran likuiditas rupiah serta menambah frekuensi lelang FX Swap menjadi setiap hari untuk memastikan kecukupan likuiditas, melonggarkan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan menyediakan uang higienis. OJK juga telah menelurkan kebijakan restrukturisasi kredit, menjaga fundamental usaha sektor riil, dan menjaga stabilitas pasar keuangan.

Gambar 9.3 Respons Kebijakan Pemerintah, BI, dan OJK



Kedua, **Offer more**, yaitu tawarkan lebih banyak masker, *hand sanitizer*, Alat Pelindung Diri (APD), uji rapid/PCR dengan biaya terjangkau. Mari kita beri order produk-produk tersebut kepada para produsen, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), BUMN/BUMD, serta koperasi yang mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan rakyat di kala pandemi. Saatnya mencanangkan bela dan beli produk *made in Indonesia*, serta stop impor barang yang sudah bisa diproduksi oleh anak bangsa.



Ketiga, **Vary**, yaitu perbanyak diversifikasi produk dan jasa yang dilakukan di kala pandemi. Adaptasi baru untuk bisnis makanan dan restoran perlu dilakukan. Bagi mahasiswa dan dosen, *Study From Home* (SFH) dan *Work From Home* (WFH) menyebabkan pembelian pulsa serta data internet melonjak. Akibatnya, sektor informasi & komunikasi dapat tumbuh 3% di tengah pandemi. Alangkah indahnya, bila perusahaan komunikasi dari Telkom, Indosat, dan lain-lain memberikan paket murah bagi dosen, guru, serta mahasiswa. Subsidi pulsa/internet bagi siswa/mahasiswa yang orang tuanya terpapar Covid-19 atau menjadi ODP/PDP akan sangat membantu mereka tetap belajar dan bekerja.

Keempat, **Improve** atau memperbaiki kinerja perusahaan atau organisasi menjadi tantangan di tengah pandemi. Kunci suksesnya, kenali struktur biaya perusahaan/organisasinya. Mana yang bisa dihemat agar efisien? Apakah proses produksi/bisnis yang harus diubah agar efektif dan lebih optimal?

Kelima, **Do it now and fast**. Kerjakan semua rencana perubahan sejak sekarang dengan cepat. Realisasi belanja negara dikabarkan baru mencapai Rp843,9 triliun dari total target APBN sesuai Perpres 72/2020 sebesar Rp2.739 triliun. Total anggaran perlindungan sosial yang sudah didistribusikan pemerintah baru mencapai 34,1% dari total anggaran. Realisasi anggaran kesehatan bahkan baru hanya sekitar 4,68% dari total pagu anggaran Rp87,55 triliun. Rendahnya realisasi anggaran kesehatan ini disebabkan adanya kendala teknis, seperti keterlambatan pengajuan klaim, verifikasi tenaga kesehatan, dan kendala administrasi lainnya.

Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, mempersiapkan tiga langkah dalam atasi dampak pandemi corona bagi perekonomian Jateng (CNBC Indonesia, 2020; Kuncoro *et al.*, 2021). Pertama, menetapkan **tanggap darurat** lewat *refocusing* anggaran untuk menjaga daya tahan ekonomi rakyat. Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,09 triliun untuk penanganan Covid-19, yang terbagi atas: Rp1,32 miliar untuk jaring pengaman sosial, Rp183,5 miliar untuk jaring



pengaman ekonomi, dan Rp68,5 miliar bantuan keuangan desa agar desa kuat serta percaya diri, untuk fasilitas kesehatan sebesar Rp425,14 miliar, pengembalian pekerja migran Indonesia Rp16,09 miliar, dan operasional sebesar Rp1,65 miliar (Kompas.com, 12/05/2020).

Kedua, masa transisi hingga Desember 2020, yang dimaksudkan untuk kembali menggeliatkan ekonomi. Pemprov Jateng melakukan penyiapan anggaran seefektif mungkin untuk **menyelamatkan UMKM dan kebutuhan sosial masyarakat**. Usaha Mikro Kecil (UMK) di Jateng mendominasi dari sisi unit usaha (98,98%) dan penyerapan tenaga kerja (80,83%)(lihat kembali Gambar 3.7 di Bab 3). Peran UMKM amat besar sehingga Pemprov Jateng berupaya menerapkan beberapa strategi agar UMKM mampu kembali bangkit. Di antaranya pendampingan pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi, pemulihan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan, menggenjot pembangunan kawasan industri, dan mendorong pembangunan infrastruktur yang merata.

Ketiga, *recovery* ekonomi tahun 2021, di mana **APBD akan diarahkan untuk mendorong ekonomi agar bisa pulih dan bangkit kembali** dengan cepat. Sebenarnya yang paling prinsip adalah anggaran dari pusat maupun daerah agar diarahkan untuk mempercepat mengakselerasi menggeliatnya ekonomi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan akan memprioritaskan pemulihan sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) serta pariwisata (WartaEkonomi, 2020). Pasalnya dua sektor itu yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Pemprov Jateng menggandeng Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk membahas: Kapan ekonomi Jateng bisa *reborn*? Apa yang harus dibuat?

Pandemi Covid-19 membutuhkan integrasi kebijakan ekonomi dan kesehatan dalam satu paket. Kelima strategi COVID amat dibutuhkan agar ODP dan PDP bisa mendapatkan penghasilan dan pekerjaan kembali. Itulah hakikat *new normal*, yang intinya bagaimana penghasilan dan semua pekerjaan normal kembali.



Pada hari pelantikannya sebagai Wali Kota Semarang periode 2021-2026, Hendrar Prihadi, atau biasa dipanggil Hendi, telah memaparkan manifesto rancangan pembangunan Kota Semarang. Hendi menamai manifestonya “**Un Tempo Prezioso**”, yang merupakan istilah dari bahasa Italia, yang berarti sebuah waktu yang sangat berharga. Hendi mencatat sejumlah problematika yang menjadi fokus prioritasnya untuk dicari solusi strategi kebijakan yang tepat. Dalam persoalan COVID-19, Hendi menekankan akan mengupayakan pemulihan ekonomi yang dibarengi dengan upaya penegakan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi (Detikjateng, 26/2022). Sementara itu, untuk peningkatan infrastruktur dalam menghadapi perubahan iklim, Kota Semarang akan fokus pada evaluasi penanganan banjir dan rehab rumah tidak layak huni.

Gambar 9.4 secara terperinci merangkum lima prioritas daerah Kota Semarang yang menjawab masalah dan isu strategik pascapandemi. **Pertama**, penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas dijadikan sebagai prioritas pertama untuk menjawab masalah masih perlunya pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif sekaligus isu strategik peningkatan daya saing ekonomi. **Kedua**, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. **Ketiga**, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. **Keempat**, penguatan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. **Kelima**, penguatan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan memperhatikan banyak aspek keberlanjutan dan risiko bencana.



Gambar 9.4**Keselarasan Prioritas Daerah dengan Isu Strategik Kota Semarang Tahun 2021**

NO	MASALAH	ISU STRATEGIS	PRIORITAS RKPD
1	Masih perlunya pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, terutama dampaknya terhadap sektor formal dan informal	Peningkatan daya saing ekonomi	P.1 Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas
2	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender, dan penyandang disabilitas, dengan memperhatikan dampak Covid-19 serta pola hidup baru.	Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM	P.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing
3	Masih terdapat penduduk yang tergolong miskin serta masih cukup tingginya angka pengangguran. Ditambah dengan adanya dampak Covid-19 yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran baru akibat berkurangnya kesempatan kerja karena adanya pembatasan sosial serta potensi resesi ekonomi nasional dan dunia.	Kemiskinan dan pengangguran	P.3 Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran
4	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, terutama untuk mengantisipasi pola hidup baru (new normal) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan	P.4 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah
5	Ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masih belum memadai yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan risiko bencana	Peningkatan Infrastruktur	P.5 Perkuatan Infrastruktur Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Dengan Memperhatikan Aspek Keberlanjutan dan Risiko Bencana

Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

Setidaknya ada lima prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2021. Gambar 9.5 menunjukkan prioritas pembangunan Kota Semarang meliputi: Pertama, penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi daerah untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Ketiga, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. Kelima, penguatan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek keberlanjutan serta risiko bencana.



Gambar 9.5

Lima Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

Kelima prioritas pembangunan Kota Semarang dituangkan dalam sejumlah strategi. Tabel 9.1 menunjukkan perubahan strategi pembangunan Kota Semarang dari periode 2010-2015, 2016-2020, dan 2021-2026.

Tabel 9.1 Perubahan Strategi Pembangunan Kota Semarang Tahun 2010-2026

RPJMD 2010-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2026
1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas	1. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan
2. Mewujudkan Pemerintah Kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi supremasi hukum	2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	2. Peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah	3. Pengembangan budaya lokal	3. Penguatan nilai budaya lokal
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan	4. Perluasan kesempatan kerja	4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	5. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	5. Peningkatan kualitas tenaga kerja



RPJMD 2010-2015	RPJMD 2016-2020	RPJMD 2021-2026
	6. Peningkatan Perlindungan Sosial	6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan
	7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	7. Penguatan perlindungan sosial
	8. Reformasi birokrasi	8. Pemberdayaan ekonomi lokal
	9. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	9. Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif
	10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban	10. Penguatan ketahanan pangan
	11. Peningkatan pengelolaan tata ruang	11. Peningkatan daya saing pariwisata
	12. Peningkatan kualitas infrastruktur kota	12. Peningkatan kinerja investasi
	13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	13. Peningkatan pemasaran produk daerah
	14. Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman	14. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
	15. Peningkatan ketangguhan bencana	15. Pengarusutamaan gender
	16. Peningkatan kemudahan berinvestasi	16. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
	17. Peningkatan jaringan distribusi produk	17. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	18. Peningkatan pengelolaan daya saing pariwisata	18. Pemerataan pembangunan infrastruktur kota
	19. Peningkatan ketahanan pangan	19. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
	20. Pengembangan ekonomi lokal	20. Peningkatan kualitas tata ruang
	21. Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro	21. Peningkatan ketangguhan bencana
		22. Peningkatan sistem transportasi
		23. Reformasi birokrasi
		24. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		25. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Dirangkum dari RPJMD 2010 -2015; 2016-2020; 2021-2026



Kota Semarang dinilai sukses dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19 di masa pandemi. Atas pencapaian tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi diminta menjadi sebagai salah satu pembicara dalam kegiatan Indo Smart City Forum dan Expo 2021. Bertempat di The Rich Jogja Hotel, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi, memaparkan konsep pembangunan sistem kota cerdas yang digagasnya (Pemerintah Kota Semarang, 13/10/2021).

Wali Kota Semarang menekankan bahwa inti pembangunan kota cerdas tidak melulu berorientasi pada pemutakhiran teknologi. Pembangunan sistem kota cerdas berfokus dalam peningkatan kemampuan pemerintah untuk dapat memahami persoalan masyarakat dan memberikan solusi. Di Semarang, kota cerdas tidak hanya tentang digitalisasi, tetapi cerdas dalam memahami persoalan masyarakat. Contohnya, dalam menghadapi pandemi diperlukan langkah yang tegas. Ketika wilayah kesehatan diserang, sistem kota cerdas harus mampu mengintegrasikan data ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara menyeluruh, juga termasuk tempat isolasi terpusat dari mulai tingkat kota hingga di balai-balai RW.

Pemanfaatan digitalisasi di Kota Semarang pun hanya bersifat sebagai pendukung saja. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan dapat mempercepat langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Contohnya, seperti berbagai layanan daring pada portal Semarangkota.go.id, yang di dalamnya masyarakat dapat memperoleh informasi terkait pelayanan publik mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, layanan pembayaran pajak, hingga informasi terkini mengenai Covid-19.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah dapat mengambil keputusan cepat terkait kebutuhan masyarakat yang didukung dengan kemajuan digitalisasi yang kini kian berkembang. Dari upayanya tersebut hasil yang diperoleh cukup baik. Meski masih



di level 2, angka kasus Covid-19 semakin hari semakin berkurang. Saat ini terdapat 21 pasien yang terkonfirmasi positif. Capaian vaksin tahap pertama ada di angka 103% dari target, tahap kedua ada di 75%, dan tahap ketiga untuk tenaga kesehatan pun over target. Pihaknya berharap dari berbagai upaya ini hasilnya akan dirasakan secara langsung dan dapat semakin menurunkan angka Covid-19 di Kota Semarang.

Di sisi lain, Hendi sebagai wali kota juga menegaskan bahwa pembangunan kota cerdas tidak harus mencontoh daerah lain karena setiap wilayah mempunyai tantangan dan karakteristik yang berbeda. Termasuk di Kota Semarang, Hendi mengaku juga tidak mencontoh *smart city* di Australia atau Singapura karena pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pembangunannya. Fokusnya pada apa yang dibutuhkan masyarakat, dengan tujuan memberikan solusi dan kemudahan. Konkretnya apa strategi yang diterapkan?

Pertama, strategi penanganan Covid-19 sebagaimana dirangkum dalam Gambar 9.6, yaitu: (1) penanganan pandemi; (2) *refocusing/* realokasi anggaran; (3) pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM); (4) Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); (5) PPKM skala Mikro. Strategi penanganan Covid-19 menunjukkan betapa seriusnya Kota Semarang menghadapi pandemi Covid-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi.



Gambar 9.6

Strategi Penanganan Covid-19



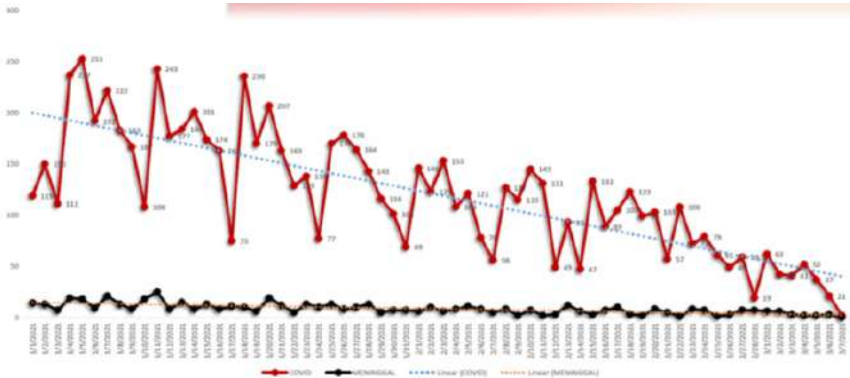
Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

Hasil dari strategi penanganan Covid-19 mampu menurunkan jumlah yang terkonfirmasi terkena COVID-19 dan korban meninggal secara drastis dari tahun 2020 hingga tahun 2022 (lihat Gambar 9.7). Tahun 2020 jumlah kasus positif mencapai 19.663 dengan jumlah korban meninggal 1.652 jiwa dan sembuh 18.011. Tahun 2021 jumlah kasus positif mencapai 69.536 dengan jumlah korban meninggal 4.848 jiwa dan sembuh 64.688. Tahun 2022 jumlah kasus positif mencapai 106.180 dengan jumlah korban meninggal turun drastis hingga hanya 309 jiwa dan sembuh 12.054.



Gambar 9.7

Jumlah dan Tren Penduduk Kota Semarang yang Terkonfirmasi Terkena Covid-19 dan Korban Meninggal



Sumber: Pemerintah Kota Semarang (2020; 2021; 2022)

Kedua, Pemkot Semarang pun terus berupaya menekan angka kemiskinan yang terus bertambah selama pandemi. Pada tahun 2019, angka kemiskinan di Kota Semarang sebesar 3,98%, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,34%, dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 4,56%. Warga usia produktif dan masuk ke dalam kategori prasejahtera didorong untuk mandiri melalui kegiatan kewirausahaan (Suara Merdeka, 2022). Masyarakat lanjut usia (lansia) didorong untuk melakukan kegiatan *charity*, seperti rehab rumah, PKH, baksos, dan lain-lain. Dalam pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kota Semarang selama ini juga telah melakukan berbagai upaya konkret dengan menjamin kehidupan sosial warga mulai dari lahir sampai meninggal. Pemkot Semarang berkomitmen untuk melepaskan kota ini dari kemiskinan, mulai dari bayi di dalam kandungan melalui Posyandu, mendapat kemudahan ambulans, dan persalinan gratis melalui UHC. Strategi penanganan kemiskinan dilakukan dengan bantuan sosial sebagaimana dirangkum dalam Gambar 9.8, yaitu: (1) pemberian paket sembako; dan (2) Kartu Semarang Hebat.



Gambar 9.8

Strategi Penanganan Kemiskinan Dilakukan dengan Bantuan Sosial



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

Gambar 9.9 menunjukkan setidaknya ada 25.602 penerima bantuan program sembako yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2020. Penerima bantuan program sembako terbanyak ada di Kecamatan Semarang Utara (2.682), diikuti Semarang Barat (2.673), dan Genuk (2.665). Kegiatan bantuan sosial terdampak Covid-19 berupa sembako melalui APBD Kota Semarang sampai bulan Agustus 2020 telah diberikan sebanyak 630.000 paket atau senilai Rp67,726 miliar (Dinas Sosial Kota Semarang, 21/9/2020). Dengan mempertimbangkan efisiensi, protokol kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal maka pemberian bantuan langsung berupa barang menjadi dalam bentuk uang melalui Kartu Bansos Semarang Hebat, senilai Rp100.000 per kartu.

Kartu Bansos Semarang Hebat tersebut selanjutnya harus dibelanjakan pada warung-warung di sekitar penerima manfaat dan diharapkan dapat menggulirkan ekonomi lokal. Kartu “Semarang Hebat” resmi diluncurkan Pemkot Semarang pada 17 Februari 2017 bertepatan dengan peringatan satu tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan wakilnya, Hevearita Gunaryanti Rahayu. Selain itu, Kartu “Semarang Hebat” juga dimaksudkan meminimalisasi



pungutan liar (pungli) dari oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya, untuk pembayaran berbagai jenis retribusi yang masuk kas daerah. Pada peluncuran perdana Kartu “Semarang Hebat” itu, dilakukan penyerahan kartu kepada perwakilan berbagai elemen masyarakat, seperti warga Rumah Susun Karangroto, warga rumah tidak layak huni, pedagang, dan pelajar. Pada kegiatan ini dibagikan 210 kartu Bansos Semarang Hebat bagi penerima manfaat di Kelurahan Panggung Lor dan 130.000 untuk masyarakat Kota Semarang secara bertahap.

Gambar 9.9 Data Penerima Bantuan Program Sembako per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2020

DATA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO/BPNT



Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang (2022)



Ketiga, strategi pemulihan UMKM saat pandemi dengan memberikan fasilitas akses permodalan dan relaksasi retribusi. Bagi masyarakat yang tergolong angkatan kerja, Pemerintah Kota Semarang memfasilitasi melalui Kredit Wibawa (Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Juara), memberikan pendampingan hingga pemasaran melalui *Semarang Creative Gallery*



Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, membagikan 500 paket sembako kepada buruh di Balai Kota. (Suaramerdeka, 7/4/2022).

(Suara Merdeka, 2022). Selain itu, sarana jejaring usaha, pemasaran *online*, fasilitas ruang karya, pendampingan kelembagaan, dan gelar karya produk unggulan disediakan. Tidak hanya itu, selama pandemi, nasib buruh di Kota Semarang juga menjadi perhatian khusus Pemkot Semarang. Guna membantu meringankan beban para pekerja dan buruh, Wali Kota Semarang, membagikan 500 paket sembako dari Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo). Sebanyak 500 paket sembako dibagikan kepada buruh dalam sebelas serikat pekerja yang ada di Kota Semarang. Isi sembakonya macam-macam, ada minyak, terigu, mi instan, dan lainnya, tetapi untuk isinya tidak semua sama. Karena ada 21 perusahaan di Kota Semarang yang berpartisipasi memberikan sembako. Strategi pemulihan UMKM saat pandemi dirangkum dalam Gambar 9.10, yaitu (1) fasilitasi akses permodalan & relaksasi distribusi; (2) sarana jejaring usaha; (3) fasilitasi ruang karya; dan (4) pendampingan kelembagaan/SDM. Pemerintah Kota Semarang menginisiasi program Kredit Wibawa yang saat ini menjadi kredit usaha dengan bunga termurah di Indonesia dengan bunganya hanya 3% per tahun; bahkan untuk pinjaman sampai dengan Rp5 juta tidak perlu ada agunannya.



Gambar 9.10 Strategi Pemulihan UMKM Saat Pandemi



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

Keempat, strategi pemulihan pariwisata saat pandemi dengan melakukan reaktivasi tempat wisata dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik untuk pengunjung maupun karyawan secara ketat serta memberikan hibah ke hotel dan restoran sesuai dengan keputusan Wali Kota Semarang Nomor: 978/1031 Tahun 2020 tentang penetapan daftar hotel serta restoran penerima hibah pariwisata beserta besaran dana yang dihibahkan. Strategi pemulihan pariwisata saat pandemi dirangkum dalam Gambar 9.11, yaitu: (1) reaktivasi tempat wisata; dan (2) pemberlakuan protokol kesehatan.



Gambar 9.11 Strategi Pemulihan Pariwisata Saat Pandemi



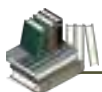
Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

Kelima, pemulihan investasi dalam masa pandemi dengan cara peningkatan investasi daerah melalui promosi investasi daerah, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Strategi pemulihan investasi saat pandemi dirangkum dalam Gambar 9.12, yaitu: (1) peningkatan realisasi investasi daerah; (2) peningkatan kualitas pelayanan perizinan; dan (3) peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Gambar 9.12 Strategi Pemulihan Investasi Saat Pandemi



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)



Keenam, strategi penguatan pangan dalam masa pandemi, serta yakni pendampingan masyarakat sektor pertanian dan peternakan, penguatan cadangan pangan, penguatan pendampingan masyarakat sektor perikanan. Strategi pemulihan investasi saat pandemi dirangkum dalam Gambar 9.13, yaitu penguatan ketahanan pangan dengan *urban farming*. Mewadahi para pegiat *urban farming* atau pertanian perkotaan, Pemerintah Kota Semarang meresmikan **Pasar Tani** yang akan digelar setiap hari minggu di Kota Lama Semarang. Gelaran pertama Pasar Tani dilakukan pada Minggu (Lenteratoday, 11/9/2022). Menyesuaikan dengan lokasi kegiatan, Pasar Tani di Kota Semarang diberi nama *Oude Stad Landbouwmart* yang dari bahasa Belanda memiliki arti Pasar Tani. Melalui Pasar Tani ini, petani perkotaan menunjukkan berbagai produk yang berhasil diproduksinya. Tujuan digelarnya Pasar Tani ini untuk menghimpun produk-produk dari *urban farming* yang ada di Kota Semarang. Ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan *urban farming*. Ketika *urban farming* sudah berkembang di permukiman, nah produknya mau ke mana, di sinilah sebenarnya produk itu dipasarkan.

Gambar 9.13 Penguatan Ketahanan Pangan



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)



BAB 10

PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG



Bab ini akan menjelaskan mengenai program inovasi daerah Kota Semarang. Inovasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat diefektifkan sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas. Informasi dan data yang digunakan bersumber dari RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021, RKPD Kota Semarang tahun 2020 dan 2021, serta dokumen inovasi daerah tahun 2020 hingga tahun 2021.

10.1 INOVASI PERENCANAAN

Inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah dilingkupi dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) agar ada sinergi dalam proses inovasi. Inovasi perencanaan daerah yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 10.1.

Tabel 10.1 Inovasi Perencanaan Daerah yang Telah Dilaksanakan

No.	Inovasi Perencanaan	Gambaran Inovasi
1	e-POKIR	e-POKIR merupakan sistem, di mana anggota DPRD memasukkan usulan dan dapat memantau perkembangan usulannya. Masyarakat yang mengusulkan Pokir ke DPRD juga dapat memantau.
2	<i>Live streaming</i> Musrenbang Tingkat Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kota Semarang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan videotron Pemerintah Kota Semarang.
3	Perencanaan berbasis spasial	Mengintegrasikan SIMPERDA dengan data spasial yang divisualisasikan dalam bentuk WebGIS.
4	Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Pemerintah Kota Semarang mengembangkan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan (SIMPERDA), penganggaran (SIMANGGARAN), serta evaluasi (SIMMONEV), dan sistem penatausahaan APBD.
5	Alokasi anggaran untuk fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, dialokasikan anggaran (<i>dedicated</i>) untuk melaksanakan hasil Musrenbang Kelurahan serta Kecamatan.
6	Keterbukaan informasi pada tempat publik	APBD dapat diakses secara terbuka secara <i>online</i> dan <i>offline</i> . Informasi dapat diakses di Pusat Informasi Publik (PIP).
7	Gerbang Hebat	Gerbang Hebat adalah kependekan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, dan Etos Bersama Masyarakat.
8	<i>Situation room</i>	<i>Situation room</i> digunakan untuk memantau situasi Kota Semarang.
9	Kampung Tematik	Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jati diri/ identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat.



No.	Inovasi Perencanaan	Gambaran Inovasi
10	<i>Smart City</i>	Untuk pengembangan menuju Kota Cerdas, telah disusun Rencana Induk Semarang Kota Cerdas yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan dan diakses pada portal smartcity, semarangkota.go.id.
11	SiPU (SIM Jalan)	Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan di Kota Semarang, dikembangkan SIM Jalan yang memuat data jalan dan historis pembangunan/rehabilitasi jalan yang ada.
12	SiPU (SIM Pedestrian Jalan)	Dikembangkan SIM Pedestrian yang memuat data visual, peta (spasial), dan data teknis.
13	Lapor Hendi	Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dikembangkan <i>complaint handling system</i> melalui Lapor Hendi.
14	<i>One Map</i> Semarang	<i>Website</i> yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang dapat diakses dan diunduh publik sebagai data spasial dasar.
15	Aplikasi Satu Data	Aplikasi yang akan menjadi sumber rujukan data penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang.

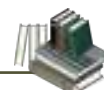
10.2 INOVASI PEMBANGUNAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga inovasi daerah menjadi bagian penting dari pembangunan. Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan inovasi pembangunan daerah meliputi cara berpikir strategik dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi inovasi daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah. Inovasi perencanaan daerah yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 10.2.



Tabel 10.2 Inovasi Pembangunan Daerah yang Telah Dilaksanakan

No.	Inovasi Pembangunan	Gambaran Inovasi
1	Ijus Melon	Ijus Melon merupakan Izin Usaha Mikro Melalui <i>Online</i> , yang dapat diurus dalam waktu empat menit.
2	Kredit Wibawa	Kredit Wibawa adalah kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara berupa kredit tanpa agunan untuk usaha mikro dengan bunga 3% per tahun.
3	<i>Call Center</i> 112	Warga Kota Semarang dapat menghubungi 112 untuk mendapatkan layanan ke darurat.
4	Kebijakan <i>cashless</i> pada layanan publik	Untuk mendukung terwujudnya <i>cashless society</i> maka dikembangkan Kartu Semarang Hebat yang bisa digunakan untuk transaksi nontunai dengan diskon. Pembayaran nontunai juga dikembangkan untuk bis Trans Semarang dengan berbagai vendor penyedia (OVO, GoPay, TCash, Yap!).
5	<i>Universal Health Coverage</i>	Memberikan jaminan kesehatan gratis rawat inap di Rumah Sakit kelas 3 bagi seluruh warga Kota Semarang.
6	Konsultasi Dokter Gratis	Konter adalah sistem pemberian informasi kesehatan secara gratis kepada masyarakat melalui telepon dan WhatsApp.
7	Ambulans dan Motor Hebat	Untuk kegawatdaruratan, warga Kota Semarang dapat mengakses layanan Ambulans Hebat dan Motor Hebat secara gratis.
8	<i>Co-Working Space</i> gratis	Untuk memfasilitasi komunitas dan pengembangan ekonomi kreatif, dikembangkan Semarang Digital Kreatif (SDK) yang merupakan <i>co-working space</i> .
9	Integrasi CCTV sampai ke RT	Pengadaan dan pemasangan satu CCTV untuk 1 RT di seluruh wilayah Kota Semarang.
10	1 (<i>one</i>) klik investasi	Sistem simulasi perizinan berbasis spasial mandiri tanpa harus hadir ke OPD terkait.
11	Lek Paijo (Layanan Elektronik Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Jaringan <i>Online</i>)	Aplikasi cetak mandiri Salinan PBB, BPHTB, serta tanda lunas PBB.
12	LAYANAN SIAGA (SIAP KAWAL KELUARGA)	Layanan SIAGA merupakan layanan Gratis yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terintegrasi dengan Puskesmas dan <i>Call Center</i> 1500-132 dengan Aplikasi PERIKSA-IN (Pelayanan Risiko Kesehatan Intervensi).
13	PUSTAKA (Puskesmas Tanpa Antrean)	Fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk berobat ke Puskesmas tanpa harus menunggu antrean dengan mendaftar melalui SMS/WA ke Nomor Puskesmas yang dituju, Pasien selanjutnya akan mendapatkan nomor antrean dan jam kedatangan.
14	GIAT (GERAKAN IBU ANAK SEHAT)	Upaya bergerak bersama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu serta anak, dengan melibatkan: (1) Masyarakat; (2) Organisasi Profesi; (3) Puskesmas; (4) Rumah Sakit; dan (5) Lintas Sektor/Swasta.
15	KOMUKKU (Komunikasi Kesehatan Ibu)	Upaya promotif dan preventif penurunan Kematian Ibu di Kota Semarang melalui Teknologi Informasi, yang terdiri dari: (1) Aplikasi Sayang Bunda; (2) Jawil Bumil/Bufas dengan WhatsApp; (3) Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/Nifas melalui media sosial Instagram dan YouTube.
16	Si Lampah	Pelaporan masyarakat khususnya mengenai sampah yang terjadi di lokasi sekitar masyarakat yang melapor, dengan aplikasi yang memanfaatkan <i>geo tagging</i> yang melekat dalam <i>smartphone</i> .
17	LEGO Digital	Legalisasi <i>Online Digital</i> Dokumen Kependudukan.



No.	Inovasi Pembangunan	Gambaran Inovasi
18	Lumpia (Layanan Urus Mandiri Paket Integrasi Administrasi Kependudukan) Dukcapil	Penyelenggaraan layanan pengurusan, penerbitan, dan digitalisasi dokumen kependudukan dengan sistem paket (satu kali pengurusan, mendapatkan 2, 3, atau 4 dokumen terkait).
19	Klinik "APEL" (Anak, Perempuan, dan Lansia)	Implementasi pendekatan <i>Whole of Government</i> (WoG), di mana fungsi-fungsi pelayanan diintegrasikan satu atap.
20	"Si Kingkong"	Solusi Kesenambungan Asuhan Pasien Pascaratap Inap dan Percepatan Pelayanan Pasien Rawat Jalan.
21	JEMPOL TIGER JAPRI (Jemput Bola Tim Gerak Kerja Cepat dan Responsif)	Penyelenggaraan layanan adminduk berbasis JEMPUT BOLA kepada penduduk berkebutuhan khusus (difabel, panti jompo, panti sosial, dan orang sakit).
22	Sistem Informasi Geografis Lampu Jalan (PJU)	Inventarisasi dan pemantauan aset titik lampu serta KWH meter PJU di Kota Semarang.
23	Lapor PJU	Pengaduan lampu jalan di lingkungan masyarakat dan jalan protokol serta ditindaklanjuti dengan SOP 2 hari kalender.
24	KB Perusahaan	Pelayanan KB kepada buruh pabrik tanpa meninggalkan tempat kerja.
25	KB Online	Memberikan informasi pelayanan KB melalui media <i>online</i> .
26	Puskesmas 5G	Layanan puskesmas yang Gak Ribet (buka sampai sore), Gak Antre (dengan layanan PUSTAKA), Gesit (<i>paperless</i>), Gratis (bagi masyarakat dengan KTP Kota Semarang), dan <i>Go Cashless</i> (bayar menggunakan Go Pay).
27	Si Imut	Pengurusan perizinan secara <i>online</i> melalui aplikasi Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (Si Imut) dengan 29 layanan.
28	<i>Pilot Project</i> Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin)	Inisiatif pengembangan energi angin untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 4 kWp yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
29	Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Landfill Gass	Proses pemanfaatan gas metana yang dihasilkan oleh sampah di TPA Jatibarang menjadi energi listrik dengan kapasitas produksi 0,8 MW yang dibeli oleh PT PLN.
30	<i>Converter Kit</i> CNG untuk Bus Trans Semarang	Pemasangan <i>converter kit</i> yang bisa menjadikan bahan bakar bus menjadi <i>hybrid</i> yang mengatur komposisi bahan bakar 70% CNG dan 30% solar yang lebih rendah emisi.
31	SAN PIISAN (SAyaNGi dan damPingi Ibu dan Anak Kota SemaraRANG)	Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Stunting di Kota Semarang melalui keterlibatan masyarakat, pengusaha dan Rumah Sakit, yang terintegrasi dengan inovasi kesehatan lainnya (Ambulans HEBAT, UHC, Jampersal), serta Aplikasi Sayang Bunda, Jawil Bumil/Bufas dengan WhatsApp, Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/Nifas melalui media sosial Instagram dan YouTube.
32	<i>Smart Lighting</i>	Inovasi untuk mengatur penggunaan lampu PJU melalui sistem informasi.
33	Pemasangan panel surya di instansi Pemerintah Kota	Inisiatif untuk menggunakan panel surya sebagai sumber tenaga listrik.
34	Kawasan kuliner Jalan Depok	Pengembangan Kawasan di Jalan Depok sebagai lokasi kuliner di malam hari.
35	e-retribusi PKL dan Pedagang Pasar	Pembayaran retribusi jasa pada pedagang di pasar dan PKL yang terdaftar melalui nontunai.
36	Ijus Melon jilid 2 (Integrasi Jaringan Usaha Mikro Melalui <i>Online</i>)	Pengembangan dari Ijus Melon (Izin Usaha Mikro Melalui <i>Online</i>) yang sudah ada menjadi Ijus Melon 2 (Integrasi Jaringan Usaha Mikro Melalui <i>Online</i>) yang merupakan sistem untuk mengintegrasikan data UMKM untuk kepentingan pemberdayaan UMKM.



10.3 INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pada era globalisasi dan otonomi daerah, peranan inovasi daerah sangat penting dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah juga menjadi tumpuan untuk mendongkrak daya saing daerah, terutama dalam kompetisi global, perluasan jejaring, pengelolaan sumber daya manusia yang kolaboratif, dan menggiring perubahan kepada ekonomi berbasis pengetahuan sehingga pada akhirnya inovasi daerah yang dilakukan Kota Semarang akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim pelayanan publik yang ramah, cepat, mudah, akurat, bersih, dan transparan.

Kota Semarang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, saat ini telah melakukan upaya kebijakan inovasi yang mengintegrasikan teknologi informasi serta komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga memperbaiki alur sistem yang dapat memudahkan pelayanan masyarakat, tetapi tidak mengurangi kualitas dan hasil pekerjaan dengan cara memangkas jalur birokrasi serta tahapan-tahapan yang ada di dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah inovasi kebijakan pembangunan daerah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang.

1. Si Pariem. Inovasi ini dilakukan untuk mengubah pembayaran tunai menjadi nontunai dan terintegrasi dengan data perizinan pedagang yang ada di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Bentuknya adalah penggunaan *e-money* untuk pembayaran retribusi pedagang setiap harinya. Pedagang membayar menggunakan kartu yang kemudian dibayarkan menggunakan EDC yang disediakan oleh petugas di lapangan.
2. SEMARISK. SEMARISK adalah Sistem informasi kebencanaan berbasis web dan android yang merupakan bagian dari manajemen



bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat agar siap siaga terhadap situasi dan waktu yang tepat berdasarkan informasi dari EWS secara *online*. SEMARISK berfungsi: Pertama, sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang tertuang di dalam dokumen RENKON, di mana sistem peringatan dini sebagai petunjuk/unsur dasar pertimbangan aktivasinya untuk penyelamatan diri dan evakuasi. Kedua, sebagai alat edukasi kebencanaan yang berisikan data-data yang sangat membantu para akademisi maupun peneliti dalam kegiatan penelitian dan riset. Ketiga, dapat menjadi media informasi kebencanaan, di mana masyarakat dapat partisipasi secara *online* dalam pelaporannya serta dapat juga menjadi bahan pertimbangan investasi dunia usaha. Pengintegrasian peran aktif masyarakat melalui pemanfaatan program 10.000 CCTV dan teknologi digital dalam rangka manajemen informasi kebencanaan menuju *Smart City for Disaster Resilience*.

3. GEBER SEPTI (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying*). Program dan *website* GEBER SEPTI bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan mental anak dan remaja berbasis teknologi di Kota Semarang. GEBER SEPTI menyediakan layanan konseling *online* dan edukasi mengenai *bullying* kepada peserta didik, orang tua, dan *stakeholder* sekolah. Layanan dalam GEBER SEPTI ditangani oleh para ahli di bidang psikologi, pendidikan, teknologi, dan hukum. Program ini adalah bentuk penyelarasan perkembangan ilmu dan teknologi untuk membawa manfaat pada masyarakat Kota Semarang terutama di bidang kesehatan mental serta pembentukan moral anak dan remaja.
4. SAMPOKONG (Sedia Memberikan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kota Semarang). SAMPOKONG memberikan layanan pendidikan kesehatan untuk keluarga (preventif, promotif) dan *home care*. Kemudahan akses pelayanan kesehatan yang diberikan pada inovasi SAMPOKONG ini dapat meningkatkan pencegahan penyakit, memulihkan kesehatan, memaksimalkan kemandirian, serta meminimalkan dampak penyakit. SAMPOKONG berkolaborasi



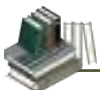
dari berbagai *stakeholders*, mulai Pemerintah Kota Semarang, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, masyarakat, hingga sektor swasta. SAMPOKONG dapat dijangkau oleh seluruh warga Kota Semarang dengan mudah, menghubungi *call center* 1500-132 atau 112. Inovasi SAMPOKONG bermula dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang langsung bertemu kepada pasien. Konsep “*one stop service*” pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan *rehabilitative* yang membedakan pelayanan SAMPOKONG dengan inovasi lainnya. Kebaruan dari Inovasi SAMPOKONG adalah pelayanan yang cepat, ramah, gratis, meningkatkan kemandirian keluarga dan yang lebih utama *screening* kesehatan untuk keluarga.

5. SECCON. SECCON adalah inovasi dalam rangka pengembangan ekosistem industri kreatif, yang memperkuat jejaring kelembagaan dan sumber daya manusia pelaku industri kreatif, khususnya pada sektor konten, animasi, serta *game* di Kota Semarang. SECCON memiliki rencana pengembangan yang terstruktur setiap tahun untuk menuju tujuan inovasi, yaitu membangun ekosistem industri kreatif, antara lain: (1) 2019: Kelembagaan; (2) 2020: Fokus pada pembangunan SDM, Pendidikan Vokasi, dan Industri; (3) 2021: Peran sebagai HUB & *Agency*; dan (4) 2022: *Capital & Sustainability Program*.
6. TUNGGAL DARA. TUNGGAL DARA adalah inovasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Semarang sehingga pada akhirnya dapat menekan angka kejadian DBD di Kota Semarang. Bentuk inovasi ini adalah dimulai pada pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan DBD, dari siswa sekolah (Sicentik), PKK, hingga kader kesehatan lingkungan, serta diperkuat dengan sistem informasi DBD yang terintegrasi untuk mempercepat respons dan pengambilan keputusan.
7. ASIKK PAK (Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak). Inovasi “ASIKK Pak” sesuai dengan tujuan ke-5 SDGs (Kesetaraan Gender) yang selama

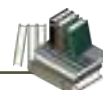


ini perempuan atau anak sebagai korban kekerasan masih ada rasa takut atau inferior dalam melapor. DP3A berusaha melihat peluang melalui perkembangan teknologi informasi. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan mulai dari pelaporan, pengaduan, pendamping, dan pencatatan, serta evaluasi bahkan sebagai bahan sosialisasi/pencegahan dalam satu aplikasi kasus tindak kekerasan di Kota Semarang.

8. Semarang SIAP. Semarang SIAP merupakan inovasi berupa Sistem Informasi dukungan dari Bank Dunia yang adaptif, responsif, dan cepat untuk memetakan dampak Covid-19 di Kota Semarang. Inovasinya adalah isian kuesioner *online* berbasis web dan android pada skala RT oleh Ketua RT setempat di seluruh Kota Semarang. Semarang SIAP sudah dimulai 20 Mei 2020, dengan akses ke <http://smg.city/semarangsiap>.
9. Pengembangan *Rooftop* Solar Panel Gedung Kantor Pemerintah Kota Semarang. *Rooftop* solar panel ini adalah inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan, sebagai upaya penghematan energi sekaligus kampanye penggunaan energi yang ramah lingkungan di Kota Semarang. Tahap pertama dilaksanakan untuk mendukung penggunaan listrik di Gedung Balai Kota (Kantor Wali Kota) yang memiliki kapasitas listrik sebesar 105 kVA, dengan didukung oleh panel tenaga surya berkapasitas 75 kWp. *Rooftop* solar panel di Balai Kota Semarang ini menggunakan sistem *on grid* dilengkapi KWH meter ekspor impor.
10. Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat-Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat). Sistem informasi dan *monitoring* evaluasi sektor air minum serta sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi mengenai data spasial di sektor pelayanan PDAM, non-PDAM, pengolahan limbah, dan persampahan dengan perincian data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.
11. Pangripta. Pangripta adalah inovasi sistem informasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang berisi



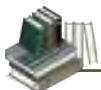
- informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.
12. Jurnal Riptek. Jurnal Riptek adalah terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang yang berisi mengenai artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482 terbit dua kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di *Google Scholar* dan *Directory of Open Journal Access (DOAJ)*.
 13. SI IMUT. Pelayanan perizinan yang secara manual banyak memerlukan persyaratan dan berkas disederhanakan melalui pengurangan persyaratan serta dimudahkan melalui sebuah aplikasi *online* SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) sehingga pemohon tidak harus datang dan antre di kantor, tetapi cukup mendaftar, *upload* persyaratan serta DPMPTSP akan memproses, menandatangani secara elektronik dan mengirimkan kepada pemohon untuk dicetak secara mandiri di rumah.
 14. Buka Invest. Buka Invest adalah portal resmi Pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk membantu mempertemukan antara peluang investasi dan investor secara *online*. Buka Invest adalah untuk para calon investor, maupun siapa saja yang akan memberikan peluang investasi dan kerja sama di Kota Semarang.
 15. Paket Perizinan Investasi Reklame dan IMB Pertandaan (PARIMESEM). PARIMESEM merupakan sebuah inovasi DPMPTSP Kota Semarang untuk kemudahan dan percepatan perizinan khususnya pada perizinan Reklame dan IMB pertandaan, yang diakses melalui izin.semarangkota.go.id. Proses pelayanan berjalan bersamaan terintegrasi melalui SIIMUT. Kami DPMPTSP Kota Semarang akan terus melakukan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
 16. ATM Beras. ATM Beras merupakan terobosan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk membantu warga kurang mampu yang terdaftar dalam BDT (Basis Data Terpadu) tetapi belum menerima bantuan Beras Sejahtera (Rasta) maupun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).



17. *Urban Farming Corner* (UFC). UFC ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kota Semarang sebagai pusat edukasi dan informasi, juga tempat konsultasi mengenai pertanian perkotaan Kota Semarang. Pelatihan di UFC ini tidak hanya berisi penyampaian materi saja, tetapi juga diikuti kegiatan lomba praktik penanaman sayur organik oleh para peserta sebagai bentuk penerapan pemahaman budi daya sayur organik tingkat pemula.
18. YANKESTRAD (Pelayanan Kesehatan Tradisional). RSUD KRMT Wongsonegoro menjadi Rumah Sakit pertama di Jawa Tengah yang memiliki program pengobatan tradisional. Konsep ini diangkat karena Pemerintah Kota Semarang meyakini bahwa pengobatan tradisional Indonesia dengan berbagai ramuan herbalnya, memiliki khasiat yang tidak kalah dengan lainnya. Pelayanannya meliputi akupunktur, akupresur, pijat anak, konsultasi obat herbal, pijat refleksi, dan pijat relaksasi.
19. GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro Lokal *online* Asli Semarang). Gulo Asem adalah inovasi layanan pemasaran *online* dalam bentuk aplikasi katalog produk yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Katalog Produk ini meliputi: produk kuliner, *craft*, *fashion*, dan ekonomi kreatif.
20. *Website* Siaga Corona. *Website* yang berisi mengenai berbagai informasi terkait dengan penanganan Covid-19 di Kota Semarang. Perkembangan kasus harian, informasi bantuan sosial, jadwal penyemprotan disinfektan, pengawasan bahan pokok, ketersediaan alat kesehatan, dan informasi terkait lainnya dapat diakses lewat <http://siagacorona.semarangkota.go.id/>.

10.4 INOVASI UNGGULAN

Kota Semarang dinobatkan sebagai kota terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut merupakan kali ke-3 secara berturut-turut yang didapatkan oleh Kota Semarang, pada era kepemimpinan



Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Sebelumnya, penghargaan yang sama pada tahun 2019 dan tahun 2020 juga diraih oleh Kota Semarang, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional.

Adapun terdapat tiga kriteria dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD): Pertama, aspek pencapaian pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, IPM, ketimpangan, kualitas pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas, serta capaian pembangunan spesifik daerah. Kedua, aspek-aspek kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), meliputi proses penyusunan RKPD dan keterlibatan *stakeholders*. Ketiga, aspek inovasi daerah.

PPD tersebut diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi untuk perencanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, serta untuk memberikan akses motivasi dan pembelajaran untuk pembangunan daerah yang lebih berkualitas. PPD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi sampai nasional. Penilaian dilakukan terhadap dokumen perencanaan RKPD, presentasi dan wawancara serta verifikasi lapangan. Kota/Kabupaten yang memenangkan penghargaan tersebut di tingkat Provinsi disertakan dalam penilaian di tingkat nasional.

Berikut ini adalah program inovasi unggulan Kota Semarang yang membuat Kota Semarang menjadi Pemenang PPD Bappenas selama tiga tahun berturut-turut, yaitu San Piisan, Kampung Tematik, dan *Urban Farming*.

10.4.1 San Piisan

Pemerintah Kota Semarang berinovasi terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya dengan mengubah paradigma pemberian layanan dari *product oriented* menuju *service oriented* dengan pelayanan SAYaNGi & DamPIngi Ibu dan Anak Kota Semarang (San Piisan). Inovasi San Piisan merupakan upaya



bergerak bersama dengan Gerakan Masyarakat (GERMAS) mampu memutus 4 terlalu dan 3 terlambat yang menjadi penyebab Kematian Ibu dan Anak dan menurunkan kejadian *stunting* di Kota Semarang. Inovasi ini dilakukan sejak tahun 2017-2019. “4 terlalu” adalah terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak. “3 terlambat” meliputi terlambat mengambil keputusan, terlambat samapai ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan terlambat mendapat penanganan.

San Piisan merupakan inovasi Pemerintah Kota Semarang di bidang kesehatan yang terkait dengan tema RKP 2020, yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas. Inovasi ini menjawab prioritas nasional tentang meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta penurunan *stunting*. Fokus inovasi San Piisan dalam menurunkan *stunting* dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar ibu hamil, anak, dan remaja.

Pelayanan San Piisan melibatkan lima *stakeholder*. San Piisan dengan masyarakat, organisasi profesi, puskesmas, rumah sakit, dan perusahaan/swasta. San Piisan memiliki tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, kasus gizi buruk, kasus *stunting*, dan untuk mewujudkan penanganan risiko tinggi sejak dini sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam mendapatkan penanganan. Selain itu, mampu memutus salah satu rantai penyebab terjadinya kematian ibu, yang dikarenakan 3 Terlambat maupun 4 Terlalu. Tujuan lainnya, yaitu untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dari tenaga kesehatan, dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi sarana layanan kesehatan di Kota Semarang.

Inovasi San Piisan selanjutnya dikembangkan Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui aplikasi sayang bunda, jawil bumil/bufas dengan WhatsApp, penyuluhan kesehatan ibu hamil/nifas melalui media sosial Instagram dan YouTube. Berikut adalah kebaruan San Piisan:



1. San Piisan melalui aplikasi Sayang Bunda. Aplikasi yang ditujukan kepada masyarakat, terutama kelompok prioritas, yaitu ibu hamil dan ibu nifas, bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kesehatan ibu hamil/nifas dan bersalin kepada masyarakat.
 - b. Mempermudah akses komunikasi ibu hamil/nifas dengan tenaga kesehatan.
 - c. GOJEK bumil dan bufas sehingga mempermudah ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah (*homecare*) sehingga mempermudah akses pelayanan kesehatan selama hamil, nifas maupun bayi baru lahir.

2. San Piisan melalui aplikasi WhatsApp merupakan implementasi dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp dalam upaya promotif penurunan kematian ibu di Kota Semarang. Di antaranya adalah:
 - a. WhatsApp pendataan Bumil/Bufas dengan TP PKK. Gerakan masyarakat San Piisan dengan pendekatan komunikasi interpersonal yang melibatkan PKK. Aplikasi WhatsApp dimanfaatkan sebagai media sarana dalam melaporkan data ibu hamil/nifas dari PKK kepada puskesmas maupun Petugas Surveilans Kesehatan (GASURKES) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang ditemukan di wilayah kader. Pelaporan dilakukan 1 x 24 jam, kemudian akan didampingi oleh GASURKES KIA.
 - b. JAWIL (Jawab Pribadi WhatsApp Ibu hamil). Salah satu media atau wadah komunikasi ibu hamil/nifas di Kota Semarang, dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Dengan membentuk *group* WhatsApp, yang di dalamnya difasilitasi oleh dokter dan bidan dari puskesmas sehingga ibu dapat berkonsultasi secara langsung sesuai dengan kebutuhan yang dialami oleh ibu.
 - c. WhatsApp dengan rumah sakit untuk: (1) WhatsApp laporan *Feedback* data ibu hamil/nifas, (2) Forum komunikasi kesehatan ibu anak dengan rumah sakit.



3. San Piisan dengan memanfaatkan media sosial Instagram dan YouTube. Alamat Instagram San Piisan @gerakanibuanaksehat_dkk.smg dan YouTube dapat dilihat di <https://www.youtube.com/watch?v=WhfeG99Q-ts>.

Langkah penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL) pengembangan inovasi San Piisan meliputi: (1) permasalahan dan penyebabnya; (2) *input*; (3) proses; (4) *output*; (5) *outcome* dan dampak.

1. Permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Semarang di bidang kesehatan: (1) Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Semarang sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masih di atas 70/100.000 KH; (2) Kasus Kematian ibu di Kota Semarang didapatkan sebesar 69% kasus berperingkat ke-3, yang artinya kasus kematian yang terjadi sebenarnya dapat dicegah; (3) Masih ditemukannya kasus gizi buruk, bahkan tahun 2018 masih ada 23 kasus; dan (4) Tahun 2019 dilaporkan 2,58% balita di Kota Semarang menderita *stunting*. Dari permasalahan tersebut, ternyata disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan diri dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan ibu di masa kehamilan, melahirkan, nifas, hingga perawatan bayi serta balita.
2. *Input*. *Input* terdiri dari regulasi, anggaran, sumber daya manusia (SDM), institusi yang terlibat, teknologi, dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Regulasi meliputi, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keselamatan Ibu dan Anak, Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pelayanan Ambulans Hebat Kota Semarang, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kota Semarang, dan SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang No. 800/7641 tentang Pembentukan Tim Efektif Sistem Komunikasi Kesehatan Ibu Tahun 2019.



Anggaran meliputi anggaran kesehatan ibu dan gasurkes. Anggaran untuk kesehatan ibu pada tahun 2017 sebesar Rp400,13 juta, naik menjadi Rp1,12 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, anggaran untuk gasurkes pada tahun 2017 Rp4,09 miliar, naik menjadi 4,76 miliar pada tahun 2020.

Jumlah SDM petugas Surveilans Kesehatan pada tahun 2020 sebanyak 125 orang. Institusi yang terlibat terdiri atas PKK, FKK, puskesmas, rumah sakit negeri/swasta, IBI (Ikatan Bidan Indonesia), POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia), dan perusahaan/CSR. Sarana prasarana yang dibutuhkan adalah ambulans.

3. Proses. Proses terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan meliputi: (1) koordinasi internal, lintas bidang dan program, lintas sektoral dan *stakeholder*; (2) perumusan inovasi; (3) pembentukan tim; (4) penyusunan dasar hukum (Perda, Perwal dan SK); dan (5) penyusunan SOP dan juknis.

Pelaksanaan kegiatan mencakup: (1) pelatihan media San Piisan dan aplikasi Sayang Bunda; (2) sosialisasi dan promosi aplikasi Sayang Bunda; (3) pendampingan ibu hamil, bayi, dan balita; (4) pendataan ibu hamil, bayi, dan balita sehingga memiliki *medical record* serta mendapat jaminan kesehatan (UHC dan Jampersal); (5) penyuluhan ibu hamil, bayi, dan balita; (6) bantuan *Ambulance* Hebat; dan (7) koordinasi antarinstansi. Pengawasan dan evaluasi dapat dilihat pada Tabel 10.3.



Tabel 10.3 Pengawasan dan Evaluasi Program Inovasi San Piisan

Kriteria	Sebelum San Piisan	Sesudah San Piisan
Angka Kematian Ibu Kota Semarang	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Semarang tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan, yaitu berturut-turut 107.95/100.000 KH, 122.29/100.000 KH, 128.05/100.000 KH, dan 121.5/100.000 KH.	Tahun 2017 menurun secara drastis menjadi 88.28/ 100.000 KH dan tahun 2018 75,77/100.000 KH.
	Kematian Ibu di Kota Semarang dari tahun 2013 s.d. 2016 berturut-turut sebanyak 29 kasus, 33 kasus, 35 kasus, dan 32 kasus.	Kematian ibu di Kota Semarang, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 23 kasus dan tahun 2018 menjadi 19 kasus.
Pendataan ibu hamil, ibu nifas, dan neonatus	Data ibu hamil, nifas, dan neonatus berdasarkan data ibu yang melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan.	Data ibu hamil, nifas, dan neonatus mampu <i>up to date</i> serta <i>real time</i> .
Kesadaran masyarakat	Masih ada ibu hamil/ nifas belum memiliki kepedulian akan kondisi kesehatannya.	Terciptanya kesadaran masyarakat dan ibu hamil/nifas tentang kehamilan, yang dibuktikan dengan laporan permintaan pendampingan yang dilakukan ibu hamil/nifas melalui aplikasi Sayang Bunda.
Pelayanan Petugas	Data tersurvei ibu hamil/nifas oleh petugas belum mencapai target.	Data tersurvei ibu hamil/ nifas meningkat, dikarenakan mudah bertemu dengan ibu hamil/nifas.
Status Kesehatan	Sebelumnya ibu hamil/nifas hanya mengetahui status kesehatannya dari penjelasan dari petugas saja.	Ibu sudah memiliki <i>medical record</i> sendiri yang terekam di aplikasi, yang mudah diakses kapan saja.
Cakupan K1	Capaian K1 mencapai 95%.	Mencapai target 100%.
Capaian Deteksi Risiko Tinggi	Masih rendahnya Capaian Deteksi Dini Risiko tinggi oleh masyarakat.	Capaian Deteksi Dini Risiko tinggi oleh masyarakat meningkat.
Informasi Kesehatan	Pelayanan dan informasi kesehatan masih bersifat satu arah.	Mudahnya akses ibu dalam memperoleh pelayanan dan informasi kesehatan dengan cara mudah, praktis, serta <i>up to date</i> .
Akses Mendapatkan Informasi	Informasi yang di dapatkan masih bersifat umum.	Ibu mudah dalam mendapatkan informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan.



Kriteria	Sebelum San Piisan	Sesudah San Piisan
Pendataan ibu hamil, ibu nifas, dan neonatus	Data ibu hamil, nifas, dan neonatus berdasarkan data ibu yang melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan.	Data ibu hamil, nifas, dan neonatus lebih <i>up to date</i> karena GASURKES KIA melakukan kunjungan langsung ke rumah ibu sehingga datanya <i>up to date</i> dan <i>real time</i> .
Pendampingan ibu hamil dan ibu nifas	GASURKES KIA yang mendatangi ibu hamil dan ibu nifas untuk melakukan pendampingan.	Ibu hamil dan ibu nifas dapat melakukan permintaan pendampingan kepada GASURKES KIA melalui aplikasi SAYANG BUNDA.
Konsultasi ibu hamil/ibu nifas	Ibu hamil dan ibu nifas melakukan konsultasi kepada Petugas Kesehatan secara langsung dan harus ke fasilitas layanan kesehatan.	Ibu hamil dan ibu nifas dapat berkonsultasi dengan petugas melalui fitur Konsultasi kapan pun dan di mana pun.
Informasi Seputar Kehamilan, Persalinan, dan Nifas	Akses informasi dari berbagai sumber yang bisa menyebabkan ibu hamil nifas kebingungan akan informasi yang dapat dipercaya.	Informasi yang diberikan selalu <i>ter-update</i> , terkini dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Kalkulator Kelahiran	Ibu hamil mengetahui Hari Taksiran Persalinan (HTP) saat pemeriksaan kehamilan ke fasilitas Layanan Kesehatan.	Ibu hamil dapat menghitung sendiri HTP dengan memasukkan tanggal Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) dan siklus menstruasi.
Sarana Pelayanan Kesehatan	Ibu hamil dan ibu nifas mengakses secara manual melalui <i>web browser</i> untuk sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Semarang maupun yang terdekat dari tempat tinggal.	Ibu hamil dan nifas dapat melihat seluruh fasilitas kesehatan di Kota Semarang termasuk yang terdekat dari tempat tinggal ibu yang terhubung dengan layanan <i>google maps</i> .
Hasil kunjungan/pendampingan melalui pemeriksaan oleh petugas	Ibu hamil/nifas dapat mengetahui hasil pemeriksaan oleh GASURKES KIA melalui penjelasan yang disampaikan oleh petugas.	Ibu hamil/nifas dapat mengetahui hasil pemeriksaan oleh GASURKES KIA melalui aplikasi SAYANG BUNDA mengetahui kondisi dan riwayat pemeriksaan yang telah dilakukan.
Sumber data	Data ibu hamil dan ibu nifas terkumpul secara manual melalui masing-masing Puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan.	Sebagai potensi pengembangan sumber data berbasis teknologi.

4. *Output*. Berikut adalah *output* dan indikator dari program San Piisan: (1) terwujudnya kemudahan akses informasi kesehatan → Jumlah pengunjung aplikasi San Piisan: (2) meningkatnya cakupan pendampingan ibu hamil/nifas → Jumlah laporan permintaan pendampingan yang dilakukan ibu hamil/nifas: (3) terwujudnya



pendataan ibu hamil, bayi, dan balita yang *up to date* serta *real time* → jumlah *medical record* di San Piisan: (4) meningkatnya cakupan jaminan kesehatan kepada ibu hamil dan bayi → Jumlah ibu hamil/nifas, bayi, dan balita yang terdaftar peserta UHC serta Jampersal: dan (5) meningkatnya cakupan penanganan kasus kegawatdaruratan → Proporsi Maternal kasus yang ditangani oleh *Ambulance* Hebat.

5. *Outcome*. Dampak dari program inovasi San Piisan adalah (1) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan anak untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2018 75 orang, jumlah kasus gizi buruk tahun 2018 menjadi 23 kasus dan persentase kasus *stunting* tahun 2019 sebesar 2,58%; (2) Meningkatnya akses informasi tentang pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak; (3) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan, konsultasi serta akses informasi untuk ibu hamil, bayi, dan balita; (4) Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan secara efektif dan efisien untuk pelayanan Keselamatan Ibu dan Anak; dan (5) Terciptanya kerja sama antar semua pemangku kepentingan dalam menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu serta anak melalui pendekatan pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

10.4.2 Kampung Tematik

Kampung Tematik merupakan inovasi penanggulangan kemiskinan konsep perencanaan yang berbasis Tematik, yaitu tiap kampung mengangkat potensi wilayah masing-masing sebagai tema untuk diunggulkan atau bahkan mengangkat permasalahan di kampungnya untuk menjadi nilai positif. “Holistik” ditunjukkan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam kampung tematik, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek (sasaran) program-program penanggulangan kemiskinan saja, tetapi juga akan menjadi subjek (pelaku aktif) dari program-program penanggulangan kemiskinan. Integratif diimplementasikan bahwa dalam perkembangannya, Kampung



Tematik melibatkan lintas Perangkat Daerah dan bahkan seluruh kegiatan Perangkat Daerah diprioritaskan untuk mendukung program Kampung Tematik. Konsep Spasial mengacu pada program Kampung Tematik juga merupakan upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman di wilayah kampung tersebut. Mengingat bahwa pelaksanaan Kampung Tematik melingkupi pembangunan di sektor nonfisik (sosial dan ekonomi) dan juga di sektor fisik (infrastruktur lingkungan).

Menurut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik, definisi dari Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat.

Adapun maksud dari pelaksanaan program Kampung Tematik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.
3. Mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Tujuan dari pelaksanaan Kampung Tematik mencakup aspek sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
2. Perbaikan lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
3. Peningkatan partisipasi atau peran serta masyarakat secara aktif di dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan potensi lokal yang ada di masyarakat dan lingkungan setempat.
5. Peningkatan kepedulian masyarakat dan membentuk identitas kampung sebagai semangat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.



6. Memberi pengaruh positif bagi kampung-kampung lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan kampung tematik serupa.
7. Menggugah minat pengusaha dalam memberikan tanggung jawab sosialnya untuk mendukung pelaksanaan kampung tematik di Kota Semarang.
8. Mendorong peningkatan perputaran ekonomi lokal/wilayah.
9. Menambah tujuan atau destinasi wisata.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2016, titik-titik Kampung Tematik di Kota Semarang terus bertumbuh hingga sekarang, dengan perincian setiap tahun adalah sebagai berikut.

1. Tahun 2016 telah ditetapkan sebanyak 32 kampung tematik.
2. Tahun 2017 telah ditetapkan sebanyak 80 kampung tematik.
3. Tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 65 kampung tematik.
4. Tahun 2019 telah ditetapkan sebanyak 32 kampung tematik.
5. Tahun 2020 telah ditetapkan 26 kampung tematik (akan berjalan di tahun anggaran 2021).

Sampai dengan akhir tahun 2020, total kampung tematik yang telah ditetapkan sebanyak 235 kampung tematik yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan se-Kota Semarang. Pada awal tahun ini, Januari 2021, Bappeda Kota Semarang kembali memfasilitasi proses perencanaan Kampung Tematik yang diusulkan dan nantinya akan ditetapkan sebagai Kampung Tematik Tahun 2021.

Kampung Tematik Kota Semarang sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Perkembangan Kampung Tematik di tahun 2020 terus mengalami kebaruan, seiring upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan reformasi sosial setidaknya melalui Kampung Siaga Candi Hebat. Adapun sasaran Kampung Siaga Candi Hebat, antara lain: Siaga Kesehatan, Siaga Logistik, Siaga Sosial Ekonomi, Siaga Keamanan, dan Siaga Komunikasi.



Dalam menghadapi pandemi Covid-19, di Kota Semarang dibentuk Kampung Siaga Candi Hebat. Dengan pembentukannya, diharapkan dengan keterlibatan masyarakat maka penanganan pandemi Covid-19 cepat dan tepat dengan tanpa meninggalkan aspek ekonomi serta keamanan. Total terdapat 357 Kampung Siaga Candi Hebat yang sudah terbentuk di Kota Semarang.

Siaga kesehatan dilakukan dengan cara, antara lain dengan: mendata warga berisiko tinggi, mengawasi kondisi bila ada *suspect* dan *confirm* Covid-19 di wilayahnya, membuat panduan evakuasi pasien Covid-19 yang harus dibawa ke rumah sakit serta bertanggung jawab untuk menghubungi puskesmas atau rumah sakit, melaksanakan standar penanganan proses penguburan jenazah Covid-19, dan memantau kesehatan warga.

Siaga logistik dilakukan dengan cara, antara lain: menggalang dana bantuan, menggalang upaya dapur umum bila diperlukan, membentuk lumbung pangan untuk menyimpan cadangan logistik bagi warga, melakukan pendataan alat transportasi untuk evakuasi, memastikan semua warga tidak kekurangan makanan, mengatur penyediaan logistik untuk warga yang melakukan isolasi mandiri.

Siaga sosial ekonomi dilakukan dengan cara, antara lain: menumbuhkan UMKM di lingkungan kampung, memantau penerapan protokol kesehatan di unit usaha yang ada di lingkungannya, pelatihan *soft skill* untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, membudayakan kegiatan *urban farming* sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan, ekonomi, dan penerapan konsep “aman di rumah saja”.

Siaga keamanan dilakukan dengan cara, antara lain: membentuk satuan penjagaan sukarela, memastikan aturan RW ditegakkan secara konsisten, menegakkan sanksi sosial yang disepakati apabila ada yang melanggar, mengatur cara orang untuk mengawasi orang yang masuk ke wilayah, membuat jadwal pemeriksaan wilayah, membangun komunikasi dengan aparat setempat.

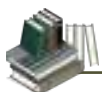


Siaga komunikasi dilakukan dengan cara, antara lain: membuat prosedur dan penyediaan tempat isolasi, menangkal berita *hoax* dan stigma yang beredar di masyarakat, menyimpan dan membagikan nomor penting (ambulans, dokter, *hotline* Covid-19), membuat poster pencegahan Covid-19 dan melakukan penyuluhan, memastikan warga paham protokol kesehatan pencegahan Covid-19, membuat prosedur dan pelaksanaan disinfektan wilayah.

Tabel 10.4 memperlihatkan langkah penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL) pengembangan Kampung Tematik yang meliputi: (1) permasalahan dan penyebabnya; (2) *input*; (3) proses; (4) *output*; (5) *outcome* dan dampak. Permasalahan utama yang menyebabkan perlunya program inovasi Kampung Tematik adalah karena meningkatnya kemiskinan di Kota Semarang yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Tabel 10.4 Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL) Kampung Tematik

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
Dampak	Turunnya angka kemiskinan Kota Semarang. Angka kemiskinan terus menurun mulai dari tahun 2016 s.d. 2020 dengan nilai berturut-turut 4,85%, 4,62%, 4,14%, 3,98% di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 sedikit terjadi kenaikan angka kemiskinan, yaitu menjadi sebesar 4,34 % akibat Pandemi Covid-19.	Angka Kemiskinan
<i>Outcome</i> Antara	Kampung tematik berpotensi menjadi Destinasi Wisata Baru, antara lain: Kampung Jawi, Desa Wisata Jamalsari, Desa Wisata dan Nongkosawit, Desa Wisata Cepoko, Desa Wisata Curug Gondoriyo, Kampung Alam Malon.	Jumlah Destinasi Wisata Baru
<i>Outcome</i> Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin di kelurahan lokasi kampung tematik. 2. Meningkatnya pendapatan warga setempat. 3. Perbaikan kualitas lingkungan permukiman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kelurahan 2. Rata-rata pendapatan per kapita se-kelurahan.
<i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk mendukung kampung tematik. 2. Meningkatnya pendapatan warga melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat. 3. Terbentuknya kepribadian dan perilaku warga peduli serta guyub pada lingkungannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keberhasilan kampung tematik = Jumlah Kampung Tematik yang berjalan/jumlah kampung tematik yang ditetapkan. 2. Panjang jalan dan saluran yang diperbaiki.



Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
Kegiatan/ Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan potensi dan permasalahan berdasarkan sosial, ekonomi, dan/atau infrastruktur difasilitasi kelurahan. 2. Menentukan tema berdasarkan kelayakan, kelurahan dibantu LPMK, RW, RT, PKK, dan <i>stakeholder</i> lainnya. 3. Penyusunan proposal yang ditujukan ke Wali Kota melalui Bappeda. 4. Verifikasi proposal memuat tentang tanggapan tentang potensi dan permasalahan, rencana tindak lanjut, rencana anggaran dan biaya, serta keterkaitan keseluruhan proposal dengan tema yang diangkat. 5. Supervisi melalui kunjungan lapangan. 6. Penetapan kampung tematik melalui SK Wali Kota. 7. Pelaksanaan. 8. <i>Monitoring</i> dan evaluasi. 	-
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBD Rp200.000.000 per kampung tematik. 2. CSR atau PKBL. 3. Anggaran OPD (menyesuaikan antara usulan dan ketersediaan anggaran OPD). 	-
Permasalahan dan Penyebab Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meskipun angka kemiskinan trennya menurun, jumlah warga miskin antarkecamatan masih menunjukkan kesenjangan, artinya kebijakan pengentasan kemiskinan belum efektif. 2. Pandemi Covid-19 menyebabkan naiknya angka kemiskinan di tahun 2020 (naik 0,36 poin). 	Jumlah warga miskin antarkecamatan menunjukkan kesenjangan antarwilayah.

1. Input

Dalam pelaksanaan Kampung Tematik, beberapa regulasi atau dasar hukum yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang;
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang;
- g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021; dan
- h. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik.

Pelaksanaan kampung tematik meliputi sejak dari proses perencanaan hingga pembangunan melibatkan sumber daya manusia yang bersumber dari Pemerintah Kota Semarang (mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah), tokoh masyarakat, pelaku tematik dan lembaga kemasyarakatan, swasta/dunia usaha melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta keterlibatan akademisi. Kampung Tematik merupakan sebuah “laboratorium”, tempat di mana berbagai pihak bersama-sama melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman.

Terkait pembiayaan untuk pelaksanaan Kampung Tematik, anggaran pembangunannya dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan oleh sektor swasta/dunia usaha, maupun swadaya masyarakat. Khusus pembiayaan bersumber dari APBD Kota Semarang, pada periode tahun 2016 hingga sekarang seluruh Kampung Tematik yang ditetapkan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 per titik Kampung Tematik, untuk membiayai pembangunan Kampung Tematik, baik di sektor fisik maupun nonfisik. Anggaran tersebut



dialokasikan di Perangkat Daerah Kecamatan, di mana Kampung Tematik berada. Pelaksanaan Kampung Tematik juga dapat disinergikan dengan anggaran lain yang ada di perangkat daerah, seperti pemberdayaan perempuan, forum kesehatan kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, fasilitasi pembinaan kesejahteraan keluarga, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan, fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan, dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, di mana tupoksinya sesuai atau sejalan dengan tema yang diangkat dalam Kampung Tematik.

2. Proses

Salah satu faktor yang penting dalam proses pelaksanaan kampung tematik adalah Penentuan Tema, di mana harus memperhatikan indikator dan kelayakan tema yang meliputi sosial, ekonomi, dan/atau infrastruktur.

Indikator dan kelayakan tema dalam ruang lingkup sosial, meliputi:

- a. Mengutamakan wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi.
- b. Merupakan wilayah dengan potensi yang dapat dikembangkan.
- c. Memiliki kemauan masyarakat untuk mengangkat wilayah serta mau berpartisipasi aktif dalam pengembangan wilayah melalui pemberdayaan.
- d. Memiliki permasalahan sosial yang mendesak ditangani.

Indikator dan kelayakan tema dalam ruang lingkup ekonomi meliputi sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi lokal sebagai sumber penggerak perekonomian lokal melalui sumber daya alam/lingkungan, yang meliputi kondisi keruangan dan/atau pengelolaan persampahan.
- b. Memiliki potensi lokal sebagai sumber penggerak perekonomian lokal melalui sumber daya manusia, yang meliputi seni budaya, keterampilan, dan perilaku sosial.



- c. Memiliki kelompok masyarakat produktif.
- d. Memiliki produk yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Indikator dan kelayakan tema dalam ruang lingkup infrastruktur meliputi:

- a. Merupakan wilayah atau lingkungan hunian yang kumuh.
- b. Merupakan wilayah atau lingkungan yang gersang, tanpa atau sedikit penghijauan.
- c. Merupakan wilayah atau lingkungan hunian yang tidak teratur.
- d. Merupakan wilayah atau lingkungan hunian yang mengalami penurunan daya dukung.

Dalam proses pelaksanaan Kampung Tematik, dapat dijabarkan secara terperinci mulai dari pemetaan potensi dan permasalahan, penentuan tema, penyusunan proposal, verifikasi proposal, supervisi, pelaksanaan hingga *monitoring*, dan evaluasi.

Dalam tahapan pertama, yaitu pemetaan potensi dan permasalahan, difasilitasi oleh pihak Kelurahan, dengan melihat indikator dari ruang lingkup sosial, ekonomi, dan/atau infrastruktur. Dilanjutkan dengan penentuan tema, yang akan diusulkan untuk menjadi nama tematik kampung tersebut. Dalam pemetaan potensi dan permasalahan serta penentuan tema, Kelurahan melakukan tahapan tersebut bersama-sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan dapat mengikutsertakan *stakeholder* lainnya.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan proposal perencanaan Kampung Tematik, yang temanya sudah disepakati dalam proses sebelumnya. Proposal tersebut ditujukan kepada Wali Kota Semarang melalui Bappeda Kota Semarang. Proposal yang telah selesai disusun oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan, dikumpulkan ke Bappeda Kota Semarang untuk diverifikasi di tahapan selanjutnya.



Tahapan verifikasi proposal Kampung Tematik dilaksanakan dengan cara Lurah calon Lokasi Kampung Tematik melakukan pemaparan substansi proposal dengan didampingi oleh pihak Kecamatan dan dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat/pelaku di kampung tematik yang diusulkan (lihat Gambar 10.1). Adapun yang menjadi tim verifikasi beranggotakan dari Bappeda Kota Semarang dan Perangkat Daerah yang, tupoksinya sesuai dengan tema yang diusulkan, serta dapat mengikutsertakan tim ahli, unsur profesional, unsur masyarakat dan/atau akademisi.

Gambar 10.1 Pelaksanaan Verifikasi Proposal Kampung Tematik yang Diusulkan



Setelah tahapan verifikasi proposal selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah tahapan supervisi atau kunjungan lapangan (lihat Gambar 10.2). Tim verifikasi yang beranggotakan Bappeda Kota Semarang dan Perangkat Daerah yang tupoksinya sesuai dengan tema yang diusulkan melakukan kunjungan ke titik-titik calon Kampung Tematik, dengan didampingi oleh pihak Kecamatan, Kelurahan, dan tokoh masyarakat/pelaku setempat. Kunjungan lapangan dilakukan untuk melihat kesesuaian substansi proposal dengan kenyataan/fakta di lapangan, penggalian data dan informasi lebih mendalam, serta berdiskusi untuk merumuskan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan tahapan perencanaan.



Gambar 10.2

Pelaksanaan Supervisi/Kunjungan Lapangan ke Lokasi Kampung Tematik yang Diusulkan



Sebagai penutup dari proses perencanaan, tim verifikasi melakukan rapat pleno untuk menyusun kesimpulan dari tahapan proses verifikasi proposal dan supervisi atau kunjungan lapangan. Dalam rapat pleno tersebut, tim verifikasi menyampaikan titik kampung tematik mana saja yang direkomendasikan, dan titik kampung tematik mana saja yang tidak direkomendasikan. Bagi titik kampung tematik yang direkomendasikan, akan diberi dasar hukum dalam sebuah Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Lokasi dan Tema Kampung Tematik Kota Semarang tahun berkenaan.

Seluruh Kampung Tematik yang direkomendasikan dan sudah ditetapkan sebagaimana dasar hukum di atas, akan mendapatkan anggaran stimulan Rp200.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Semarang, yang anggarannya dialokasikan pada Perangkat Daerah Kecamatan. Anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, yang menjadi tindak lanjut dari proses perencanaan sebelumnya. Namun, guna optimalisasi pelaksanaan Kampung Tematik, anggaran tersebut dapat disinergikan dengan fasilitasi Musrenbang, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan, fasilitasi kegiatan oleh Perangkat Daerah yang tupoksinya sesuai dengan tema yang diangkat, anggaran CSR dari swasta/dunia usaha, atau pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi.



Tahapan akhir adalah *monitoring* dan *evaluasi*. *Monitoring* dilakukan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Kampung Tematik, dalam hal ini adalah Kecamatan. Adapun yang melakukan evaluasi adalah Bappeda Kota Semarang setelah pembangunan Kampung Tematik dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menyusun rencana pengembangan kampung tematik di tahun-tahun berikutnya.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang, beberapa hal yang menjadi faktor pendorong keberhasilan Kampung Tematik, antara lain sebagai berikut:

- a. Potensi yang kuat serta linier dengan tema yang diangkat.
- b. Keterlibatan pemangku wilayah (Kelurahan, Kecamatan) dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan.
- c. Memiliki aktor dengan peran yang besar, dapat sebagai koordinator, penggerak, tutor atau pelatih. Aktor tersebut, antara lain dapat ditemui dalam sosok Camat, Lurah, Ketua Lembaga Kemasyarakatan, Ketua Paguyuban, Tokoh Masyarakat, dll. Aktor sebagaimana dimaksud umumnya berada pada rentang usia 25-70 tahun.
- d. Infrastruktur lingkungan yang sangat mendukung (contoh: akses jalan lokasi yang baik, memiliki parkir, memiliki penandaan/*signage*, memiliki ruang pameran produk, dan lain-lain).
- e. Keterlibatan banyak *stakeholder* dalam peningkatan kualitas kampung tematik terbangun, seperti keterlibatan CSR, perguruan tinggi, swadaya masyarakat, dan lain-lain.
- f. Partisipasi aktif dari kelembagaan yang ada, antara lain: kelompok/paguyuban UMKM, PKK, Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan lain-lain.
- g. Memiliki kelembagaan pengurus Kampung Tematik yang dibentuk melalui surat keputusan lurah setempat.



Adapun beberapa hal yang menjadi faktor yang harus ditingkatkan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan Kampung Tematik adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja (*skill*, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain).
- b. Pengetahuan tentang tren mode terbaru, khususnya bagi yang bertema *fashion*.
- c. Ada yang pemasaran yang masih bersifat *offline*, dari mulut ke mulut.
- d. Tantangan regenerasi dari pelaku sekarang ke generasi selanjutnya, khususnya yang bertema seni dan budaya.
- e. Faktor produktivitas (keterbatasan modal dan alat).

Dari hasil evaluasi, pihak Kecamatan, Kelurahan, Perangkat Daerah, serta sumber daya lain dapat melakukan pengembangan atau pembangunan guna peningkatan kualitas kampung tematik tersebut, yang dapat berupa pelatihan, sosialisasi, pendampingan, pembangunan fisik, dan lain-lain.

3. Output

Output dari pelaksanaan Kampung Tematik meliputi: (1) Terpenuhinya infrastruktur dasar untuk mendukung kampung tematik; (2) Meningkatnya pendapatan warga melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat; dan (3) Terbentuknya kepribadian dan perilaku warga peduli dan guyub pada lingkungannya. Adapun beberapa kampung tematik yang berhasil dikembangkan sampai saat ini dapat dilihat pada Gambar 10.3.





Gambar 10.3 Contoh Kampung Tematik yang Berhasil Dikembangkan di Kota Semarang

Kampung Batik Gedong di Kelurahan Rejomulyo		Kriteria Keberhasilan
Sebelum	Sesudah	
		<p>Data warga miskin tahun 2015 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur 1.251 jiwa turun menjadi 775 jiwa (Rekapitulasi BDT Juli Tahun 2019 Penetapan Nomor 84/HUK/2019), walaupun pada Oktober 2020 bertambah menjadi 1.372 jiwa akibat Pandemi Covid-19.</p>

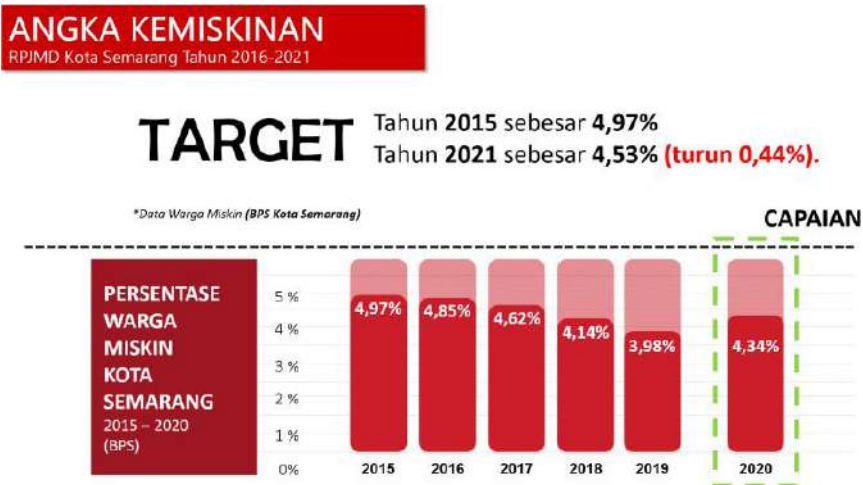


<p>Kampung Hasta Karya Pedalangan Banyumanik</p> <p>Sebelum</p> 	<p>Sesudah</p> 	<p>Kriteria Keberhasilan</p> <p>Data warga miskin tahun 2015 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik 972 jiwa turun menjadi 926 jiwa (Rekapitulasi BDT Juli Tahun 2019 Penetapan Nomor 84/HUK/2019), walaupun pada Oktober 2020 bertambah menjadi 1.306 jiwa akibat Pandemi Covid-19.</p>
<p>Kampung Hasta Karya Pedalangan Gajahmungkur</p> <p>Sebelum</p> 	<p>Sesudah</p> 	<p>Kriteria Keberhasilan</p> <p>Data warga miskin tahun 2015 Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur 4.175 jiwa turun menjadi 1.123 jiwa (Rekapitulasi BDT Juli Tahun 2019 Penetapan Nomor 84/HUK/2019), walaupun pada Oktober 2020 bertambah menjadi 1.547 jiwa akibat Pandemi Covid-19.</p>

4. Outcome

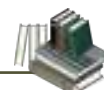
Program Kampung Tematik telah membantu menurunkan angka kemiskinan, sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan di dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Angka kemiskinan terus menurun dari 4,85% di tahun 2016, menurun menjadi 4,62% di tahun 2017, menurun menjadi 4,14% di tahun 2018, menurun menjadi 3,98% di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 sedikit terjadi kenaikan angka kemiskinan, yaitu menjadi sebesar 4,34%, tahun di mana pandemi Covid-19 (lihat Gambar 10.4).

Gambar 10.4 Capaian Angka Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2015-2020



10.4.3 Urban Farming

Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu isu penting serta prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), salah satu strateginya adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta mencanangkan pertanian berkelanjutan. Begitu pula Pemerintah Kota Semarang juga telah menempatkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan sebagai salah satu isu prioritas pembangunan. Hal tersebut tercantum sebagai salah satu strategi pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang



tahun 2021-2026, yaitu Penguatan Ketahanan Pangan. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus salah satu kota metropolitan di Indonesia, salah satu tantangan dan permasalahan yang muncul terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Semarang dan kurangnya ketersediaan pangan yang memadai bagi penduduk kota yang terus bertambah.

Ketika pandemi Covid-19 terjadi di tahun 2020, isu kerentanan pangan menjadi penting karena adanya pembatasan sosial yang menyebabkan gangguan *supply* karena adanya pembatasan mobilitas. Di sisi lain, pandemi menyebabkan masyarakat yang terpapar untuk menjalani isolasi mandiri sehingga dibutuhkan adanya lumbung pangan mandiri di lingkungan. Pandemi di sisi lain juga menyebabkan adanya peningkatan gaya hidup yang mendorong permintaan produk pertanian terutama yang organik. Berbagai komunitas dan penggiat *urban farming* telah lahir untuk menginisiasi kegiatan-kegiatan positif, yaitu memanfaatkan ruang-ruang terbuka menjadi lahan hijau produktif. Dengan kata lain, *urban farming* merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan baik lahan maupun ruang untuk memproduksi hasil pertanian di wilayah perkotaan. Kesadaran akan pentingnya *Urban Farming* di satu sisi, ternyata tidak diimbangi dengan adanya forum atau tempat untuk mengedukasi, konsultasi dan promosi produk *Urban Farming*. Pandemi juga menyebabkan penurunan ekonomi yang berakibat penurunan daya beli sehingga mendorong untuk mengurangi belanja atau meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemerintah Kota Semarang melakukan inovasi untuk memecahkan masalah tersebut dengan pengembangan *urban farming* (pertanian perkotaan) untuk pembangunan berkelanjutan. Pembudayaan *urban farming* menjadi kunci terhadap permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya yang diawali dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh Bappeda pada tahun 2018. Pembudayaan *urban farming* telah dilingkupi dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan



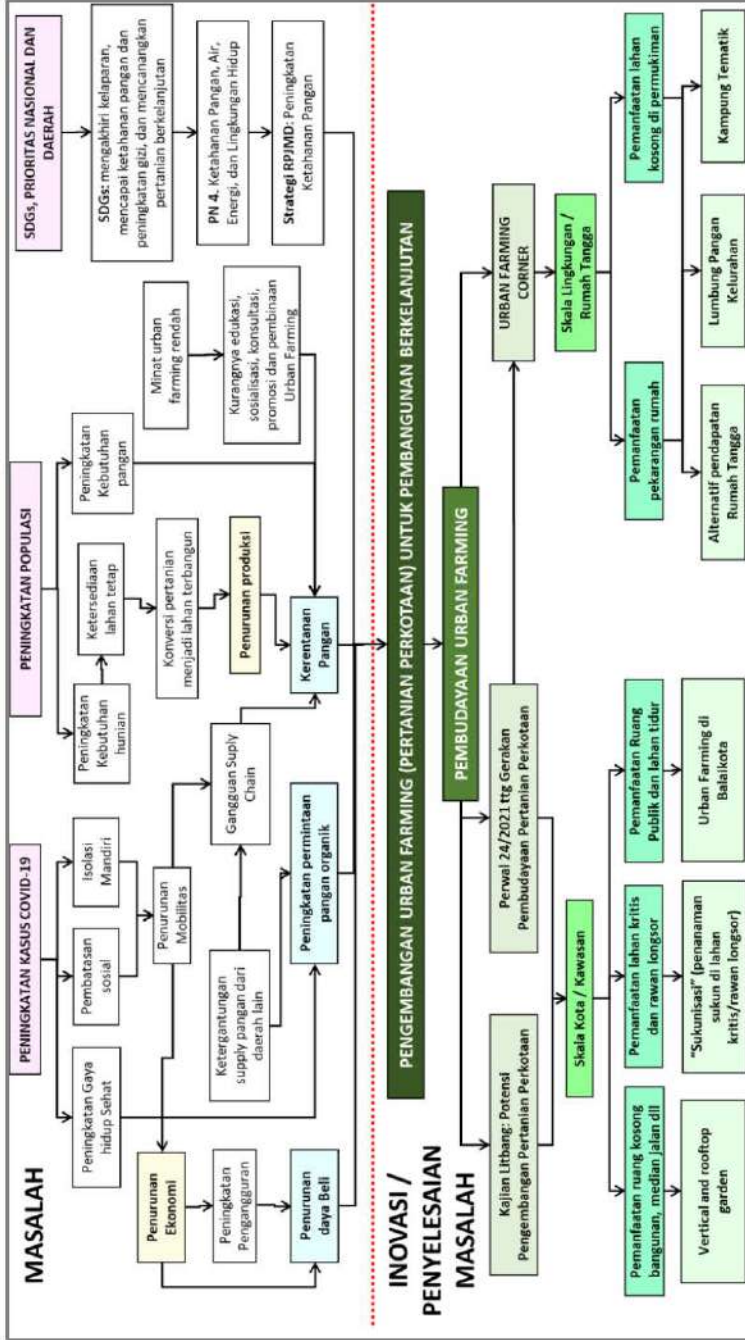
Pembudayaan Pertanian Perkotaan. Strategi pengembangan *urban farming* di Kota Semarang dilaksanakan dalam lingkup skala kota atau kawasan dan skala lingkungan atau Rumah Tangga. Dalam Skala kota atau kawasan, pengembangan dilakukan melalui: (1) pengembangan ruang kosong bangunan, median jalan, dan lain-lain; (2) pemanfaatan lahan kritis dan rawan longsor; serta (3) pemanfaatan ruang publik dan lahan tidur. Pada skala lingkungan atau rumah, pembudayaan *urban farming* dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan atau ruang di rumah serta pemanfaatan lahan kosong yang ada di lingkungan permukiman. Untuk menyediakan forum atau tempat untuk mengedukasi, konsultasi, dan promosi produk *Urban Farming*, Pemerintah Kota Semarang membangun serta mengembangkan “*Urban Farming Corner (UFC)*” yang merupakan pusat/sentral “pembudayaan” gerakan *urban farming* yang mencakup wahana edukasi, sosialisasi, konsultasi, promosi produk unggulan pertanian dan olahannya, serta pusat pelayanan “*home care*” permasalahan pertanian perkotaan yang sekaligus berfungsi sebagai *co-working space* sebagai wujud *one stop services urban farming* di Kota Semarang. Secara ringkas, Gambar 10.5 memperlihatkan kerangka pikir dan tahapan inovasi pengembangan *urban farming* di Kota Semarang.





Gambar 10.5

Kerangka Pikir dan Tahapan Inovasi Pengembangan Urban Farming di Kota Semarang



Program *urban farming* yang merupakan bagian integral dalam pembangunan pertanian berkelanjutan sejalan dengan tema RKP tahun 2022. *Urban farming* merupakan inovasi Pemerintah Kota Semarang di bidang pertanian yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya dalam diversifikasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah melalui pengembangan produk pertanian. Berdasarkan RKP Tahun 2022, disebutkan bahwa diversifikasi ekonomi juga dilakukan salah satunya melalui ketahanan pangan. Inovasi tersebut juga menjawab permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Semarang, yaitu kurangnya produksi pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, dalam hal reformasi struktural, *urban farming* diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat bahwa mereka bukan lagi hanya sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri.

Inovasi *urban farming* telah memenuhi konsep perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Holistik, dan Spasial (THIS). Pendekatan “tematik” dilakukan karena inovasi tersebut menjawab program prioritas, baik daerah maupun nasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi dan peningkatan ketahanan pangan. Implementasi *urban farming* juga dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dari hulu ke hilir (holistik), mengingat sasaran dari inovasi ini adalah seluruh *stakeholder* mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat umum meliputi perorangan, kelompok, komunitas, lembaga kemasyarakatan serta organisasi sosial. Selain itu, pendekatan secara integratif juga dilakukan karena dalam pelaksanaannya, *urban farming* memerlukan koordinasi dan dukungan dari berbagai *stakeholder* terkait, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Sementara itu, pendekatan spasial digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi penyelesaian dari aspek penataan ruang yang telah ditetapkan. Pendekatan “spasial” juga dilakukan melalui pendekatan strategi pengembangan *urban farming* yang dibagi menjadi skala kota atau kawasan dan skala lingkungan atau rumah tangga.



Pengembangan *urban farming* dilakukan melalui tahapan sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 10.6 yang terdiri dari:

1. Penyusunan kajian potensi pengembangan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Pada tahun 2018, dilakukan penyusunan penelitian oleh Bappeda Kota Semarang dengan judul Kajian Potensi Pengembangan Pertanian di Kota Semarang. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi tiga kebijakan untuk pengembangan *urban farming* di Kota Semarang, yaitu: (1) kebijakan pengembangan yang berorientasi populis melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat, pendampingan yang berkelanjutan serta intensif, mendorong peningkatan pemanfaatan pertanian perkotaan, dan mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi antarkelompok tani; (2) kebijakan pengembangan yang berorientasi bisnis, melalui pemberian insentif dan mengembangkan jejaring serta kerja sama; dan (3) kebijakan *co-benefit*, melalui pengembangan budaya sehat melalui kegiatan pertanian perkotaan, serta pengembangan aktivitas wisata edukasi.
2. Penyusunan Perwal untuk pembudayaan *urban farming*. Untuk memberikan payung hukum sekaligus untuk semakin meningkatkan pengembangan *urban farming* maka pada tahun 2021 disusun Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan.
3. Pembangunan *Urban Farming Corner* (UFC). Untuk menjawab rekomendasi hasil penelitian tentang Potensi Pengembangan Pertanian di Kota Semarang yang salah satunya merekomendasikan untuk peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat, pendampingan yang berkelanjutan serta intensif, mengembangkan jejaring dan kerja sama, serta pengembangan aktivitas wisata edukasi maka dari tahun 2020 mulai diinisiasi untuk pembangunan UFC sebagai pusat/sentral “pembudayaan” gerakan *urban farming* yang mencakup wahana edukasi, sosialisasi, konsultasi, promosi produk unggulan pertanian dan olahannya,



serta pusat pelayanan “home care” permasalahan pertanian perkotaan yang sekaligus berfungsi sebagai *co-working space* sebagai wujud *one stop services urban farming*. UFC beroperasi sepenuhnya mulai tahun 2021. Dari mulai awal operasional, di UFC telah dilaksanakan sebanyak 47 kali pelatihan *urban farming* dengan peserta mencapai 453 peserta. Selain itu, UFC juga digunakan untuk memproduksi tayangan untuk YouTube tentang edukasi *urban farming* yang dapat disaksikan pada *channel* Dinas Pertanian Kota Semarang.

Gambar 10.6 Urban Farming Corner (UFC)



4. Pemanfaatan lahan kosong di permukiman melalui pengembangan Kampung Tematik. Kampung Tematik adalah salah satu inovasi Kota Semarang dalam penanganan kemiskinan melalui peningkatan potensi unggulan yang ada di tiap wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mengimplementasikan *urban farming* sebagai potensi unggulan di daerahnya, di antaranya adalah Kampung Flora, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kampung Tanaman Obat Keluarga dan Sayur (Togayur), Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kampung Hijau, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kampung Sayur, Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen, dan Kampung Sayur Dawisa Gapoktan, Tegalsari, Candisari (lihat Gambar 10.7).



Gambar 10.7 Kampung Tematik yang Bertema *Urban Farming*



5. Penanaman pohon Sukun sebagai alternatif sumber karbohidrat dan upaya mitigasi bencana. Tanaman Sukun merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti karbohidrat pengganti beras. Dengan karakteristiknya yang mampu menyerap air dan menahan tanah, pohon Sukun juga dapat meminimalkan terjadinya tanah longsor. Di tahun 2021, Pemerintah Kota Semarang melakukan penanaman 6.100 batang pohon Sukun di lahan tidur dan lahan kritis seluas 40,44 hektare yang mencakup 16 kecamatan (lihat Gambar 10.8).

Gambar 10.8 Penanaman Sukun oleh Wali Kota



Pindai untuk visualisasi



6. Pemanfaatan ruang publik dan lahan tidur. Keterbatasan lahan yang ada untuk pengembangan *urban farming*, mendorong untuk dilaksanakannya *urban farming* pada ruang publik dan lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Penggunaan metode dan teknologi yang tepat membuat hal ini memungkinkan untuk dilaksanakan, seperti yang sudah terwujud di lingkungan Balai Kota Semarang. Ke depan, hal serupa akan dilakukan juga di ruang publik yang lain serta *space* yang selama ini kosong, misalnya, di median jalan, *flyover*, dan lain-lain.
7. Pemanfaatan Pekarangan Rumah Untuk Lumbung Pangan

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran tentang pentingnya penyediaan pangan di lingkungan permukiman. Hal ini terbantu dengan adanya Lumbung Pangan Kelurahan yang salah satunya disediakan oleh hasil dari *urban farming* yang dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah tangga (lihat Gambar 10.9).

Gambar 10.9 Panen Padi di Balai Kota Semarang



8. *Vertical and rooftop garden*

Pada RPJMD 2021-2026 salah satu prioritas yang akan dilakukan adalah pengembangan *vertical and rooftop garden*. Ke depan setiap bangunan harus ada *vertical and rooftop garden*. Saat ini baru disusun regulasi yang terkait.

Tujuan dari inovasi *urban farming* akan dicapai dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Jangka Pendek: Terwujudnya strategi peningkatan produktivitas pertanian perkotaan dengan pembangunan pusat pelayanan pertanian perkotaan yang lengkap, terintegrasi, dan modern dalam



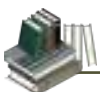
bentuk UFC guna percepatan pembudayaan *urban farming* bagi masyarakat perkotaan yang meliputi wahana edukasi, konsultasi, promosi, *marketing*, dan pelayanan *home care* permasalahan pertanian perkotaan yang sekaligus berfungsi sebagai *co-working space* sebagai wujud *one stop services urban farming*.

2. Jangka Menengah: Terwujudnya strategi pembudayaan *urban farming* melalui UFC untuk memperkuat integrasi, sinkronisasi, dan sinergi semua pemangku kepentingan guna mewujudkan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.
3. Jangka Panjang: Terwujudnya strategi pemberdayaan masyarakat perkotaan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan masyarakat.

Sasaran dari program *urban farming* adalah seluruh *stakeholder* terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat umum meliputi perorangan, kelompok, komunitas, lembaga kemasyarakatan, serta organisasi sosial.

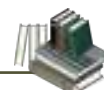
Kebaruan atau inovasi yang dikembangkan di Kota Semarang adalah terkait dengan *Urban Farming Corner* (UFC) sebagai pusat/sentral “pembudayaan” gerakan *urban farming* yang mencakup wahana edukasi, sosialisasi, konsultasi, promosi produk unggulan pertanian dan olahannya, serta pusat pelayanan “*home care*” permasalahan pertanian perkotaan yang sekaligus berfungsi sebagai *co-working space* sebagai wujud *one stop services urban farming*. Dengan demikian, *urban farming* tidak hanya berkaitan dengan subsistem budi daya tanaman saja, tetapi nantinya akan dapat dikembangkan secara holistik dan berkesinambungan sehingga mampu mewujudkan pertanian terpadu di perkotaan yang mampu mendorong terwujudnya ketahanan pangan.

Langkah penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL) pengembangan inovasi *urban farming* meliputi: (1) permasalahan dan penyebabnya; (2) *input*; (3) proses; (4) *output*; dan (5) *outcome*/dampak. Inovasi pengembangan *urban farming* ini dikembangkan karena adanya permasalahan, yaitu berkurangnya lahan pertanian di Kota Semarang dan kurangnya ketersediaan pangan yang memadai (lihat Tabel 10.5).



Tabel 10.5 Langkah Penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL) Pengembangan *Urban Farming*

Uraian	Kriteria Keberhasilan (Ciri-Ciri yang Relevan)	Indikator Kinerja
Dampak: Peningkatan ketahanan pangan masyarakat Kota Semarang.	Meningkatnya ketahanan pangan.	Tingkat ketahanan pangan.
Outcome Antara: Peningkatan luasan area <i>urban farming</i> .	Meningkatnya luasan area <i>urban farming</i> .	Luas area pertanian perkotaan.
Outcome Langsung: 1. Peningkatan produksi pertanian perkotaan. 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai <i>urban farming</i> . 3. Penguatan gerakan <i>Urban Farming</i> .	1. Meningkatnya produksi pertanian perkotaan, baik di level individu maupun organisasi. 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai <i>urban farming</i> .	1. Jumlah produksi pertanian perkotaan. 2. Jumlah individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan tentang <i>urban farming</i> .
Output: 1. Tersedianya tempat dan media edukasi, konsultasi, promosi, serta <i>marketing</i> . 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung <i>urban farming</i> .	Tersedianya tempat dan media edukasi, konsultasi, promosi, serta <i>marketing</i> produk <i>urban farming</i> beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya.	Jumlah <i>Urban Farming Corner</i> yang beroperasi.
Kegiatan/Proses: Operasionalisasi <i>Urban Farming Corner</i> Pengembangan kelembagaan <i>Urban Farming</i> .	1. Terlaksananya kegiatan edukasi, konsultasi, promosi, dan <i>marketing</i> produk <i>urban farming</i> . 2. Terlaksananya pengembangan <i>urban farming</i> .	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di <i>Urban Farming Corner</i> .
Input: 1. Regulasi 2. Alokasi Anggaran 3. Sumber Daya Manusia 4. Sarana/Prasarana	1. Tersedianya regulasi penunjang pengembangan <i>urban farming</i> . 2. Tersedianya anggaran untuk pengembangan <i>urban farming</i> . 3. Tersedianya SDM untuk pengembangan <i>urban farming</i> .	1. Jumlah Perwal Pembudayaan Pertanian Perkotaan dan SOP yang ditetapkan. 2. Jumlah anggaran untuk pengembangan <i>urban farming</i> 3. Jumlah SDM pengelola pengembangan <i>urban farming</i> .
Permasalahan: 1. Berkurangnya lahan pertanian di Kota Semarang. 2. Kurangnya ketersediaan pangan yang memadai.		



1. Input

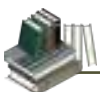
Dalam pelaksanaan pengembangan program inovasi *urban farming*, beberapa regulasi atau dasar hukum yang digunakan sebagai berikut.

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 -2031.
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021–2026.
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang.

Anggaran yang digunakan untuk pengembangan pertanian perkotaan pada tahun 2019 sebesar Rp615,38 juta, naik menjadi Rp770,08 juta tahun 2020, dan pada tahun 2021 naik lagi menjadi sebesar Rp789,33 juta. Inisiator dan penanggung jawab inovasi adalah Dinas Pertanian Kota Semarang.

Institusi pemerintah yang terlibat terdiri atas Bappeda Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, camat Se-Kota Semarang, dan lurah Se-Kota Semarang. Institusi nonpemerintah yang terlibat, di antaranya perguruan tinggi, sekolah, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi pertanian, tim penggerak PKK, media massa, perbankan, BUMN/ BUMD, kadin, karang taruna, dan kwarcab pramuka.

Sarana prasarana yang dibutuhkan adalah: (1) Akses fisik, yaitu pembangunan *Urban Farming Corner* dan koordinasi lintas instansi, lintas kabupaten/kota dan *stakeholders* terkait, serta dokumen yang tersedia; (2) Akses *online*, yaitu informasi dari



media elektronik, *website* www.disperten.semarangkota.go.id; dan (3) Transportasi, yaitu kendaraan operasional dinas pertanian.

2. Proses

Pengembangan *urban farming* di Kota Semarang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kajian penelitian tentang potensi pengembangan pertanian di Kota Semarang.
- b. Penyusunan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan.
- c. Penyusunan SOP *urban farming*.
- d. Penyusunan SOP *urban farming corner*.
- e. Penyusunan dokumen perencanaan *pembangunan urban farming corner*.
- f. Penyusunan skema pembiayaan pembangunan *urban farming corner*.
- g. Evaluasi penawaran kerja sama/CSR.
- h. Pembangunan *urban farming corner*.
- i. Operasionalisasi *urban farming corner*.
- j. Pengembangan kelembagaan *urban farming* di semua komponen masyarakat.
- k. Penguatan gerakan *urban farming*.

3. Output

Output atau keluaran dari inovasi ini adalah:

- a. Tersedianya tempat dan media edukasi, konsultasi, promosi, dan *marketing*.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung *urban farming*.
- c. Penguatan gerakan *urban farming* terwujudnya wahana pusat pelayanan pertanian.



4. *Outcome*

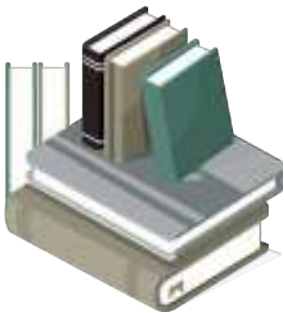
Dengan adanya *output* tersebut maka *outcome* yang diharapkan adalah:

- a. Membudayanya gerakan *urban farming* di seluruh lapisan masyarakat.
- b. Mewujudkan sumber pangan yang sehat.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan yang indah dan sehat.

Pengembangan *urban farming* dapat dilakukan oleh daerah lain yang memiliki kesamaan karakter dengan Kota Semarang, terutama daerah yang memiliki lahan perkotaan terbatas dan mengalami penurunan lahan pertanian karena perkembangan kota. Replikasi inovasi sangat dimungkinkan karena *input* yang dibutuhkan tidak memerlukan sumber daya yang terlalu besar. Secara lebih spesifik, pengembangan *urban farming* melalui *urban farming corner* dapat dilaksanakan oleh daerah lain melalui penyediaan tempat, media *online*, dan SDM pendukung.

Pengembangan *Urban Farming* akan tetap menjadi prioritas dalam pengembangan pertanian di Kota Semarang karena telah masuk dalam program prioritas Wali Kota dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya, pengembangan *urban farming* ke depan juga akan diarahkan pada peternakan perkotaan yang sudah diinisiasi di tahun 2021. Nantinya *urban farming* di Kota Semarang tidak hanya untuk produk pertanian, tetapi juga peternakan. *Urban farming corner* juga akan selalu rutin menggelar konsultasi, edukasi, dan sosialisasi tentang pengembangan *urban farming* bagi masyarakat yang disediakan secara gratis.





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

BAB 11

CAPAIAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG



Bab 11 akan menganalisis berbagai capaian pembangunan Kota Semarang. Tujuan pembangunan dan otonomi daerah, sebagaimana dirangkum dalam Gambar 11.1 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik (Kuncoro, 2014; 2018). Bab ini akan menganalisis berbagai indikator **capaian pembangunan** yang meliputi: Pertama, capaian kesejahteraan rakyat yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan (indeks gini), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kedua, **capaian pelayanan publik** yang mencakup indikator: Survei Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Keuangan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Transparansi dan Akuntabilitas berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ketiga, sejumlah penghargaan yang diperoleh atas hasil pembangunan Kota Semarang juga akan diidentifikasi.

11.1 CAPAIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Keberhasilan pembangunan, antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, terutama pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks Gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut akan dianalisis dari tahun 2010 hingga 2021 sesuai ketersediaan data.

Gambar 11.1 Perlunya Indikator Capaian Pembangunan



11.1.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi

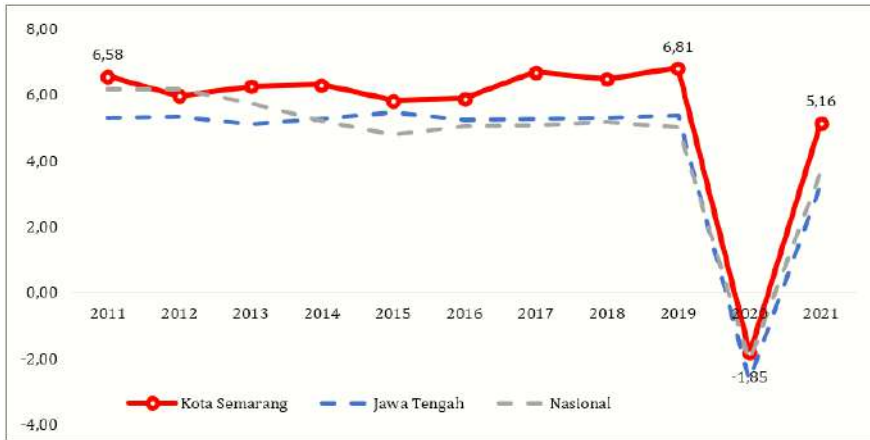
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional. Agusalim (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu daerah atau negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 11.2 memperlihatkan perbandingan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang dari tahun 2011 hingga tahun 2019 cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rentang antara 5,82% hingga 6,81%. Namun, pandemi menyebabkan LPE Kota Semarang anjlok menjadi minus 1,85% pada tahun 2020, lalu mulai pulih pada tahun 2021 menjadi 51,6%.



Gambar 11.2

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2011-2021



Sumber: Diolah dari BPS Indonesia, BPS Jawa Tengah, BPS Kota Semarang (2022)

Kendati demikian, LPE Kota Semarang masih lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengalami kontraksi minus 2,65% dan LPE nasional yang minus 2,07% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Kota Semarang melakukan akselerasi pemulihan ekonomi sehingga meningkatkan LPE-nya menjadi 5,16%. Peningkatan pertumbuhan tersebut melampaui capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 11.1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi sektor di Kota Semarang dari tahun 2011 sampai dengan 2021. Pada periode 2011-2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19, sektor ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha jasa pendidikan, informasi komunikasi, dan sektor jasa perusahaan. Sementara itu, tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 20,31%, disusul sektor jasa kesehatan serta kegiatan sosial sebesar 12,09%, dan pertambangan serta penggalian sebesar 2,49%.

Sektor yang paling terpuak pada saat pandemi Covid-19 adalah sektor transportasi dan pergudangan, di mana terjadi penurunan



pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 40,16%. Namun, pada masa pemulihan ekonomi, di tahun 2021, sektor transportasi dan perdagangan mengalami pemulihan tercepat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sektoral tertinggi, yaitu sebesar 7,53%. Di posisi kedua dan ketiga ditempati oleh sektor penyediaan akomodasi serta makan minum dan sektor perdagangan besar serta eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan masing-masing tumbuh sebesar 7,43%, serta 6,49%.

Tabel 11.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2021

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,45	1,72	4,29	2,71	4,11	1,8	-0,64	2,99	2,01	1,51	3,22
B. Pertambangan dan Pengalihan	3,23	4,29	3,68	1,14	1,33	-6,31	-7,27	-8,36	15,77	2,49	3,42
C. Industri Pengolahan	9,6	7,95	8,22	6,96	4,76	4,36	5,84	4,59	8,29	0,21	5,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,29	9,41	8,17	6,72	2,15	7,19	6,21	5,41	5,96	1,97	1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,59	-2,04	0,12	3,52	1,34	2,73	3,29	3,6	5,4	2,48	6,12
F. Konstruksi	2,51	6,27	5,02	4,48	6,02	6,09	6,37	6,2	5,27	-5,23	7,2
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,31	0,73	3,91	4,79	4,37	5,62	5,63	6,18	5,82	-3,72	6,49
H. Transportasi dan Pergudangan	5,04	7,7	10,08	10,16	5,01	6,21	7,13	7,95	10,13	-40,16	7,53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,36	8,11	6,32	7,65	6,24	7,43	7,5	7,32	5,25	-17,1	7,43
J. Informasi dan Komunikasi	8,14	9,96	7,5	12	9,75	8,59	10,43	12,26	11,38	20,31	3,21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	2,97	4,43	4,25	7,26	6,31	6,61	3,24	3,06	1,75	1,88
L. Real Estate	6,22	5,39	7,7	7,29	8,16	7,93	8,56	6,1	5,76	-0,08	3,75
M, N. Jasa Perusahaan	9,69	6,62	11,34	8,02	8,48	8,85	9,87	10,71	9,5	-7,94	3,06
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,74	0,84	2,73	1,38	5,42	5,12	5,46	3,69	3,91	-2,24	-1,47
P. Jasa Pendidikan	17,76	18,36	9,25	10,02	7,34	7,71	8,75	10,77	3,39	-2,51	0,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,97	11,17	7,25	11,2	6,4	7,89	12,71	14,07	1,56	12,09	1,26
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3,14	0,6	9,3	8,54	3,28	7,09	9,25	9,56	9,14	-14,8	0,71
PDRB	6,58	5,97	6,25	6,31	5,82	5,89	6,7	6,48	6,81	-1,85	5,16

Sumber: Diolah dari BPS Kota Semarang (2022)



11.1.2 PDRB per Kapita

Tabel 11.2 Perbandingan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Semarang	51,81	54,23	56,47	58,98	61,63	64,14	66,82	70,14	73,49	77,62	83,26	87,36
Kabupaten Kudus	67,94	69,85	71,76	73,92	76,24	78,23	79,24	80,83	82,48	84,46	83,66	81,6
Kota Surakarta	42,92	45,44	47,73	50,48	52,9	55,55	58,3	61,39	64,7	68,55	66,65	69,27
Kota Magelang	33,87	35,76	37,55	39,67	41,45	43,44	45,59	47,92	50,37	53,23	51,94	53,56
Kota Salatiga	34,25	35,93	37,36	39,11	40,69	42,21	43,82	45,65	47,65	50,03	49,51	50,74
Kabupaten Cilacap	45,65	47,21	47,83	48,34	49,47	52,14	54,51	55,65	57,05	58,37	46,43	46,82
Kota Tegal	28,73	30,42	31,52	33,15	34,66	36,38	38,21	40,34	42,55	45,07	40,08	40,94
Kabupaten Semarang	23,13	24,21	25,31	26,44	27,61	28,74	29,87	31,15	32,5	33,97	33	33,92
Kabupaten Kendal	20,84	22	22,94	24,15	25,18	26,28	27,52	28,89	30,33	31,99	29,96	30,86
Kabupaten Sukoharjo	19,81	20,77	21,79	22,84	23,87	25,01	26,22	27,51	28,88	30,51	29,37	30,31
Kabupaten Karanganyar	20,12	20,89	21,9	22,92	23,89	24,86	25,97	27,23	28,61	30,14	28,07	28,8
Kabupaten Sragen	18,41	19,53	20,62	21,91	23,04	24,33	25,65	27,09	28,56	30,3	27,05	27,81
Kota Pekalongan	16,4	17,12	17,89	18,76	19,59	20,39	21,28	22,22	23,28	24,48	23,92	24,66
Kabupaten Pati	15,74	16,55	17,42	18,33	19,06	20,09	21,07	22,15	23,29	24,64	23,09	23,71
Kabupaten Banyumas	14,78	15,59	16,34	17,31	18,12	19,05	20,02	21,11	22,28	23,61	22,07	22,73
Kabupaten Klaten	15,02	15,88	16,7	17,62	18,56	19,47	20,4	21,41	22,5	23,78	21,84	22,51
Kabupaten Boyolali	14,72	15,54	16,26	17,09	17,9	18,86	19,75	20,78	21,85	23,14	21,13	21,91
Kabupaten Rembang	14,13	14,73	15,37	16,06	16,75	17,52	18,3	19,43	20,42	21,43	20,8	21,5
Kabupaten Blora	12,21	12,68	13,23	13,87	14,41	15,12	18,6	19,64	20,42	21,28	19,78	20,46
Kabupaten Wonogiri	14,3	14,75	15,56	16,24	17,03	17,89	18,77	19,71	20,73	21,85	19,75	20,25
Kabupaten Batang	13,34	14,01	14,51	15,22	15,88	16,59	17,27	18,08	18,95	19,91	18,79	19,53
Kabupaten Temanggung	13,68	14,36	14,82	15,44	16,06	16,75	17,43	18,15	18,92	19,8	18,88	19,37
Kabupaten Jepara	12,14	12,53	13,05	13,55	13,99	14,48	14,99	15,58	16,26	17,08	17,71	18,46
Kabupaten Magelang	12,13	12,8	13,29	13,93	14,54	15,15	15,82	16,54	17,26	18,1	17,61	18,12
Kabupaten Purbalingga	12,76	13,33	13,95	14,52	15,07	15,73	16,33	17,04	17,79	18,71	17,26	17,59
Kabupaten Purworejo	12,22	12,85	13,39	13,99	14,57	15,29	16,03	16,83	17,68	18,68	17,09	17,56
Kabupaten Pekalongan	12,2	12,79	13,29	13,98	14,56	15,14	15,82	16,56	17,41	18,31	16,61	17,01
Kabupaten Brebes	11,61	12,31	12,8	13,49	14,14	14,92	15,61	16,43	17,23	18,25	16,56	16,79
Kabupaten Wonosobo	11,91	12,47	12,99	13,43	14	14,58	15,29	15,86	16,59	17,53	15,47	15,86
Kabupaten Tegal	10,81	11,45	12	12,76	13,35	14,04	14,82	15,57	16,39	17,34	15,37	15,79
Kabupaten Demak	11,01	11,47	11,85	12,33	12,73	13,34	13,88	14,54	15,18	15,91	15,3	15,55
Kabupaten Banjarnegara	10,84	11,35	11,85	12,41	12,98	13,6	14,25	14,97	15,72	16,6	14,83	15,13
Kabupaten Kebumen	10,6	11,2	11,7	12,18	12,84	13,6	14,24	14,93	15,71	16,62	14,5	14,87
Kabupaten Grobogan	9,74	9,98	10,42	10,83	11,21	11,81	12,28	12,94	13,63	14,36	13,36	13,77
Kabupaten Pemalang	8,93	9,33	9,79	10,29	10,82	11,39	11,97	12,6	13,28	14,09	12,37	12,75

Sumber: Diolah dari BPS Jawa Tengah (2022)



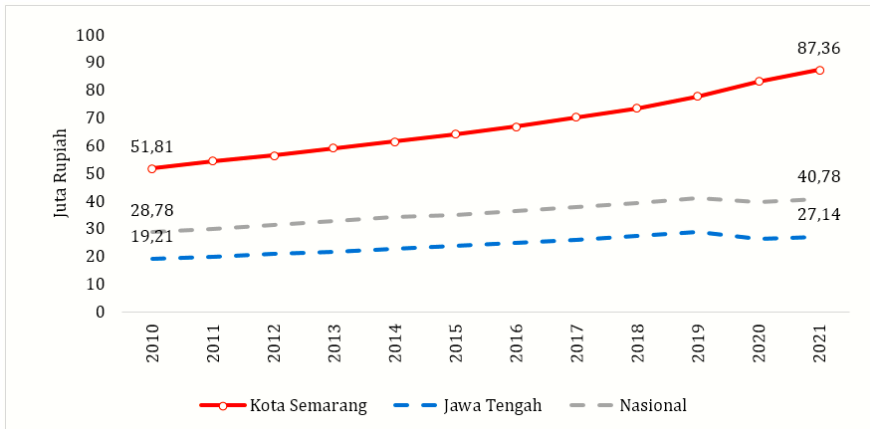
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah: semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Gambar 11.3 memperlihatkan pendapatan per kapita (memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi) penduduk Kota Semarang Tahun 2021 sebesar Rp87,36 juta per jiwa/tahun. *Trend* PDRB per kapita yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2021 mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahunnya dengan asumsi sebaran kemakmurannya merata. Walaupun terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, PDRB per kapita Kota Semarang tetap menunjukkan performa yang baik. Berbeda dengan level provinsi dan nasional, terlihat ketika terjadi pandemi Covid-19, PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia penurunan, kemudian perlahan mulai pulih pada tahun 2021. Gambar 11.2 juga memperlihatkan bahwa selama periode 2011-2021 PDRB per kapita Kota Semarang selalu lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Gap PDRB per kapita tersebut semakin melebar dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Semarang mengalami peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat dibanding masyarakat pada level provinsi di Jawa Tengah dan Nasional.



Gambar 11.3

Perbandingan PDRB per Kapita Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2021



Sumber: Diolah dari BPS Indonesia, BPS Jawa Tengah, BPS Kota Semarang (2022)

Tabel 11.2 menunjukkan perbandingan PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010 hingga 2021. Kota Semarang merupakan daerah dengan PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, diikuti oleh Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta dengan PDRB per kapita masing-masing sebesar Rp87,36 juta, Rp81,60 juta, dan Rp69,27 juta. Berbeda dengan tahun 2021, pada tahun 2010 (sebelas tahun sebelumnya), Kota Semarang hanya menempati posisi kedua setelah Kabupaten Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa setelah sebelas tahun, Kota Semarang menjadi daerah nomor satu jika dilihat dari capaian PDRB per kapitanya di Provinsi Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Pemalang yang memiliki PDRB per kapita terkecil di Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita Kota Semarang lebih besar 6,85 kali lipat pada tahun 2021. Ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Semarang secara rata-rata lebih tinggi sebesar 6,85 kali lipat dibandingkan dengan Kabupaten Pemalang.



11.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT, adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Di samping itu, *trend* indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dan pada akhirnya berimbas pada sektor ketenagakerjaan, yaitu mulai dari tidak bekerja sampai dengan pengurangan jam kerja. Selain itu, pandemi menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang akhirnya membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu maupun tempat sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton. Untuk melindungi dan mengembalikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terdampak pandemi, perlu mempersiapkan SDM pekerja sebaik mungkin, meningkatkan kompetensinya, melalui pelatihan vokasi yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pascapandemi.

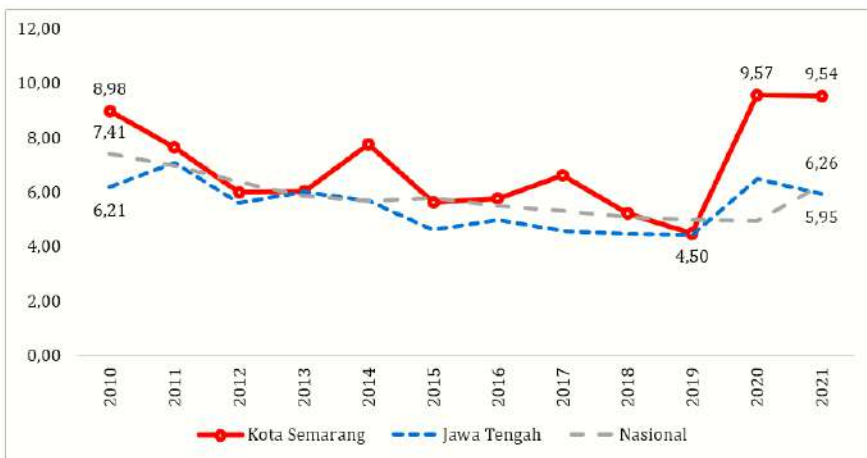
Dalam lingkup Kota Semarang, TPT dari tahun 2010-2021 mengalami fluktuasi. Selama periode 2010-2019, TPT Kota Semarang cenderung mengalami penurunan dari 8,98% pada tahun 2010 turun menjadi 4,5% pada tahun 2019. Ini adalah prestasi luar biasa, di mana selama periode tersebut Pemerintah Kota Semarang berhasil menurunkan pengangguran hampir 50%. Akan tetapi, pada tahun 2020 dunia mengalami pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada



perekonomian dunia begitu pula dengan Kota Semarang, di mana terjadi kenaikan TPT menjadi sebesar 9,57% dari sebelumnya yang hanya sebesar 4,5%. Setahun setelah pandemi Covid-19 terjadi TPT Kota Semarang masih tinggi (lihat Gambar 11.4). Hal ini disebabkan oleh sebagian besar tenaga kerja di Kota Semarang bekerja di sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19.

Secara umum TPT Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan TPT Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 5,95% dan juga nasional yang sebesar 6,26%. Selain dampak pandemi Covid-19, penyebab tingginya TPT di Kota Semarang juga disebabkan minat warga daerah lain untuk tinggal di Kota Semarang guna memperbaiki kesejahteraannya. Namun, di antaranya kurang berbekal dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai. Sementara itu, dari komposisi profesi/pekerjaan penduduk Kota Semarang terdapat peningkatan untuk jenis mengurus rumah tangga dan pelajar/mahasiswa yang bukan sebagai komponen penyumbang angkatan kerja.

Gambar 11.4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Semarang Tahun 2010–2021



Sumber: Diolah dari BPS Indonesia, BPS Jawa Tengah, BPS Kota Semarang (2022)



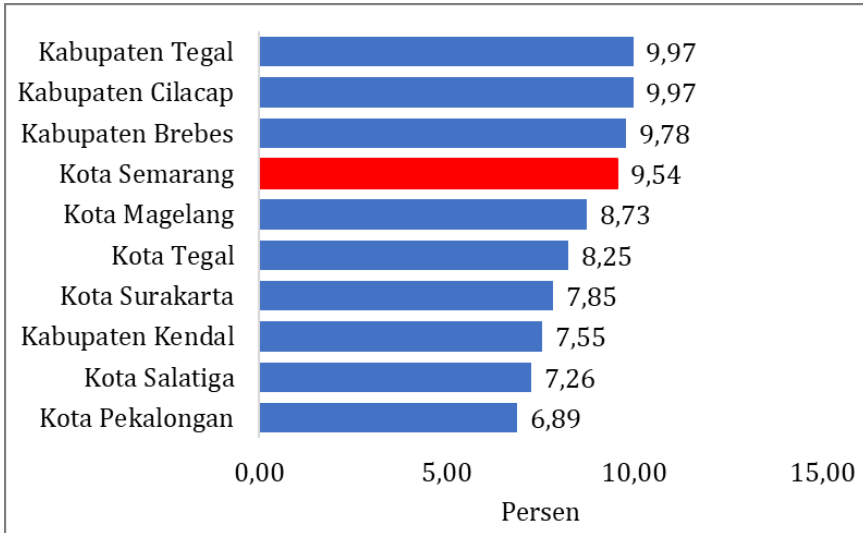
TPT Jawa Tengah ternyata di bawah nasional, meski meningkat dari 4,2% pada Februari 2020 menjadi 5,96% pada Februari 2021. TPT Kota Semarang berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2020-2021. Kendati demikian, pada tahun 2020, TPT Kota Semarang ternyata lebih rendah daripada kota-kota lain di Indonesia, seperti Padang, Makassar, Bandung, Medan, dan Surabaya.

Jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1,12 juta jiwa pada Februari 2021. TPT di provinsi ini sebesar 5,96% dari total angkatan kerjanya yang mencapai 18,82 juta jiwa. TPT tertinggi di Jawa Tengah berada di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Cilacap yang sebesar 9,97% pada 2021, diikuti oleh Kabupaten Brebes dengan TPT sebesar 9,78%, Kota Semarang sebesar 9,54%, Kota Magelang 8,73%, Kota Tegal 8,25%, Kota Surakarta 7,85%, Kabupaten Kendal 7,55%, Kota Salatiga 7,26%, serta Kota Pekalongan 6,89% (lihat Gambar 5.6). Perlu dicatat, TPT di daerah perkotaan Jawa Tengah lebih tinggi (7,06%) dibandingkan dengan perdesaan (kabupaten) yang hanya 4,75% (lihat Gambar 11.5).



Gambar 11.5

Sepuluh Kabupaten/Kota dengan TPT Tertinggi di Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber: Diolah dari BPS Jawa Tengah (2022)

Tabel 11.3 memperlihatkan secara terperinci perkembangan TPT di Kabupaten Kota di Jawa Tengah selama periode 2010-2021. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten dengan TPT terendah di Provinsi Jawa Tengah diikuti oleh Kabupaten Temanggung dan Sukoharjo, dengan TPT masing-masing secara berurutan sebesar 2,43%, 2,62%, serta 3,32% pada tahun 2021. Kota di Jawa Tengah yang memiliki TPT terendah adalah Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta dengan TPT masing-masing secara berurutan sebesar 6,89%, 7,26%, serta 7,85%.



Tabel 11.3

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2021 (%)

Kabupaten Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Cilacap	9,75	10,82	7,29	6,68	5,65	8,01	6,3	7,49	7,24	9,1	9,97
Kabupaten Banyumas	7,37	6,61	5,11	5,45	5,37	6,37	4,62	4,15	4,17	6	6,05
Kabupaten Purbalingga	3,82	5,1	5,02	5,63	5,13	4,84	5,33	6,02	4,73	6,1	6,05
Kabupaten Banjarnegara	3,1	4,97	3,69	4,16	4,06	5,05	4,72	3,99	4,44	5,86	5,86
Kabupaten Kebumen	8,02	4,73	3,58	3,52	3,25	4,14	5,58	5,48	4,69	6,07	6,03
Kabupaten Purworejo	3,4	5,3	3,2	5,15	5,1	4,01	3,64	4,43	2,91	4,04	3,59
Kabupaten Wonosobo	4,04	4,92	5,21	5,82	5,34	4,47	4,18	3,5	3,43	5,37	5,26
Kabupaten Magelang	2,97	6,83	4,38	6,13	7,45	5,16	2,44	2,89	3,07	4,27	5,03
Kabupaten Boyolali	3,9	5,81	4,43	5,44	4,95	2,03	3,67	2,18	3,09	5,28	5,09
Kabupaten Klaten	4,5	7,63	3,7	5,34	4,75	2,51	4,35	3,14	3,54	5,46	5,48
Kabupaten Sukoharjo	7,4	6,27	6,1	5,98	4,6	4,52	2,27	2,72	3,39	6,93	3,32
Kabupaten Wonogiri	4,7	3,82	3,46	3,61	3,45	3,07	2,38	2,28	2,55	4,27	2,43
Kabupaten Karanganyar	6,62	5,78	5,82	3,84	3,54	3,6	3,17	2,28	3,12	5,96	5,89
Kabupaten Sragen	4,09	8,43	5,88	5,63	6,04	4,51	4,55	4,83	3,32	4,75	4,76
Kabupaten Grobogan	4,6	5,33	4,2	6,1	4,25	5,22	3,02	2,22	3,54	4,5	4,38
Kabupaten Blora	5,49	6,9	4,75	6,23	4,3	4,68	2,85	3,3	3,82	4,89	3,81
Kabupaten Rembang	4,89	7,22	5,75	5,97	5,23	4,51	3,19	2,83	3,6	4,83	3,67
Kabupaten Pati	6,22	11,17	11,98	7,29	6,37	4,43	3,83	3,57	3,64	4,74	4,6
Kabupaten Kudus	6,22	8,32	5,89	8,07	5,03	5,04	3,56	3,28	3,8	5,53	3,77
Kabupaten Jepara	4,56	5,48	4,29	6,34	5,09	3,12	4,84	3,75	2,92	6,7	4,23
Kabupaten Demak	5,69	5,03	8,4	7,08	5,17	6,02	4,47	7,03	5,42	7,31	5,28
Kabupaten Semarang	6,25	6,16	4,87	3,9	4,38	2,57	1,78	2,25	2,54	4,57	5,02
Kabupaten Temanggung	3,6	3,54	3,39	4,87	3,19	1,5	2,97	3,23	2,98	3,85	2,62
Kabupaten Kendal	5,57	6,54	6,31	6,43	6,15	7,07	4,93	6,02	6,26	7,56	7,55
Kabupaten Batang	6,48	6,66	5,88	7,02	7,42	4,56	5,82	4,2	4,11	6,92	6,59
Kabupaten Pekalongan	4,04	6,91	5,08	4,78	6,03	5,1	4,39	4,36	4,35	6,97	4,28
Kabupaten Pemasang	11,45	7,37	4,85	6,48	7,44	6,53	5,59	6,17	6,45	7,64	6,71
Kabupaten Tegal	7,48	10,59	6,12	6,89	8,47	9,52	7,33	8,24	8,12	9,82	9,97
Kabupaten Brebes	8,21	11,08	8,22	9,61	9,53	6,49	8,04	7,2	7,39	9,83	9,78
Kota Magelang	13,28	11,51	8,99	6,75	7,38	6,43	6,68	4,78	4,37	8,59	8,73
Kota Surakarta	8,73	7,7	6,29	7,22	6,16	4,53	4,47	4,35	4,16	7,92	7,85
Kota Salatiga	10,22	9,02	6,84	6,21	4,46	6,43	3,96	4,23	4,33	7,44	7,26
Kota Semarang	8,98	7,65	6,01	6,02	7,76	5,77	6,61	5,21	4,5	9,57	9,54
Kota Pekalongan	7	8,06	7,67	5,28	5,42	4,1	5,05	6,08	5,8	7,02	6,89
Kota Tegal	14,22	9,77	8,75	9,32	9,2	8,06	8,19	7,81	8,08	8,4	8,25
Provinsi Jawa Tengah	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95

Sumber: Diolah dari BPS Jawa Tengah (2022)

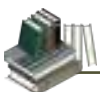


11.1.4 Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan nonmakanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

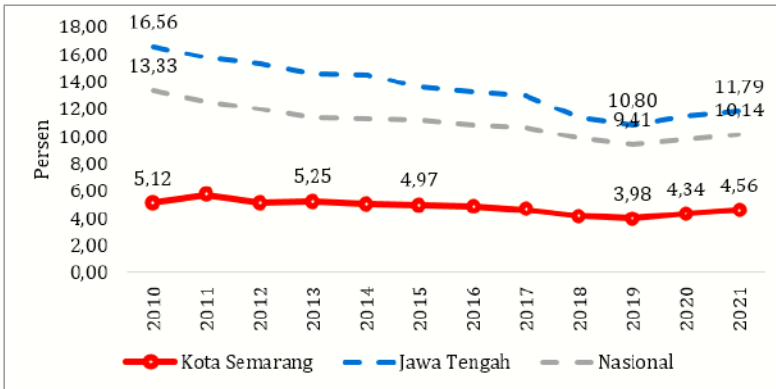
Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) (2022) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan nonmakanan sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan Kota Semarang. Pasca dipimpin Wali Kota Pak Soemarmo, tingkat kemiskinan di Kota Semarang mengalami peningkatan dari 5,12% pada tahun 2010 menjadi 5,25% tahun 2013. Pak Hendi dilantik menjadi Wali Kota Semarang pada 21 Oktober 2013 menggantikan Wali Kota Soemarmo yang tersandung masalah korupsi. Dari tahun 2013 hingga 2019, tingkat kemiskinan secara berangsur mampu diturunkan hingga 4,97% tahun 2015. Selama periode 2016-2019, di bawah kepemimpinan Pak Hendi yang terpilih sebagai Wali Kota Semarang, tingkat kemiskinan terus menurun hingga 3,98% tahun 2019 (lihat Gambar 11.6). Pandemi covid-19 yang menyebabkan tingkat kemiskinan Kota Semarang meningkat di atas 4% sejak 2020.



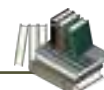
Gambar 11.6

Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010–2021 (%)



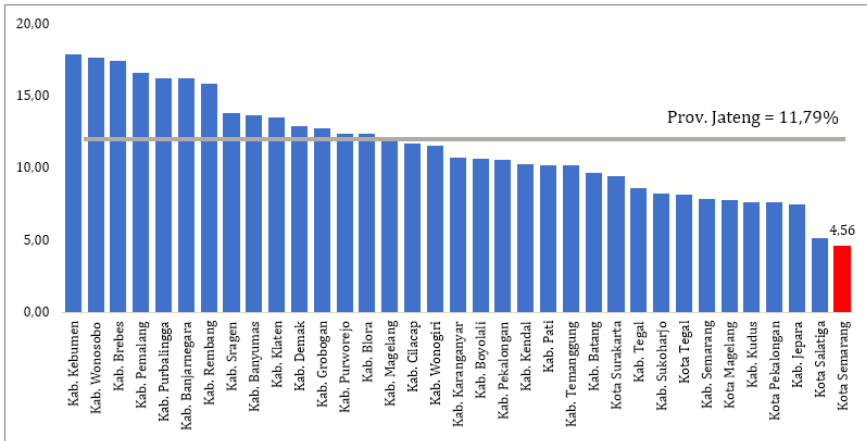
Sumber: Diolah dari BPS Indonesia, BPS Jawa Tengah, BPS Kota Semarang (2022)

Tingkat kemiskinan Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 4,56% lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan seluruh kabupaten dan kota Jawa Tengah yang sebesar 11,79% (lihat Gambar 11.7). Bahkan, tingkat kemiskinan di Kota Semarang merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Semenjak Indonesia masuk era pandemi tingkat kemiskinan Kota Semarang sedikit meningkat dari 3,98% tahun 2019 menjadi 4,34% tahun 2020 dan 4,56% tahun 2021. Perlu dicatat tingkat kemiskinan Kota Semarang masih di bawah nasional, Jawa Tengah, maupun kota-kota lainnya selama tahun 2014-2020 (lihat Gambar 11.6).



Gambar 11.7

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Semarang Dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021 (%)

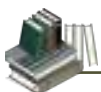


Sumber: Diolah dari BPS Jawa Tengah (2022)

11.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan dua masalah krusial, yakni kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antarkelompok masyarakat.

Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok berpendapatan bawah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun, sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan atas tumbuh dengan cepat. Hal ini akan menjadi sangat serius jika kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi gejolak politik serta sosial yang dampaknya cukup negatif.



Pada hakikatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak mengherankan bila ketimpangan itu akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan, tetapi ketimpangan yang semakin melebar harus dikendalikan. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik. Sementara itu perkembangan indikator pemerataan distribusi pendapatan selanjutnya yang sering dipakai adalah rasio Gini. Cara ini memperhatikan seluruh lapisan penerima pendapatan. Nilai indeks Gini terletak antara nol sampai dengan satu, dengan kategori, bila indeks Gini sama dengan nol, pendapatan antarmasyarakat merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila indeks Gini sama dengan satu, artinya distribusi pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja (Agusalim, 2016). Berdasarkan kategori di atas, tingkat ketimpangan pendapatan dibagi menjadi lima, seperti yang terlihat pada Tabel 11.4.

Tabel 11.4 Tingkat Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini

Indeks Gini		Keterangan
$\geq 0,80$:	Ketimpangan sangat tinggi
0,60-0,79	:	Ketimpangan tinggi
0,40-0,59	:	Ketimpangan sedang
0,20-0,39	:	Ketimpangan rendah
<0.20	:	Ketimpangan sangat rendah

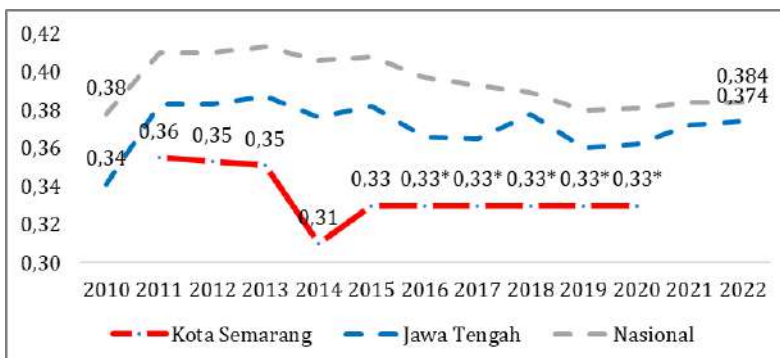
Sumber: Agusalim (2016)



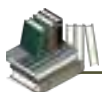
Perkembangan indeks Gini Kota Semarang menunjukkan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 masih bertahan sebesar 0,35, sempat menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,31, kemudian kembali naik sehingga data sementara sebesar 0,33 hingga tahun 2020 (RKPD Kota Semarang 2022). Besaran indeks Gini sebesar 0,33 menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat Kota Semarang termasuk kategori rendah dan keadaan ini jauh di bawah rata-rata *Gini ratio* Jawa Tengah dan Nasional. Rata-rata *Gini ratio* Kota Semarang sebesar 0,334, sedangkan rata-rata *Gini ratio* Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing- masing sebesar 0,369 dan 0,396.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap meningkatnya tingkat ketimpangan pendapatan Kota Semarang. Perkembangan indeks Gini Kota Semarang selama enam tahun terakhir menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam kondisi rendah. Pada tahun 2013, indeks Gini sebesar 0,351, sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi 0,380 dan menurun tajam hingga 0,330 di tahun 2015, sedangkan kondisi tahun 2016 adalah sebesar 0,345. Kondisi indeks Gini Kota Semarang dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 11.8, yang menunjukkan adanya tren penurunan ketimpangan pendapatan.

Gambar 11.8 Perbandingan Indeks Gini di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010–2022



Sumber: Diolah dari BPS Indonesia, BPS Jawa Tengah, RKPD Kota Semarang (2022)



Setelah melalui proses pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh tim penulis buku ini ternyata data indeks Gini Kota Semarang belum diperbarui oleh BPS Kota Semarang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan pendataan ketimpangan pendapatan masyarakat melalui pengukuran indeks Gini secara konsisten. Pendataan ini penting dilakukan untuk membantu pemerintah dalam membuat strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan ketimpangan pendataan masyarakat Kota Semarang.

11.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

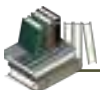
Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk untuk mencapai kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pada awalnya, konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pada usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan ketertinggalan di bidang ekonomi dan pendapat bahwa perubahan maupun perbaikan di seluruh dimensi kehidupan dapat diwujudkan melalui kemajuan di bidang ekonomi.

Demikian kentalnya paradigma tersebut sehingga sering kali terminologi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai hal yang sama. Harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang secara fundamental berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan per kapita dan penambahan produk secara kuantitas. Adapun pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas, terutama peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia (Kuncoro, 2010). Lebih lanjut, Perkins *et al.*, (2006) menjelaskan bahwa suatu wilayah yang berhasil meningkatkan pendapatannya, tetapi gagal dalam meningkatkan usia harapan hidup dan taraf kesehatan penduduk, tidak berhasil mengurangi angka kematian bayi serta tidak mampu meningkatkan pendidikan warganya dapat dianggap telah gagal dalam melakukan pembangunan.



Selain itu, pengalaman selama lebih dari empat dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, tetapi belum mencukupi persyaratan untuk dapat meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk di berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut, Perkins *et al.*, (2006) memaparkan bahwa terdapat paling sedikit tiga alasan utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dinikmati oleh semua penduduk secara merata. Kedua, hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak ditransfer untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, tetapi penduduk yang telah sejahtera menjadi semakin sejahtera dan penduduk yang sebelumnya kurang sejahtera hanya mengalami sedikit peningkatan (dalam hal ini berlaku pandangan bahwa penduduk kaya semakin kaya dan penduduk miskin semakin miskin).

Berdasarkan posisi relatif IPM 2021, capaian IPM Kota Semarang sebesar 83,55 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 72,16 dan nasional sebesar 72,3 dengan selisih capaian masing-masing sebesar 11,4 dan 11,3 (lihat Gambar 11.9). Menurut Agusalim *et al.*, (2022) daerah dengan IPM yang tinggi dalam jangka panjang akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.



Gambar 11.9

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2010–2021



Sumber: Diolah dari BPS Indonesia, BPS Jawa Tengah, BPS Kota Semarang (2022)

IPM Kota Semarang merupakan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021 berkisar antara 82-83,55. Kisaran angka IPM tersebut adalah tertinggi dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Kabupaten Brebes memiliki IPM terendah pada periode yang sama antara 64.86-66.32. Nilai IPM Kota Semarang juga menempati urutan pertama dibandingkan dengan nilai IPM empat kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia (lihat Tabel 11.5).

Indikator pembentuk IPM Kota Semarang, meliputi Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2010-2021. Pencapaian indikator pembentuk IPM, baik usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga sudah berada di atas pencapaian indikator pembentuk IPM Provinsi Jawa Tengah.



Tabel 11.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Cilacap	68.9	69.56	69.98	69.95	70.42
Kabupaten Banyumas	70.75	71.3	71.96	71.98	72.44
Kabupaten Purbalingga	67.72	68.41	68.99	68.97	69.15
Kabupaten Banjarnegara	65.86	66.54	67.34	67.45	67.86
Kabupaten Kebumen	68.29	68.8	69.6	69.81	70.05
Kabupaten Purworejo	71.31	71.87	72.5	72.68	72.98
Kabupaten Wonosobo	66.89	67.81	68.27	68.22	68.43
Kabupaten Magelang	68.39	69.11	69.87	69.87	70.12
Kabupaten Boyolali	72.64	73.22	73.8	74.25	74.4
Kabupaten Klaten	74.25	74.79	75.29	75.56	76.12
Kabupaten Sukoharjo	75.56	76.07	76.84	76.98	77.13
Kabupaten Wonogiri	68.66	69.37	69.98	70.25	70.49
Kabupaten Karanganyar	75.22	75.54	75.89	75.86	75.99
Kabupaten Sragen	72.4	72.96	73.43	73.95	74.08
Kabupaten Grobogan	68.87	69.32	69.86	69.87	70.41
Kabupaten Blora	67.52	67.95	68.65	68.84	69.37
Kabupaten Rembang	68.95	69.46	70.15	70.02	70.43
Kabupaten Pati	70.12	70.71	71.35	71.77	72.28
Kabupaten Kudus	73.84	74.58	74.94	75	75.16
Kabupaten Jepara	70.79	71.38	71.88	71.99	72.36
Kabupaten Demak	70.41	71.26	71.87	72.22	72.57
Kabupaten Semarang	73.2	73.61	74.14	74.1	74.24
Kabupaten Temanggung	68.34	68.83	69.56	69.57	69.88
Kabupaten Kendal	70.62	71.28	71.97	72.29	72.5
Kabupaten Batang	67.35	67.86	68.42	68.65	68.92
Kabupaten Pekalongan	68.4	68.97	69.71	69.63	70.11
Kabupaten Pemalang	65.04	65.67	66.32	66.32	66.56
Kabupaten Tegal	66.44	67.33	68.24	68.39	68.79
Kabupaten Brebes	64.86	65.68	66.12	66.11	66.32
Kota Magelang	77.84	78.31	78.8	78.99	79.43
Kota Surakarta	80.85	81.46	81.86	82.21	82.62
Kota Salatiga	81.68	82.41	83.12	83.14	83.6
Kota Semarang	82.01	82.72	83.19	83.05	83.55
Kota Pekalongan	73.77	74.24	74.77	74.98	75.4
Kota Tegal	73.95	74.44	74.93	75.07	75.52
Provinsi Jawa Tengah	70.52	71.12	71.73	71.87	72.16
Provinsi DKI Jakarta	80.06	80.47	80.76	80.77	81.11
Kota Surabaya	81.07	81.74	82.22	82.23	82.31
Kota Bandung	80.31	81.06	81.62	81.51	81.96
Kota Medan	79.98	80.65	80.97	80.98	81.21
Indonesia	70.81	71.39	71.92	71.94	72.29

Sumber: BPS Jawa Tengah (2022)



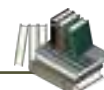
Pada tahun 2014, terdapat metode baru untuk menghitung IPM dan indikator kompositnya. Capaian indikator komposit IPM Kota Semarang pada tahun 2021, yaitu UHH Kota Semarang sebesar 77,51, kemudian indikator komposit RLS sebesar 10,78 tahun, HLS sebesar 15,53 tahun, dan pengeluaran per kapita disesuaikan yang didekati dengan indikator paritas daya beli (PPP) yang sebesar Rp15,43 juta. Perkembangan indikator pembentuk IPM Kota Semarang tahun 2010–2021 dapat dilihat pada Tabel 11.6.

Tabel 11.6 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2010-2021

Tahun	UHH	HLS	RLS	PPP-Juta Rupiah
2010	77,17	13,12	9,61	11,99
2011	77,17	13,26	9,80	12,27
2012	77,18	13,37	9,92	12,49
2013	77,18	13,66	10,06	12,71
2014	77,18	13,97	10,19	12,80
2015	77,20	14,33	10,20	13,59
2016	77,21	14,70	10,49	13,91
2017	77,21	15,20	10,50	14,33
2018	77,23	15,50	10,51	14,90
2019	77,25	15,51	10,52	15,55
2020	77,34	15,52	10,53	15,24
2021	77,51	15,53	10,78	15,43

Sumber: BPS Kota Semarang (2022)

Pada masa pandemi Covid-19, IPM Kota Semarang sedikit menurun dari 83,19 pada tahun 2019 menjadi 83,05 pada tahun 2020, tetapi masih di atas nasional dan Jateng (lihat Gambar 11.9). Semua komponen IPM masih meningkat, tetapi yang merosot adalah pengeluaran per kapita karena daya beli masyarakat Kota Semarang menurun (lihat Tabel 11.6).



11.2 CAPAIAN PELAYANAN PUBLIK

Salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan publik (*public service*), selain tugas pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Meski demikian, sering kali layanan publik dikeluhkan warga karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Pelayanan publik mencakup hal yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah Kota Semarang dan pengelolaan keuangannya.

Tabel 11.7 merangkum tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Kota Semarang khususnya mencapai misi yang ke-2, dengan *tagline* “Semarang Melayani”, yaitu mewujudkan pemerintahan yang andal untuk meningkatkan pelayanan publik. Ada dua tujuan utama pelayanan publik yang difokuskan oleh Pemda Kota Semarang: Pertama, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, dengan sasaran “Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani”. Untuk itu, ditetapkan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

1. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 85.
2. Opini BPK meraih predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP).
3. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal 70 (BB).
4. Nilai dan satuan kinerja pemerintah daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) minimal 3 (ST atau Sangat Tinggi). EKPPD dinilai Tinggi (T) bila nilainya lebih dari 2 hingga 3; EKPPD dinilai Sedang (S) bila nilainya lebih dari 1 hingga 2; EKPPD dinilai Rendah (R) bila nilainya lebih dari 0 hingga 1.

Kedua, terwujudnya kondusivitas wilayah wilayah, dengan sasaran “Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat”. Untuk itu, ditetapkan indikator kinerja dan targetnya adalah angka kriminalitas 1.866 kejadian.



Tabel 11.7 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kota Semarang

URAIAN	TUJUAN		SASARAN	SASARAN	
	INDIKATOR	TARGET		INDIKATOR KINERJA	TARGET
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK					
TAGLINE : SEMARANG MELAYANI					
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai >70	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks 85
				Opini BPK	Predikat WTP
				Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai > 70 /BB
				Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai >3 /ST
4. Terwujudnya kondusivitas wilayah	Persentase Penurunan Gangguan Kesammanan dan Ketertiban	46,8 %	2. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.366-kejadian

Sumber: Pemerintah Kota Semarang (2021)

11.2.1 Survei Kepuasan Masyarakat

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPARB) mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, yang salah satunya melalui penetapan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik.

SKM menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan serta kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tabel 11.8 menunjukkan kecenderungan angka IKM Kota Semarang yang terus meningkat atas kinerja perangkat daerah Kota Semarang. Kinerja perangkat daerah dinilai semakin lama semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, nilai IKM Kota Semarang cenderung meningkat dari 78,8 tahun 2016 menjadi 83,8 pada tahun 2019.



Tabel 11.8 IKM Kota Semarang Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
IKM	NA	78,8	79,32	83,25	83,83

Sumber: Pemerintah Kota Semarang (2021)

Nilai SKM Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar 86,68 (B), yang artinya tingkat pelayanan publik di Kota Semarang tergolong “baik” karena berada di antara nilai 76,61-88,3. Kendati demikian, Gambar 11.10 menunjukkan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai berikut.

1. Ada 2 layanan di Kota Semarang yang nilainya masih “C” atau kurang baik.
2. Ada 48 layanan di Kota Semarang yang nilainya “B” atau tergolong baik.
3. Ada 31 layanan di Kota Semarang yang nilainya “A” atau tergolong “sangat baik” karena nilainya berkisar antara 88,31-100.

Gambar 11.10 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2022)

11.2.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan

Tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pemeriksaan LKPD, yaitu:

1. Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atau *unqualified opinion*, yang artinya sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
2. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** atau *qualified opinion*, yang berarti sistem pengendalian internal memadai, tetapi terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
3. **Tidak Wajar (TW)** atau *adverse opinion*, yang artinya sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian, secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
4. Menolak memberikan opini atau **Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, yang artinya terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan/atau sistem pengendalian internal yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data terkait penjualan atau aktiva tetap sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva



tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sejak tahun 2016, Laporan Keuangan Pemda Kota Semarang mendapatkan opini WTP (*unqualified opinion*) (lihat Tabel 11.9). Artinya, BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Pemkab Kota Semarang telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. BPK sebagai pengawas keuangan negara selalu memberi opini **WTP** kepada Kota Semarang dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini berarti BPK menyatakan bahwa pengendalian internal Pemerintah Kota Semarang sudah memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Pada tahun 2014 dan 2015, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang masih **WDP**. Secara keseluruhan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP sejak tahun 2016.

Tabel 11.9 Opini BPK Atas LKPD Kota Semarang Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Bappeda Kota Semarang (2022)



Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menyampaikan bahwa predikat opini tertinggi dari BPK RI sejak pemeriksaan keuangan tahun 2016 bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah. “Saya yakin bukan hanya kinerja teman-teman daerah, tapi juga kinerja dari BPK. Terbukti semua pemerintah kabupaten kota di



Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 daerah, tahun ini mendapat opini WTP. Ini artinya ada perkembangan yang semakin baik,” ungkap Hendi, sapaan akrabnya (Pemprov Jateng, 2022). Menurut Hendi, opini WTP menjadi penghargaan bagi seluruh Kepala daerah karena setiap kepala daerah pastinya menginginkan wilayahnya semakin maju. Ditambahkan, birokrasi saat ini diibaratkan akuarium yang transparan. Di mana, semua lapisan masyarakat dapat melihat dan mengawasi kinerja pemerintah. Birokrasi saat ini seperti akuarium, di mana mulai masyarakat bisa melihat transparansi birokrasi pemda, LSM dan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian sampai KPK.

11.2.3 Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Ketentuan mengenai SAKIP telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Selanjutnya, diatur dalam Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2015-2021, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kota Semarang mendapatkan penilaian yang semakin membaik (lihat Gambar 11.11). Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meningkat dari CC tahun 2015 menjadi B sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Berdasarkan Tabel 11.10 dapat dilihat peningkatan kinerja SAKIP Kota Semarang selama tahun 2017-2021 dengan Predikat B dengan skor antara 60,28 hingga 69,44. Dengan kata lain, ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Kota Semarang sudah memadai serta semakin baik dari waktu ke waktu.

Tabel 11.10 Nilai SAKIP Kota Semarang Tahun 2015-2021

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai SAKIP	52,42/CC	55,94/CC	60,28/B	67,92/B	68,12/B	68,52/B	69,44/B

Sumber: Bappeda Kota Semarang (2022)



11.3 PENGHARGAAN YANG DIRAIH KOTA SEMARANG

Berdasarkan capaian pembangunan yang sudah diuraikan dalam Subbab 11.1 dan 11.2, tidak mengherankan Kota Semarang mendapatkan berbagai macam penghargaan. Pertama, **Peringkat Pertama Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota Tahun 2019, 2020, 2021** (lihat Gambar 11.11). Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam acara Musrenbangnas setiap tahun. Bappenas menganugerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam: (1) Menghasilkan perencanaan yang berkualitas; (2) Mencapai target-target pembangunan daerah; (3) Melakukan inovasi pembangunan daerah. Kota Semarang telah meraih penghargaan PPD selama tiga tahun berturut-turut yang diikuti oleh 98 kota, 416 kabupaten, dan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Wali Kota Semarang Pak Hendi waktu menerima penghargaan Piagam PPD 2021 secara langsung dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di kantor Bappenas, Jakarta Pusat menekankan pentingnya “kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas” (Kompas, 25/11/2021). “Kerja keras” memiliki arti disiplin: Pekerjaan pada hari ini harus diselesaikan hari itu juga. Untuk “kerja cerdas”, intinya memilih prioritas untuk kepentingan Kota Semarang dari segudang problematika dan kekurangan dana. “Kerja ikhlas” artinya bekerja tidak hanya mengharap gaji dan tunjangan, tetapi juga mendapat pahala dari Allah *Subhānahu wa ta’āla*.



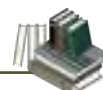
Gambar 11.11

Kota Terbaik Pertama Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota Tahun 2019, 2020, 2021



Kedua, **penghargaan Kota Semarang sebagai Smart City** berupa: (1) Piagam penghargaan *Smart City 2021* yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada kegiatan *awarding* di ICE BSD City (14/12/2021), yang merupakan apresiasi kepada kepala daerah atas pencapaian penyusunan *masterplan* dan implementasi program kota cerdas, yakni Gerakan Menuju 100 Smart City 2021; (2) Penghargaan atas kinerja dalam membangun *Smart City* dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dari Jaringan Media Siber Indonesia atas lompatan pembangunan dengan berbagai inisiasi inovasi kota cerdas (12/11/2021).

Berbagai penghargaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Wali Kota Semarang Pak Hendi yang merupakan Wali Kota Semarang periode 2013-2015, 2016 hingga saat ini. Pak Hendi termasuk salah satu sosok wali kota yang kekinian dan dekat dengan rakyat, baik dari kalangan muda hingga dewasa, kedekatannya terbukti dengan berinteraksi serta turun langsung ke lingkungan masyarakat. Pak Hendi mampu mewujudkan visi dan misi Kota Semarang dengan menerapkan sistem *Smart City* sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan perubahan yang dibawa oleh Hendi tersebut berhasil mengantarkannya mendapat penghargaan *Asia Best Mayor of*



The Year 2019 dalam Asia Global Council dan berbagai penghargaan lainnya (lihat Tabel 11.11). Predikat tersebut diberikan kepada Hendi karena prestasi dan keberhasilan dalam membangun Kota Semarang yang lebih dinamis serta mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Tabel 11.11 Penghargaan, Lembaga Pemberi, dan Tahun Diperoleh

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun
1	GRATIFIKASI AWARD	KPK RI	2013, 2014
2	BEST CITY MANAGER	EUROPE BUSINESS ASSEMBLY	2014
3	SATYA LENCANA KARYA BHAKTI PRAJA NUGRAHA	PRESIDEN RI	2014, 2015
4	PEMBINA PELAYANAN PUBLIK TERBAIK DI INDONESIA	KEMENPAN RB RI	2016, 2017, 2018, 2019
5	TOKOH UTAMA PENGGERAK KOPERASI	DEWAN KOPERASI INDONESIA	2017
6	TANDA JASA BAKTI KOPERASI DAN UMKM	KEMENKOP UMKM RI	2018
7	UPAKARTI PRABASWARA	KEMENPERIN RI	2018
8	ASIA BEST MAYOR 2019	ASIA GLOBAL COUNCIL	2019
9	PEOPLE OF THE YEAR	METRO TV	2019, 2020
10	PEMBINA OLAH RAGA BERPRESTASI TERBAIK NASIONAL	KEMENPORA RI	2020
11	WALI KOTA SEMARANG HENDRAR PRIHADI FIGUR PEMBAWA PERUBAHAN	SEVEN MEDIA ASIA	2021
12	APRESIASI LEADER IN PANDEMIC DATA MANAGEMENT UNTUK WALI KOTA SEMARANG	MENTERI PAN dan RB	2021
13	KEPALA DAERAH INOVATIF KATEGORI PELAYAN PUBLIK	MNC TV	2021
14	PENGHARGAAN ATAS KINERJA MEMBANGUN SMART CITY YANG MELIBATKAN ELEMEN SELURUH MASYARAKAT	KETUA JARINGAN MEDIA SIBER INDONESIA (JMSI)	2021
15	PENGHARGAAN SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KATEGORI "PELAYANAN PRIMA" TAHUN 2021	MENTERI PAN dan RB	8 MARET 2022



Konsep *Smart City* yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi *mobile* sengaja diterapkan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam pengimplementasian sistem pelayanan *online* tersebut meliputi *systemic* (sistem saling terhubung), *monitorable* (dapat dipantau), *accessible* (mudah diakses), *reliable* (dapat dipercaya), dan *time bound* (batasan waktu) sehingga masyarakat dengan mudah serta cepat dapat mengetahui kepastian dari setiap tahapan proses layanan publik.

Salah satu contoh inovasi yang dilakukan Hendrar Prihadi adalah program **Ijus Melon** (Izin Usaha Mikro Melalui *Online*) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Program perizinan yang *online* tersebut dirancang untuk menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan serta mempersempit potensi pungutan liar. Para pelaku usaha mikro juga mendapat beberapa manfaat dengan melakukan perizinan secara *online* melalui program Ijus Melon, yaitu mendapat informasi kemitraan, pemasaran, dan fasilitas pembiayaan melalui fitur *SMS Gateway*. Dengan segala kemudahan yang telah menguntungkan masyarakat, Program Ijus Melon juga terpilih menjadi salah satu **Top 99 Inovasi Pelayanan Publik** dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, Hendi juga merilis aplikasi **Lapor Hendi** sebagai bentuk sistem yang mengawasi seluruh kegiatan layanan publik. Lapor Hendi ditujukan kepada masyarakat Kota Semarang untuk melaporkan segala pengaduan dan keluhan yang dapat diakses dalam halaman <https://laporhendi.semarangkota.go.id/>. Aplikasi Lapor Hendi diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2017 tentang **Pedoman Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik**. Dengan pemanfaatan teknologi termasuk media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan aplikasi Lapor Hendi, dapat memudahkan masyarakat maupun pemerintah dalam mengetahui serta mengatasi sebuah pengaduan secara tepat dan cepat paling lama lima hari kerja.



Apabila dilihat dari suksesnya perubahan Kota Semarang, gaya kepemimpinan Hendrar Prihadi dapat dikategorikan dalam **kepemimpinan transformasional**. Menurut Bass (1985), kepemimpinan transformasional merupakan proses mengalihkan organisasi beserta orang-orang yang berada di dalamnya yang mengutamakan pada kepemimpinan yang karismatik dan efektif. Kepemimpinan transformasional berkaitan dengan emosi, nilai-nilai, etika, memenuhi kebutuhan pengikutnya (masyarakat), dan memperlakukan mereka sebagai manusia penuh. Apabila dilihat dari segala bentuk inovasi dan perubahan yang dibawa oleh Hendrar Prihadi, penerapan konsep *Smart City* dengan berbagai program, seperti program Ijus Melon dan aplikasi Lapori Hendi merupakan usaha atau wujud nyata Hendi dalam membangun Kota Semarang ke arah yang lebih baik (Syavitri, 2021).

Sebagai Wali Kota Semarang, Hendi memiliki kekuasaan penuh untuk memberikan arahan bagi masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi Kota Semarang. Hendi mengajak para *followers*, yaitu masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam rangka menyukseskan konsep *Smart City* sebagai bentuk perubahan Kota Semarang. Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi dengan sosial media justru mendekatkan hubungan Hendi sebagai wali kota dengan masyarakat.

Dengan demikian, terbukti bahwa peran Hendrar Prihadi sebagai pemimpin Kota Semarang dalam memahami lingkungan dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat sangatlah penting. Melalui berbagai inovasi dan perubahan serta kedekatannya dengan masyarakat menunjukkan secara jelas bahwa Hendi merupakan sosok pemimpin transformasional yang sukses membawa Kota Semarang menjadi lebih maju. Hal tersebut terbukti dengan Tabel 11.12, di mana masyarakat merasa puas dalam sembilan dimensi pelayanan publik yang dinilai “sangat baik” dan “baik” sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Semarang. Tak



heran jika transformasional menjadi andalan Hendi dalam membangun Semarang lebih baik dalam perencanaan, capaian pembangunan, dan inovatif.

Tabel 11.12 Hasil SKM per Unsur Pelayanan OPD Penyelenggara Pelayanan Publik Kota Semarang Tahun 2021

No	Unsur	Unsur SKM	Kategori
1	Biaya	94,69	Sangat Baik
2	Pengaduan	94,57	Sangat Baik
3	Perilaku	86,71	Baik
4	Produk Spesifikasi	85,79	Baik
5	Kompetensi	85,70	Baik
6	Prosedur	85,07	Baik
7	Persyaratan	84,86	Baik
8	Sarpras	84,59	Baik
9	Waktu	84,18	Baik

Sumber: SKM (2021)



BAB 12

EPILOG



Rumusan masalah penelitian yang dijawab tuntas dalam buku ini adalah: (1) Apa potensi ekonomi Kota Semarang berdasarkan lapangan usaha?; (2) Apa masalah mendasar yang dihadapi Kota Semarang?; (3) Apakah isu strategik yang muncul di Kota Semarang?; (4) Bagaimanakah pemda Kota Semarang melakukan perubahan dengan perencanaan (*change by design*)?; (5) Mengapa visi dan misi Kota Semarang perlu diubah?; (6) Bagaimana strategi kebijakan mewujudkan visi “Semarang Kota Perdagangan & Jasa Yang Hebat (Makin Hebat) Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”?; (7) Apa program utama dan inovasi daerah yang diimplementasikan oleh Kota Semarang?; (8) Mengapa Kota Semarang dapat meraih berbagai macam penghargaan nasional dan internasional?

Bab 1 merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang penulisan buku ini, perumusan masalah, tujuan penulisan buku, kegunaan penelitian, *outline* buku. Dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 1,66 juta jiwa, Kota Semarang menempati urutan kelima kota metropolitan terbesar di Indonesia, di bawah DKI Jakarta (10,61 juta jiwa), Surabaya (2,88 juta jiwa), Bandung (2,45 juta jiwa), dan Medan (2,46 juta jiwa). Setidaknya ada dua penghargaan untuk Kota Semarang yang menjadi alasan utama penulisan buku ini, yaitu (1) Kota Semarang berhasil dinobatkan sebagai kota cerdas Indonesia pada penghargaan bertaraf nasional *Goesmart 2019* yang digelar di

Aula Barat Institut Teknologi Bandung; (2) Kota Semarang menjadi Kota Terbaik di Indonesia dalam hal Perencanaan dan Pencapaian Kota berturut-turut selama tiga tahun dari tahun 2019 hingga 2021.

Bab 2 menelusuri teori aglomerasi kota dan teori *smart city* yang digunakan sebagai dasar kajian buku ini. Perspektif modern mengenai aglomerasi menunjukkan beberapa kelemahan teori klasik. Pada konteks ini, tiga jalur pemikiran teori aglomerasi kota, yaitu (1) teori-teori baru mengenai eksternalitas dinamis (*dynamic externalities*); (2) mazhab pertumbuhan perkotaan; dan (3) paradigma berbasis biaya transaksi. (Kuncoro, 2012). Dengan menerapkan teori dan praktik terbaik *smart city*, Kota Semarang sudah menerapkan konsep *Smart City* yang menawarkan: (1) fasilitas yang dinamakan 6S, yaitu: *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment*; (2) konsep dasar 4K, yang meliputi: Keberlanjutan, Konektivitas, Kreativitas, dan Keterpaduan Sosial.

Bab 3 telah menjabarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan buku ini. Rancangan penelitian dalam kajian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu: ilmu ekonomika regional, geografi, dan strategi. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam kajian dan penulisan buku ini (lihat Gambar 3.2) menggunakan: (1) metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis data panel, yang terdiri dari data *cross section* serta *time series* selama sebelas tahun terakhir; (2) analisis data dimulai dari persiapan penyusunan proposal dan *desk study*, dengan mengumpulkan dokumen perencanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Bab 4 menjabarkan bagaimana potensi, struktur ekonomi, dan sektor unggulan Kota Semarang. Selama tahun 2010-2021, struktur ekonomi Kota Semarang bertumpu pada sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan besar-eceran-reparasi mobil-sepeda motor, yang menyumbang PDRB Kota Semarang sekitar



69%. Berdasarkan pengeluaran agregat, investasi (PMTB) memberikan kontribusi terbesar (65-71%) dalam PDRB Kota Semarang, diikuti konsumsi rumah tangga (42-45%), dan konsumsi pemerintah (12-14%). Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) dan Tipologi Klassen, dapat disimpulkan bahwa visi Kota Semarang tahun 2016-2021 sebagai kota perdagangan serta jasa masih relevan karena sektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang merupakan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota Semarang.

Bab 5 mengidentifikasi berbagai masalah mendasar yang dihadapi Kota Semarang sebelum Hendrar Prihadi dipilih rakyat sebagai Wali Kota Semarang. Masalah mendasar tersebut setidaknya adalah tingginya kemiskinan, tingginya pengangguran, buruknya infrastruktur, tingginya ketimpangan, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tingginya angka kriminalitas, dan merebaknya korupsi.

Bab 6 menganalisis berbagai isu strategik sebelum Bapak Hendrar Prihadi mendapat mandat rakyat sebagai Wali Kota Semarang. Isu strategik yang dimaksud setidaknya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar, inovasi serta daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan, kemerosotan mutu lingkungan hidup, banjir dan rob, serta masih rendahnya iklim investasi.

Bab 7 menguraikan penyebab utama perlunya “change by design” dirancang agar berbagai masalah dan isu strategik yang muncul dapat dieliminasi. Perubahan yang direncanakan menggunakan pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, dan politik.

Bab 8 menjelaskan visi dan misi Kota Semarang. Perencanaan skenario dibutuhkan (lihat Gambar 2.3). Perubahan visi, misi, dan strategi diperlukan untuk mewujudkan “Semarang Kota Perdagangan & Jasa yang Hebat dan Makin Hebat”.



Bab 9 menguraikan bagaimana strategi perubahan yang dibutuhkan Kota Semarang agar tetap bertahan dalam menghadapi konsep *new normal* di tengah pandemi virus Covid-19? Pandemi ini membuat segala aktivitas menjadi terbatas sehingga Kota Semarang mau tidak mau harus menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat dan provinsi.

Bab 10 menjabarkan program utama dan inovasi pembangunan yang dilakukan oleh Kota Semarang. Apa saja program unggulan yang diterapkan? Mengapa diperlukan inovasi? Inovasi adalah pembaharuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang merupakan gagasan kreatif, orisinal, dan/atau adaptasi/modifikasi. Latar belakang inovasi dan masalah yang akan dipecahkan melalui pelaksanaan inovasi telah dijabarkan, ditambah keterkaitan inovasi yang dikembangkan dengan tema RKPD, ruang lingkup inovasi, tujuan dan sasaran inovasi, serta kebaruan inovasi yang dikembangkan. Rencana Inovasi dipaparkan dengan menjelaskan kerangka kerja dari inovasi dari tahap input, proses, hasil (*output*), dan dampak (*outcome*) inovasi. Hasil dan dampak inovasi pembangunan Kota Semarang juga dianalisis.

Bab 11 menganalisis berbagai capaian pembangunan Kota Semarang. Bab ini akan menganalisis berbagai indikator capaian pembangunan yang meliputi: (1) Capaian kesejahteraan rakyat yang mencakup indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan (indeks gini), Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Capaian pelayanan publik yang mencakup indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Keuangan berdasarkan hasil audit BPK, dan Transparansi serta Akuntabilitas berdasarkan evaluasi SAKIP. Sejumlah penghargaan yang diperoleh atas hasil pembangunan Kota Semarang juga telah diidentifikasi. Ini tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Wali Kota Semarang Pak Hendi yang transformatif yang mampu menerapkan *smart city* dan meraih capaian kesejahteraan rakyat serta pelayanan publik yang mengesankan.



Dengan capaian pembangunan dan pelayanan publik yang mengesankan, tidak berlebihan bila Wali Kota Semarang, Pak Hendi,



bersama Hermawan Kertajaya *Founder* dan *Chairman* MarkPlus Corp meluncurkan *brand* baru bagi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah: “Simpul Ekonomi Jawa” (Jateng.inews.id, 24/8/2022). Strategi *city branding* “Kota Semarang Simpul Ekonomi Jawa” memosisikan Ibu Kota Provinsi Jateng sebagai “hub”, yang dapat diartikan: (1) simpul

penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Timur, sekaligus antara Jawa Tengah bagian selatan dan DIY dengan Jawa bagian utara; (2) simpul penghubung ekonomi kreatif dan pariwisata karena Kota Semarang memiliki sektor unggulan perdagangan serta jasa yang didukung dengan pelabuhan laut dan bandara udara. Pelabuhan laut Tanjung Emas merupakan pelabuhan di Kota Semarang yang tadinya berada di dekat bukit Simongan sejak abad ke-16 lalu dipindah ke Kali Baru, memiliki fasilitas peti kemas, kolam pelabuhan, dermaga, fender, gudang, dan terminal seluas 3000 m² (Pelindo, 2022), yang memungkinkan Semarang menjadi kota pelabuhan, dagang, serta pengeksport berbagai komoditas dari Jateng dan DIY. Bandara Ahmad Yani Semarang merupakan pintu gerbang Provinsi Jateng yang tadinya memiliki kapasitas hanya 800.000 penumpang per tahun, kini mampu menampung 6,5-7 juta penumpang per tahun, luasan terminal 58.652 m², dan menjadi bandara di atas air (*floating*) pertama di Indonesia dengan desain mengusung konsep *eco-airport* serta *go green* (Kemenhub, 2022).

Posisi Semarang sebagai “Simpul Ekonomi Jawa” perlu dibarengi dengan membangun pemerintah yang lebih profesional dan melayani dengan konsep **T.O.P Government** yang berani membangun pemerintah



yang “trusted” (tepercaya), “open” (terbuka), serta “participative” atau memberi ruang partisipasi masyarakat yang luas. Hasilnya, Pemerintah Kota Semarang disebut menjadi salah satu pemerintah daerah terbaik di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang menempatkan Pemkot Semarang sebagai urutan pertama di Jawa Tengah dan urutan kedua nasional untuk peringkat *Monitoring Center of Prevention* (MCP), yang didasarkan pada kinerja di bidang pengadaan barang jasa, perizinan, capaian APBD, pajak daerah, serta pengelolaan aset daerah (Radarsemarang, 2022).



DAFTAR PUSTAKA



Agusalim, L. (2016). "Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia". *KINERJA: Journal of Business and Economics*. 20(1): 53-68. DOI: 10.24002/kinerja.v20i1.697.

Agusalim, L. (2022). *Daya Saing Ekonomi dan Potensi Ekonomi Daerah: Konsep, Pengukuran, dan Analisisnya di Provinsi Jambi*. Literasi Nusantara. Kota Malang.

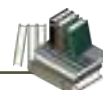
Agusalim, L., Anggraeni, L., & Pasaribu, S. H. (2022). "The Economy of Indonesia: Driven by Physical or Human Capital?". *JEJAK: Journal of Economics and Policy*. 15(1), 10-28. DOI: 10.15294/jejak.v15i1.34418.

Alvara Research Center. (2020). "Indonesia Gen Z dan Milenial Report 2020". <https://alvara-strategic.com/indonesia-gen-z-and-millenial-report-2020>. Diakses tanggal 6 Oktober 2020.

Andrews, Kenneth. (1971). "Andrew's Strategy Framework", <https://puduhari.wixsite.com/strategyframeworks/copy-of-1970-bcg-portfolio-matrix>, Diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Awal.id. (2021). "Pembangunan Sistem Kota Cerdas, Wali Kota Semarang: Harus Cerdas Pahami Persoalan Masyarakat". <https://awal.id/2021/10/pembangunan-sistem-kota-cerdas-wali-kota-semarang-harus-cerdas-pahami-persoalan-masyarakat/>. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

- Bappeda Kota Semarang. (2010). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*. Semarang: Bappeda Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025*. Semarang: Bappeda Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2010). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015*. Semarang: Bappeda Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021*. Semarang: Bappeda Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2020). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2020*. Semarang: Bappeda Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021*. Semarang: Bappeda Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026*. Semarang: Bappeda Kota Semarang.
- Bappeda Kota Semarang. (2022). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022*. Semarang: Bappeda Kota Semarang.
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. (2005) *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025*. Semarang: Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. (2013). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018*. Semarang: Bappeda Provinsi Jawa Tengah.



- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. (2019) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024*. Semarang: Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
- Bappenas. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*. Jakarta: Bappenas.
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performances Beyond Expectations*. New York: Free Press.
- Beritagar.id. (2015). "Survei Persepsi Korupsi TII 2015, Kota Bandung Paling Rendah". <https://www.kaskus.co.id/thread/55f9191b642eb68f708b456c/survei-pesanan-ahoaxsurvei-persepsi-korupsi-tii-2015-kota-bandung-paling-rendah>. Diakses tanggal 16 September 2015.
- Beritasatu. (2019). "Semarang Dinilai sebagai Kota Cerdas Indonesia". <https://www.beritasatu.com/nasional/586042/semarang-dinilai-sebagai-kota-cerdas-indonesia>. Diakses tanggal Senin, 18 November 2019.
- Bisnis.com. (2013). "KINERJA JATENG: Realisasi Investasi Asing dan Dalam Negeri 2012 Turun", <https://kabar24.bisnis.com/read/20130125/186/133165/kinerja-jateng-realisasi-investasi-asing-dan-dalam-negeri-2012-turun-1>, Diakses tanggal 25 Januari 2013.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). "Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan". <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>, Diakses tanggal 15 April 2022.
- BPS (2015). "Kompilasi Data Statistik Indeks Pembangunan Gender (Metode 2014), 2015", Jakarta: Direktorat Diseminasi



Statistik BPS. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/pdf?kd=3505&th=2015>, Diakses tanggal 15 April 2022.

BPS Kota Semarang. (2021a). "PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010–2020". <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/02/26/126/pdrb-kota-semarang-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010---2020.html>. Diakses tanggal 25 Desember 2021.

BPS Kota Semarang. (2021b). "PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2010-2020". <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/04/29/146/-seri-2010-pdrb-kota-semarang-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran-juta-rupiah-2010-2020.html>. Diakses tanggal 25 Desember 2021.

BPS Kota Semarang. (2021c). "Distribusi PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010-2020", <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/02/26/127/distribusi-pdrb-kota-semarang-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-persen-2010---2020.html>, Diakses tanggal 25 Desember 2021.

Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. Hoboken: John Wiley & Sons.

Bryson, John. (1995). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bunyamin. (2022). "Pengembangan Kota Cerdas di Semarang". <https://cgise.geodesi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/381/2018/10/Paparan-CGISE-Kota-Semarang.pdf>. Diakses tanggal 30 Agustus 2022.



- Campbell, J. P. and R. J. Campbell. (1990). *Productivity in organizations*. San Francisco: Josey-Bass Publisher.
- CNBC Indonesia. (2020). "Jokowi: Kita Harus Berdamai dengan Corona, Sampai Vaksin Ada". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200508090018-4-157010/jokowi-kita-harus-berdamai-dengan-corona-sampai-vaksin-ada>. Diakses tanggal 8/5/2020.
- Collins, J. C. & Porras J. (1998). "Building Your Company's Vision. Harvard Business Review". September-October Issue. <https://hbr.org/1998/09/building-your-companys-vision>. Diakses tanggal 22 Oktober 2020.
- Coulter, M. (2003). *Management*. 7th Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River 372.
- Detikjateng. (2022). "1 Tahun Menjabat, Ini Sederet Pencapaian Wali Kota Semarang". <https://www.detik.com/jateng/berita/d-5959895/1-tahun-menjabat-ini-sederet-pencapaian-wali-kota-semarang>. Diakses tanggal 26 Februari 2022.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DNKEK). (2019a). Kawasan Ekonomi Khusus. Diakses dari <http://kek.go.id/>. Diakses pada 7 Maret 2019.
- Dinas Sosial Kota Semarang. (2020). "Launching Bantuan Sosial Melalui Kartu (Bas Merdu) Semarang Hebat". <http://dinsos.semarangkota.go.id/berita/launching-bantuan-sosial-melalui-kartu-bas-merdu-semarang-hebat>. Diakses tanggal 21 September 2020.
- Hartshorn, Truman A. (1992). *Interpreting the City: An Urban Geography*. New York: John Wiley & Sons Inc.



- Hitt, Michael A., Ireland R. Duane & Robert E. Hoskisson. (2001). *Strategic Management: Competitiveness and Globalization*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). (2011). "Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan". <http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/monitoringdanevaluasiperencanaanpembangunan>. Diakses 9 Agustus 2011.
- Jateng.inews.id. (2022). "Hendi Luncurkan Simpul Ekonomi Jawa sebagai Brand Kota Semarang, Ini Tujuannya". <https://jateng.inews.id/berita/hendi-luncurkan-simpul-ekonomi-jawa-sebagai-brand-kota-semarang-ini-tujuannya>. Diakses Rabu, 24 Agustus 2022.
- Kasali, Rhenald. (2007). *Membedik Pasar Indonesia Segmentasi Targeting Positioning*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Katadata. (2021). "Jalan yang Berkondisi Baik di Semarang Berkurang 65,4 Km pada 2020". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/09/jalan-yang-berkondisi-baik-di-semarang-berkurang-654-km-pada-2020>. Diakses tanggal 9/8/2021.
- Kemenhub (Kementerian Perhubungan). (2022). "Menhub: Terminal Baru Bandara Ahmad Yani Semarang Sembilan Kali Lebih Besar Dari Sebelumnya". <http://dephub.go.id/post/read/menhub--terminal-baru-bandara-ahmad-yani-semarang-sembilan-kali-lebih-besar-dari-sebelumnya?language=id>. Diakses tanggal 11/2/2022.



- Kompas. (2012). "Wali Kota Semarang Jadi Tersangka Korupsi APBD".
<https://nasional.kompas.com/read/2012/03/17/02580763/wali.kota.semarang.jadi.tersangka.korupsi.apbd>. Diakses tanggal 17/3/2012.
- Kompas. (2013). "Hendrar Prihadi Dilantik Jadi Wali Kota Semarang".
<https://regional.kompas.com/read/2013/10/21/1109325/Hendrar.Prihadi.Dilantik.Jadi.Wali.Kota.Semarang>. Diakses tanggal 21/10/2013.
- Kompas. (2015). "Dugaan Korupsi, Dua Mantan Wali Kota Semarang Diperiksa".
<https://regional.kompas.com/read/2015/01/28/14031671/Dugaan.Korupsi.Dua.Mantan.Wali.Kota.Semarang.Diperiksa>. Diakses tanggal 28/1/2015.
- Kompas. (2021). "Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021".
<https://regional.kompas.com/read/2021/11/26/12445841/tunjukkan-kinerja-baik-bangun-kota-semarang-walkot-hendi-dapat-penghargaan>. Diakses tanggal 26/11/2021.
- Kompas. (2022). "Kalahkan DKI, Semarang Jadi Kota Besar dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Selama Pandemi",
<https://regional.kompas.com/read/2022/03/01/184455878/kalahkan-dki-semarang-jadi-kota-besar-dengan-pertumbuhan-ekonomi-tertinggi?page=all>. Diakses tanggal 01/03/2022, 18:44 WIB.
- Kompasiana.com. (2021). "Penerapan Smart City di Kota Semarang".
<https://www.kompasiana.com/hasyir/61472eb553f9cd13447422e2/penerapan-smart-city-di-kota-semarang>. Diakses tanggal 19 September 2021.



- Kontan. (2012). "Soemarmo Hadi Divonis 1,5 Tahun Penjara". <https://nasional.kontan.co.id/news/soemarmo-hadi-divonis-15-tahun-penjara>. Diakses tanggal 13 Agustus 2012.
- Kuncoro, M., Widoyono, S. B., Nursetyohadi, D., Wuranti, H., Sriningsih., Susanti, D. D., Taruno, H. T., Widyastuti, S. (2021). *Jawa Tengah Melawan Pandemi dan Resesi*. Penerbit ANDI: Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad & Maria Christina Yuli Pratiwi (2018). *Membangun Kalimantan: Potensi Ekonomi Daerah, Pusat Pertumbuhan, dan Strategi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2012). *Ekonomika Aglomerasi: Dinamika & Dimensi Spasial Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis: Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Regional*. 3 ed. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2015). Membangun dari "Pinggiran". *Kompas*. 9/2/2015.
- Kuncoro, Mudrajad. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori & Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



- Kuncoro, Mudrajad. (2019). *Ekonomika Regional: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajad. (2020). "Jeritan ODP dan PDP". *Investor Daily*, <https://investor.id/opinion/jeritan-odp-dan-pdp>. Diakses tanggal 20/7/2020.
- Kuncoro, Mudrajad. (2020). *Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif di Era Industri 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kuncoro, Mudrajad. (ed.) (2008). *Visi, Misi, dan Strategi Kaltim Bangkit*. Kalimantan Timur: Tim Sukses Awang Faroek Ishak.
- Kuncoro, Mudrajad, Sentot Bangun Widoyono, Didik Nursetyohadi, Hayu Wuranti, Sriningsih, Diana Dwi Susanti, Hendrawan Toni Taruno, Santi Widyastuti. (2021). *Jawa Tengah Melawan Pandemi & Resesi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lenteratoday. (2022). "Pemkot Semarang Tampilkan Kesuksesan Urban Farming Lewat Pasar Tani di Kota Lama". <https://lenteratoday.com/pemkot-semarang-tampilkan-kesuksesan-urban-farming-lewat-pasar-tani-di-kota-lama/>. Diakses tanggal 11/9/2022.
- Liputan6. (2015). "Calon Walikota Semarang: Jadi Napi Korupsi Karena Demi Rakyat". <https://www.liputan6.com/news/read/2279890/calon-walikota-semarang-jadi-napi-korupsi-karena-demi-rakyat>. Diakses tanggal 27/7/2015.
- Muktiali, M., dan A. M. Sukmawati. (2016). "Kajian Ekonomi Terkait Visi RPJMD Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa". *Jurnal RIPTEK*, 10(1), 71-81.
- Nanda, Chairunisa Afnidya, Arief Laila Nugraha, Hana Sugiastu Firdaus. (2019). "Analisis Tingkat Daerah Rawan Kriminalitas Menggunakan Metode *Kernel Density* di Wilayah Hukum Polrestabes Kota



Semarang". *Jurnal Geodesi Undip*, 8(4), 50-58. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/25144>. Diakses tanggal 1 Oktober 2019.

Pelindo. (2022). "Pelabuhan Tanjung Emas". <https://www.pelindo.co.id/port/pelabuhan-tanjung-emas>. Diakses tanggal 1 Oktober 2022.

Pemerintah Kota Semarang. (2011). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010–2015*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang. (2020). "Informasi Data Bantuan Sosial (Covid) Semarang". <http://infobansos.semarangkota.go.id/landing/th2020>. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

Pemerintah Kota Semarang. (2021). "Semarang Dinilai Berhasil Hadapi Pandemi Dengan Sistem Kota Cerdas". https://semarangkota.go.id/p/2985/semarang_dinilai_berhasil_hadapi_pandemi_dengan_sistem_kota_cerdas#. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

Pemprov Jateng. (2020). "Kota Semarang Juara Umum Penghargaan Indeks Daya Saing Daerah". <https://jatengprov.go.id/publik/kota-semarang-juara-umum-penghargaan-indeks-daya-saing-daerah/>. Diakses tanggal 25/11/2020.

Pemprov Jateng. (2022). "31 Daerah di Jateng Raih WTP". <https://jatengprov.go.id/publik/31-daerah-di-jateng-raih-wtp/>. Diakses tanggal 7/6/2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Permenkeu RI No. 54/pmk.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.



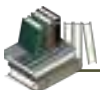
- Perkins, Dwight H., Steven Radelet, David L. Lindauer & Steven A. Blockc. (2006). *Economics of Development (Sevent Edition)*. ISBN-13: 978-0393934359. W. W. Norton & Company: New York.
- Polito, Frank. (2020). "The Power of Scenario Planning in SAP IBP". <https://www.linkedin.com/pulse/power-scenario-planning-sap-ibp-vice-president-at-scmo2>. Diakses 27 April 2020.
- Pradipto, Rimawan, Timotius Hendrik Partohap, Pramashavira. (2016). "Korupsi Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015)". <https://www.facebook.com/Cegah-Korupsi-140886312588211/>, https://www.researchgate.net/publication/330796279_Database_Korupsi_Gelombang_IV_4th_Wave_of_Corruption_Database_of_Indonesia, Yogyakarta: Cegah Korupsi FEB UGM. Diakses 1 Februari 2019.
- Pratiwi, Galih. (2021). "Pemetaan Resiko Banjir Rob di Kawasan Utara Kota Semarang". https://geo.mapid.io/blog_read/6123aa57bf1fa62e0a2640fd. Diakses tanggal 2 September 2021.
- Radarsemarang.ID. (2022). "Pemkot Semarang Jadi Pemda Terbaik Kedua di Indonesia", <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/02/12/pemkot-semarang-jadi-pemda-terbaik-kedua-di-indonesia/>. Diakses tanggal 12 Februari 2022.
- Sari, Rizqi Wardiana dan Eppy Yuliani. (2021). "Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Nonpertanian untuk Perumahan". *Jurnal Kajian Ruang*, Vol. 1, No. 2, September, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>. Diakses tanggal 8 Juni 2021.

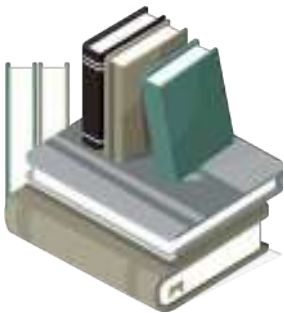


- Sihaloho, T. dan N. Muna. (2013). *Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan*. Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Jakarta (ID): Kementerian Perdagangan.
- Solopos.com. (2018). "FOTO JALAN RUSAK JATENG: Begini Lubang di Jalan Kota Semarang...", <https://www.solopos.com/jalan-rusak-jateng-begini-lubang-di-jalan-kota-semarang-898121>. Diakses tanggal 26/2/2018.
- Suara Merdeka. (2022). "Angka Kemiskinan Kota Semarang Bertambah, Begini Upaya Pemkot untuk Menekan". <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/pr-043157818/angka-kemiskinan-kota-semarang-bertambah-begini-upaya-pemkot-untuk-menekan?page=2>. Diakses tanggal 7 April 2022.
- SuaraJawaTengah.id. (2021). "Wali Kota Semarang Minta Jajarannya Tak Lakukan Pungli: Korupsi Kita Berantas Bersama". <https://jateng.suara.com/read/2021/12/07/183415/wali-kota-semarang-minta-jajarannya-tak-lakukan-pungli-korupsi-kita-berantas-bersama>. Diakses tanggal 7/12/2021.
- Suyono, Haryono. (2020). "Menyongsong Era Baru dengan Budaya dan Norma Baru". *Investor Daily*, <https://investor.id/opinion/217713/menyongsong-era-baru-dengan-budaya-dan-norma-baru>. Diakses Rabu, 22 Juli 2020.
- Syani, Abdul. (2010). "Analisis Dampak Penerapan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah". *Journal Of Government UTA 45 Jakarta*. Diakses 26 Oktober 20120.



- Syavitri, Rizka. (2021). "Mengulik Kesuksesan Transformasional Hendrar Prihadi untuk Semarang Maju". <https://yoursay.suara.com/kolom/2021/06/10/170500/mengulik-kesuksesan-transformasional-hendrar-prihadi-untuk-semarang-maju>, Diakses Kamis, 10 Juni 2021.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Erlangga: Jakarta.
- Tribun. (2014). "Jalan Rusak di Tengah Kota Semarang". <https://m.tribunnews.com/images/regional/view/976681/jalan-rusak-di-semarang>. Diakses tanggal 19 Januari 2014.
- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. (2020). *Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wahyuni, Sari dan Wahyuningsih. (2018). *Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*. Salemba Empat: Yogyakarta.
- Wali Kota Semarang. (2017). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021*. Semarang: Wali Kota Semarang.
- WartaEkonomi. (2020). "Jateng Bakal Fokus Pulihkan UMKM dan Pariwisata Usai Pandemi Corona". <https://www.wartaekonomi.co.id/read283658/jateng-bakal-fokus-pulihkan-umkm-dan-pariwisata-usai-pandemi-corona>, Diakses pada 1 Mei 2020.





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

TENTANG PENULIS



KETUA: Prof. MUDRAJAD KUNCORO, Ph.D.



MUDRAJAD KUNCORO adalah guru besar ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang sejak 18 November 2019 mendapat amanah sebagai Rektor Universitas Trilogi, Jakarta. Lahir di Yogyakarta, 4 September 1965. Berdasarkan data 5 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh AD Scientific Index tentang *Top 5000 World Scientists 2022*, dengan memiliki H-index: 36, i10 index: 79, dan sitasi: 28.703, dosen FEB UGM ini ditempatkan pada peringkat pertama top ilmuwan UGM, urutan #3 top ilmuwan di Indonesia, *rank* #63 di Asia, *rank* #1196 di dunia dalam bidang ilmu ekonomi (*Economics*) (<https://www.adscientificindex.com/scientist.php?id=414187>). Ia pernah masuk peringkat ke-13 ilmuwan terkemuka di Indonesia versi Webometrics (<http://www.webometrics.info/en/node/96>) dan penulis/peneliti top ke-4 Indonesia berdasarkan *Science & Technology*

Index (Kemenristekdikti, Maret 2017). Ia mendapat gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat *cum laude* dari FE UGM (1989), *Graduate Diploma* dengan spesialisasi Keuangan Daerah (1992) dan *Master of Social Science* dari University of Birmingham, Inggris (1993), dan Doktor (Ph.D.) dengan spesialisasi *Business & Regional Development* dari University of Melbourne, Australia (2001), dan meraih guru besar termuda FEB UGM (2006). Ia pernah mengikuti kursus singkat *Fiqh for Economists* di International Islamic University, Selangor, Malaysia (1994), *visiting scholar* di Department of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, Canberra (1998), dosen tamu di University of Melbourne, University of Leiden, dan University of Groningen, serta menjadi delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi International Labour Organization ke-96 di Geneva (2007). Jabatan dan tugas yang pernah diemban: Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM (2016-2017), Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM (2007-2011), *Chief Economist Recapital Advisors* yang dimiliki Sandiaga Uno (2008-2010), Anggota Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2006-2008), Tim Ahli Bidang Ekonomi Kadin (2007-2009), Tim Penyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (2006-2008), Ketua tim revitalisasi Perusda Kaltim (2012-2018), Komisaris PT Anindya Mitra Internasional (Perusda milik Provinsi DIY yang punya dua mal dan TransJogja, 2004-2021), staf ahli Gubernur DIY bidang ekonomi (Februari 2011-Agustus 2012), *Editor in Chief Journal of Indonesian Economy & Business* (2004-2014), Manajer Kantor Publikasi FEB UGM (2013), dan *Chief Economist* PT Jaya Samudra Karunia Group (2016-2021). Artikelnya telah dipresentasikan dalam beberapa konferensi internasional di Sydney, Melbourne, Le Havre, Geneva, Groningen, Amsterdam, Leiden, Tokyo, Guangzhou, Denmark, Perth, Canberra, Singapura, Seoul, Manila, Kuala Lumpur, London, Roma, Paris, Cambridge, Oxford. Penghargaan ilmiah



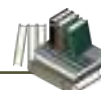
(award) yang pernah diperoleh, a.l.: (1) *Lifetime Achievement Award* in “International Scientist Awards 2022 on Engineering, Science and Medicine” dari INSO, India (2022); (2) *Inspiring Professional and Leadership Award 2020-2021* dari *Indonesia Award Magazine* (2020); (3) *Best presenter* bersama Dwiana Fiqhi Cahyani di Said Business School, Oxford University (2018); (4) *Best Paper Award* di UIN Malang (2018); (5) *Best Paper Award* di Konferensi Internasional di Roma Italia (2016); (6) *Best Tract Presentation & Award of Honour* dari Academy of Business & Retail Management di London 4-5 November 2013; (7) Penelitian & Pengabdian Award 2010 dari Rektor UGM untuk Kategori Publikasi Internasional Terbaik ke-3 se-UGM; (8) *Special Dean Award* dari Faculty of Economics and Commerce, University of Melbourne; (9) *Teaching Award dan Lecture Notes Award* dari QUE-Economics yang disponsori World Bank. Buku yang telah diterbitkan "baru" 70, a.l.: (1) *Ekonomika Regional: Teori & Praktik*; (2) *Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri 2030?*; (3) *Otonomi Daerah*; (4) *Masalah, Kebijakan dan Politik: Ekonomika Pembangunan*; (5) *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori & Aplikasi*. E-mail: profmudrajadk@gmail.com; Telp/fax: ++62274 895734.



ANGGOTA: LESTARI AGUSALIM, S.E., M.Si.



LESTARI AGUSALIM adalah dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Trilogi sejak tahun 2013. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan di IPB (2009) dan Program Magister pada Program Studi Ilmu Ekonomi IPB (2013). Pada tahun 2019, melanjutkan studi S-3 Ilmu Ekonomi di IPB University. Selama di Universitas Trilogi, pernah diamanahkan sebagai Sekretaris Pusat Studi Ekonomi Pancasila (2015-2017), Koordinator Kelas Ekstensi dan Karyawan (2017-2019), serta Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan (2018-2019). Sejauh ini terlibat dalam penulisan buku yang telah terbit sebanyak sepuluh buku. Pada tahun 2022 telah menyusun dua buku dengan judul (1) *Perencanaan Ketenagakerjaan*, dan (2) *Daya Saing dan Potensi Ekonomi Daerah*. Ia juga aktif menulis artikel di beberapa jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, serta media cetak nasional. Ia juga aktif terlibat sebagai ketua tim dan anggota tim ahli dalam penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi, pemerintah pusat, serta daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional. Ia pernah mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi terbaik tingkat universitas pada tahun 2016. Selain itu, ia pernah memenangi *call for paper* dalam Seminar Nasional dan Kongres ISEI ke-XX tahun 2018 dengan judul “Analisis Perkembangan, Kinerja, dan Daya Saing Koperasi Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi”. Ketika menjadi mahasiswa, ia aktif terlibat dalam organisasi intra dan ekstra kampus, di antaranya BEM Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB, Himpunan Profesi dan Peminat Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (HIPOTESA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB (Forum WACANA IPB), dan Ikatan Keluarga Pemuda Mahasiswa Sulawesi Tenggara (IKPM SULTRA). *E-mail*: lestariagusalim@gmail.com.

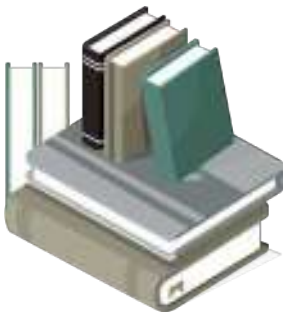


ANGGOTA: ZED ABDULLAH



ZED ABDULLAH adalah dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Trilogi (d/h STEKPI) yang telah mengabdikan sejak tahun 1990. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan di UNSRI (1988) dan Program Magister pada Program Studi Ekonomi dan Pembangunan di UGM (1994). Selama di Universitas Trilogi, pernah diamanahkan sebagai Kabag Kemahasiswaan (2004-2006), Kabag Akademik (2006-2007), Kabag Kerja Sama/*Marketing* (2007-2008), Kasubdit Admisi dan Promosi (2008-2010), Direktur Kerja Sama (2010-2010), Kepala Program S-1 Profesi dan Ekstensi (2011-2017), Kepala Biro Admisi dan Pemasaran (2018-2019), Kepala Biro Perpustakaan dan Koordinator Ekstensi S-1 (2019-2021), dan Koordinator Ekstensi S-1 (2022-2023). Sejauh ini terlibat pelatihan, *workshop*, dan seminar.





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

INDEKS



A

Aglomerasi Kota 21, 224

Analisis Location Quotient 41, 225

Arah Perencanaan 22

ATM Beras 150

B

Bambang Riyanto Trilaksono 7

Bandar Udara Internasional Ahmad Yani 57

Banjir 10, 22, 65, 77, 78, 89, 98, 110, 111, 127, 225

Bappeda 27, 48, 105, 107, 123, 128, 129, 133, 135, 138, 139, 140, 161,
164, 167, 168, 170, 175, 179, 185, 213, 215, 216

Bappeda Jateng 105

Basic Needs Approach 47

Berbudaya 104, 114, 116

Berdaya Saing 111, 127, 128

Berkualitas 18, 56, 91, 111, 114, 115, 116, 127, 128, 129, 152, 217

Bottom-Up 9, 18, 22, 85, 93, 225

BPS 2, 3, 4, 5, 6, 14, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 88, 112, 113, 191, 192, 193, 195, 197, 199,
200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210

Buka Invest 150

Bullying 147

C

Change by Design 81

Constant Price 30

Converter Kit 145

Corporate Social Responsibility 165

Covid-19 , 19, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 38, 40, 43, 45, 85, 91, 98, 119, 120,
121, 122, 125, 126, 131, 132, 133, 135, 149, 151, 161, 162, 163, 164,
172, 173, 174, 175, 182, 191, 194, 196, 197, 210, Iii

Crime Index 61

Current Price 30

D

Daya Saing 22, 56, 65, 76, 83, 84, 91, 106, 114, 115, 122, 127, 128, 129,
130, 146, 225

Desk Study 27, 224

Distribusi PDRB 34, 36, 37, 112

DKI Jakarta 1, 2, 5, 6, 108, 209, 223

Do It Now and Fast 125

Dynamic Externalities 16, 224



E

- Economies of Agglomeration 16
- Economies of Proximity 15
- Eddy Satriya 6, 7
- Ekonomi Kerakyatan 116
- Ekonomi Lokal 115, 116, 130, 135, 161
- E-Money 146
- Evaluasi Program 157
- Expected Years of Schooling 54

F

- Financial Deepening 33
- Focus Group Discussion 27, 28, 97

G

- Ganjar Pranowo 2, 115, 125, 126
- Gayamsari 6, 10, 72, 113, 180
- Genuk, Pedurungan 10
- Geografis 145
- Gischa 5
- Goesmart 6, 7, 223
- Good Governance 22, 65, 84, 97, 225
- Government Service 18
- Grand Strategy 104
- Gumregah 85



H

Head Count Index 47

Human Development Index 53

I

Identifikasi Masalah 9

Improve 125

Indeks Gini 54, 55, 204, 205

Indikator Capaian 23, 27, 189, 226

Indikator Kinerja 116, 117, 163, 184, 212

Infrastruktur Berkualitas 56, 116

Inovasi Perencanaan 141, 143

Investasi 11, 22, 65, 76, 79, 83, 88, 89, 90, 110, 111, 130, 139, 140, 144,
147, 150, 225

Ipm Kota Semarang 11, 53, 54, 66, 207, 208, 210

J

Jateng 1, 2, 3, 4, 48, 51, 53, 56, 84, 85, 91, 104, 105, 106, 115, 125, 126,
210, 216, 227

Jateng Bangkit 85

Jawa Barat 1, 2, 227

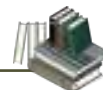
Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari 104, 105

Jawa Timur 1, 2, 227

K

Kajian 15, 26, 27, 33, 84, 98, 175, 179, 186, 224

Kampung Tematik 142, 152, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 174, 180, 181



Kemerdekaan Masyarakat 115, 116

Kemiskinan 9, 11, 21, 23, 47, 48, 49, 60, 82, 89, 90, 101, 106, 110, 111, 120, 121, 127, 128, 130, 134, 152, 159, 160, 163, 164, 166, 174, 180, 189, 201, 202, 203, 204, 225, 226

Kerangka Pemikiran 21

Kerangka Teknokratik 87

Kernel Density 71, 72

Ketimpangan Pendapatan 11, 23, 47, 55, 203, 204, 205, 206, 226

Kinerja Penataan Ruang 76

Kluster Spasial 15

Kondisi Jalan 57, 75

Korupsi 62, 63, 67, 69, 70, 91, 105, 228

Kotak Hitam 9

Kota Metropolitan 5, 9, 10, 11, 13, 108, 109, 111, 175, 208, 223

Kota Perdagangan dan Jasa 86, 88, 105, 108, 110

Kriminalitas 21, 47, 60, 61, 71, 72, 211, 225

L

Lingkungan Hidup 8, 22, 65, 91, 106, 115, 130, 225

M

Mean Years of Schooling 54

Medical Record 156, 157, 159

Memorandum of Understanding 18

Misi 11, 22, 27, 81, 86, 90, 99, 103, 104, 113, 114, 116, 211, 218, 221, 223, 225

Musrenbang 93, 94, 95, 96, 97, 99, 142, 169



N

New Normal 23, 119, 121, 126, 226

Non-Profit 40

O

Ora Duwe Penghasilan 120

Oude Stad Landbouwmart 140

Outcome 23, 155, 163, 183, 187, 226

Output 23, 43, 155, 158, 163, 183, 187, 226

P

Panen Padi 182

Pasar Tani 140

PDRB 4, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 110, 111, 112,
189, 192, 193, 194, 195, 224, 225, 226

PDRB ADHK 31, 32, 33, 34, 39, 41

Pelabuhan Tanjung Emas 57

Pelaku Utama Korupsi 63

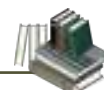
Pembangunan Jangka Panjang 27, 104, 105, 107, 224

Pembangunan Kota 7, 9, 13, 15, 23, 25, 27, 35, 45, 59, 81, 83, 91, 92,
103, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 127, 128, 129, 189, 226

Pembangunan Manusia 11, 23, 53, 66, 110, 111, 189, 206, 208, 209,
226

Pemetaan Tipologi Klassen 44

Penduduk Terbanyak 12



Pengangguran 9, 11, 21, 23, 60, 82, 90, 106, 111, 121, 127, 128, 152,
160, 189, 196, 198, 225, 226

Peraturan Pemerintah 70, 93, 143

Perbandingan Tingkat Kemiskinan 50, 202, 203

Perkembangan TPT 199

Persepsi Masyarakat 69

Pertumbuhan PDRB 38, 39, 40, 41

Perumusan Masalah 1, 20, 223

Peta Kota 14

Prioritas Pembangunan 81, 82, 83, 91, 92, 93, 99, 106, 113, 119, 128,
129, 150, 174

Q

Quality of Life 17, 18

R

Rahasia di Balik 9

Rancangan Penelitian 21, 25, 224

Rating 7

Real Estate 37, 43, 45

Realisasi Kinerja 60

Reformasi Birokrasi 82, 89, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 212, 220

Reformasi Birokrasi Pemerintahan 116

Religius 105, 107, 108, 115



RPJMD 27, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 104, 105, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 129, 130, 141, 174, 182, 185, 187, 224

RPJMD 2010-2015 82, 84, 105, 108, 109, 114, 129

RPJMD 2016-2021 35, 36, 37, 38, 39, 82, 83, 84, 87, 88, 105, 108, 109, 110, 114, 116

S

San Piisan 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159

Scenario Planning 103

Sejahtera 12, 86, 91, 104, 105, 108, 110, 150, 223

Semarang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228

Semarang Barat 6, 10, 72, 113, 135

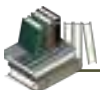
Semarang Smart City 7, 13, 18, 20, 28

Semarang Timur 5, 6, 10, 72, 113, 172

Semarang Utara 6, 10, 58, 72, 113, 135



Semarang yang Hebat 111
Sensitive Response 8
Sinergi Prioritas 107
Siswa Putus Sekolah 67
Smart Economy 19, 224
Smart Environment 19, 224
Smart Governance 19, 224
Smart Government 18
Smart Infrastructure 18
Smart License 18
Smart Lighting 145
Smart Living 19, 224
Smart Mobility 18
Smart People 18
Smart Society 19, 224
Study from Home 125
Stunting 153, 155, 159
Sumbangan Provinsi 3
Survei Kepuasan Masyarakat 70, 213
Sustainable Development Goals 174



T

Tata Ruang 22, 25, 58, 65, 76, 114, 129, 130, 225

Tata Ruang Wilayah 58, 114, 129

Teknokratik 86, 87

Terminal Bus 58

Tertib 104

Tindak Pidana 60, 61, 62, 63, 84

Tingkat Kemiskinan 48, 50, 202, 203

Top-Down 9, 18, 22, 85, 90, 91, 225

Transparency 69

Triple Intervention 123

Tugu 5, 6, 10, 58, 113

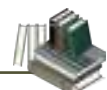
U

Un Tempo Prezioso 127

Urban Farming 140, 162, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185,
186, 187

Urban Farming Corner 187

UU No. 25/2004 93



V

Velocity of Money 33

Visi 9, 11, 12, 13, 22, 27, 45, 81, 84, 86, 88, 90, 91, 99, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 113, 218, 221, 223, 225

Visi Kota Semarang 84, 86, 107, 225

Vision of Success 81

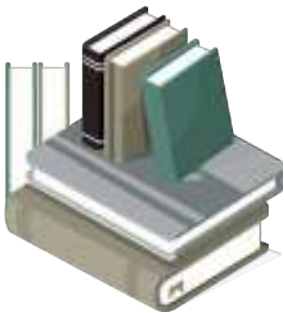
Visi Pembangunan Kota Semarang 107, 110, 111, 113

W

Weak Governance 67

Website Siaga Corona 151





**MEMBANGUN
KOTA SEMARANG
SEMAKIN HEBAT!**

SEMARANG
Semakin
HEBAT!

 **semarang**
simpul ekonomi jawa

Mengapa buku ini menarik? Penulisan buku ini menarik setidaknya karena Kota Semarang meraih dua penghargaan, yaitu: (1) Kota Semarang sebagai kota cerdas Indonesia pada penghargaan bertaraf nasional Goesmart 2019 yang digelar di Aula Barat Institut Teknologi Bandung; dan (2) Kota Semarang menjadi kota terbaik di Indonesia dalam hal perencanaan dan pencapaian kota berturut-turut selama 3 tahun dari tahun 2019 hingga 2021.

Berapa sumbangan Kota Semarang terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah (Jateng)? Kota Semarang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jateng sebesar 14,45% pada tahun 2021. Jateng memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia selama 2010–2021 sekitar 1,9% hingga 8,9%. Dari sudut aglomerasi perkotaan dan urbanisasi, Kota Semarang menarik untuk disimak perkembangan dan dinamikanya sebagai kota metropolitan terbesar ke-5 di Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1,66 juta jiwa, di bawah DKI Jakarta (10,61 juta jiwa), Surabaya (2,88 juta jiwa), Bandung (2,45 juta jiwa), dan Medan (2,46 juta jiwa).

Buku ini pada intinya akan menjawab pertanyaan berikut. (1) Apa potensi ekonomi Kota Semarang berdasarkan lapangan usaha?; (2) Apa masalah mendasar yang dihadapi Kota Semarang?; (3) Apakah isu strategis yang muncul di Kota Semarang?; (4) Bagaimanakah pemda Kota Semarang melakukan perubahan dengan perencanaan (*change by design*)?; (5) Mengapa visi dan misi Kota Semarang perlu diubah?; (6) Bagaimana strategi kebijakan mewujudkan visi “Semarang Kota Perdagangan & Jasa yang Hebat (Makin Hebat) Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”?; (7) Apa program utama dan inovasi daerah yang diimplementasikan oleh Kota Semarang?; serta (8) Sejauh mana capaian pembangunan dilihat dari kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik?

SOCIAL SCIENCES

ISBN 978-623-01-3062-5

ISBN 978-623-01-3063-2 (PDF)



9 786230 130625



1 23 01